



Guru merupakan sosok yang sangat dihormati karena memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru juga sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk kepribadian siswa untuk menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang mampu mengisi lapangan kerja dan siap berwirausaha.

Kesalahan guru dalam memahami profesinya akan mengakibatkan bergesernya fungsi guru secara perlahan-lahan. Pergeseran ini telah menyebabkan dua pihak yang sebelumnya sama-sama membawa kepentingan dan saling membutuhkan, yakni guru dan siswa, menjadi tidak lagi saling membutuhkan. Suasana belajar sangat memberatkan, membosankan, dan jauh dari suasana yang membahagiakan. Dari sinilah konflik demi konflik muncul sehingga pihak-pihak di dalamnya melampiaskan ketidakpuasan dengan cara-cara yang tidak benar.

Realitas pendidikan saat ini adalah menciutnya peran guru dalam proses pengembangan potensi pribadi peserta didik. Hampir tidak ada peran berarti, kecuali sebagai pembekal informasi, yang menyajikan pengetahuan yang harus diketahui dan dihafalkan, tetapi jarang mengajarkan cara-cara mencari pengetahuan yang belum diketahui. Oleh karena itu, penulis mencoba menghadirkan buku yang mengupas sosok guru yang dapat membangun energi perubahan positif mendorong siswa berprestasi.

Buku bertajuk *Pendidikan Profesi Keguruan -Menjadi Guru Inspiratif dan Inovatif-* ini menarik ditelaah oleh para guru untuk masa depan. Istilah guru inspiratif adalah guru yang memiliki orientasi jauh lebih luas. Guru inspiratif memilih melakukan tindakan yang sangat strategis, yaitu mampu memberikan perspektif yang mencerahkan. Guru inspiratif menawarkan perspektif yang memberdayakan dan menghasilkan energi yang kreatif.

Buku ini hadir secara inspiratif dan revolusioner menyelami seluk-beluk dunia guru dan menyuguhkan resep *maknys* untuk menjadi guru yang menyenangkan, inspiratif, kreatif, dan inovatif. Hanya dengan karakter inilah para guru akan mampu mengemban amanah edukatifnya, menghasilkan produk pendidikan yang positif, dinamis, dan kompetitif.

PENERBIT PUSTAKA SETIA



Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164
Telp. (022) 5210588 | Fax. (022) 5224105
E-mail. pustaka_seti@yahoo.com
BANDUNG 40253

www.pustakasetia.com

ISBN 978-979-076-452-1



PENDIDIKAN PROFESI KEGURUAN



pendidikan multikultural

Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa

KONSEP - PRINSIP - IMPLEMENTASI

Drs. Yaya Suryana, M.Ag.

Dr. H. A. Rusdiana, M.M.

Pengantar **Prof. Dr. H. A. Tafsir**



Drs. Yaya Suryana, M.Ag.
Dr. H. A. Rusdiana, M.M.

pendidikan multikultural

Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa

KONSEP - PRINSIP - IMPLEMENTASI

Pengantar Prof. Dr. H. A. Tafsir



Penerbit PUSTAKA SETIA Bandung

**KUTIPAN PASAL 72:
Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

**SUATU UPAYA PENGUATAN JATI DIRI BANGSA
KONSEP, PRINSIP, DAN IMPLEMENTASI**

ISBN 978-979-076-503-0

Cet. I: Februari 2015, 16 × 24 cm, xiv + 356

Penulis: **Drs. Yaya Suryana, M.Ag.**

Dr. H.A. Rusdiana, M.M.

Kata Pengantar: **Prof. Dr. H. Tafsir**

Editor: **Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.**

Desain Sampul: **Tim Desain Pustaka Setia**

Setting, Montase, Layout: **Tim Redaksi Pustaka Setia**

Diterbitkan oleh:

CV PUSTAKA SETIA

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164

Telp. (022) 5210588, Faks. (022) 5224105

e-mail: pustaka_seti@yahoo.com

Bandung 40253

(Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat)

Copyright © 2015 **CV PUSTAKA SETIA**

Dilarang mengutip memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.

Hak penulis dilindungi undang-undang.

All right reserved.

KATA PENGANTAR

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan beragam budaya dan agama sehingga bangsa ini memiliki slogan *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti berbeda-beda, tetapi satu juga. Keberagaman budaya dan tradisi bangsa mengharuskan pemerintah lebih peka terhadap psikologi masyarakat dalam melahirkan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Hal itu disebabkan kebijakan yang dipandang bertentangan dengan kebudayaan dan tradisi masyarakat akan menjadi salah satu penyebab munculnya ketersinggungan sosial, bahkan menciptakan konflik di tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan perlu berbasis pada situasi dan kondisi kultural masyarakat agar implementasinya mendapatkan dukungan masyarakat, baik secara sosiologis maupun psikologis.

Buku ini merupakan buku yang sangat penting karena diperlukan untuk menjawab keinginan pengembangan pendidikan yang berbasis pada kekayaan kultural bangsa. Di samping itu, buku ini merupakan jawaban atas diberlakukannya kurikulum baru tentang pendidikan karakter dan pendidikan multikultural yang mengacu pada tujuan utama pendidikan, yaitu mencerdaskan bangsa dan menciptakan anak didik sebagai generasi yang beriman, bertakwa, berwawasan luas, berakhlak mulia, dan bermanfaat untuk kehidupan pribadinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Saya menyambut baik kehadiran buku ini. Semoga buku ini menyumbangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi pegangan mata kuliah Pendidikan Multikultural.

Prof. Dr. H. A. Tafsir

PENGANTAR PENULIS

Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memerhatikan keterampilan dan pengetahuan dasar bagi warga dunia, penting bagi semua siswa, menembus seluruh aspek sistem pendidikan, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memungkinkan siswa bekerja bagi keadilan sosial. Proses ketika pengajar dan siswa bersama-sama mempelajari pentingnya variabel budaya bagi keberhasilan akademis serta menerapkan ilmu pendidikan yang kritis memberikan perhatian pada pengetahuan sosial dan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan. Pendidikan multikultural sangat penting untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik di beberapa daerah. Melalui pendidikan berbasis multikultural, sikap dan *mindset* (pemikiran) siswa akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman. Selain itu, pendidikan multikultural juga bermanfaat untuk membangun keragaman etnik, ras, agama, dan budaya.

Dalam pendidikan, guru tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan, tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural, seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme atau menanamkan nilai-nilai keberagaman yang inklusif kepada siswa. *Output* yang dihasilkan dari sekolah tidak hanya cakap sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai keberagaman dalam memahami dan menghargai keberadaan para pemeluk agama dan kepercayaan lain.

Peran penting pendidikan multikultural di sekolah untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan berkomunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

Aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural di sekolah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak ada penghinaan terhadap ras, etnis, dan jenis kelamin; menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, di antaranya mencakup pakaian, musik, dan makanan kesukaan; memberikan kebebasan kepada siswa dalam merayakan hari besar umat beragama serta memperkuat sikap siswa agar merasa perlu terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.

Dalam konteks itulah buku *Pendidikan Multikultural* ini hadir membantu mahasiswa, guru, dan kepala sekolah/madrasah beserta tenaga kependidikan lainnya untuk memahami konsep pendidikan multikultural dalam rangka membangun mutu sekolah/madrasah yang dapat menghasilkan lulusan berkualitas sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan zaman.

Buku ini ditulis berdasarkan kebutuhan para mahasiswa, guru, dan kepala sekolah/madrasah beserta tenaga kependidikan lainnya yang terungkap dalam berbagai pertemuan diskusi, seminar, dan lokakarya di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Kementerian Agama (Kemenag). Secara lebih khusus, buku ini ditujukan untuk para mahasiswa S1, S2, dan S3 program Manajemen Pendidikan.

Pemaparan buku ini dimulai dari pendahuluan, manusia dan pendidikan, kemudian menyajikan konsep pendidikan sebagai proses transformasi budaya, pluralisme dan multikulturalisme, mengenal kultur suku bangsa yang damai dan toleran, mengenal politik identitas, kerangka dasar pendidikan multikultural, strategi pengembangan pendidikan multikultural, implementasi pendidikan

multikultural dalam praksis pendidikan Indonesia, penerapan pendidikan multikultural pada tingkat satuan pendidikan, model pembelajaran multikultural, model pengembangan kurikulum berbasis multikultural, dan model pengembangan materi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam perspektif multikultural.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kepentingan umat dan mendapatkan rida Allah SWT. Amin.

Drs. H. Yaya Suryana, M.Ag.

Dr. H.A. Rusdiana, M.M.

DAFTAR ISI

BAB 1

Pendahuluan	1
A. Rasionalisasi	1
B. Konsep Kemajemukan dan Konflik Sosial di Indonesia.....	3
C. Konsep, Indikator, dan Fase Terjadinya Konflik	15
D. Menghadapi dan Mengelola Konflik Sosial.....	36

BAB 2

Manusia dan Pendidikan	43
A. Konsep Manusia	44
B. Fungsi dan Peran Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial	54
C. Konsep dan Teori Pendidikan	66
D. Implementasi Pendidikan Sesuai dengan UU Sisdiknas 2003 dan Implikasinya terhadap Dunia Pendidikan.....	77

BAB 3

Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya	83
A. Konsep Kebudayaan	84
B. Proses Transformasi Kebudayaan.....	88
C. Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia.....	91

BAB 4

Pluralisme dan Multikulturalisme	93
A. Konsep Pluralisme dan Multikulturalisme.....	94
B. Perjalanan Multikulturalisme di Indonesia	104
C. Kegamangan Multikulturalisme di Indonesia	106
D. Multikulturalisme Menjadi masalah.....	108

BAB 5

Mengenal Kultur Suku Bangsa yang Damai dan Toleran	115
A. Keanekaragaman Suku Bangsa Indonesia	116
B. Keanekaragaman Kultur/Budaya Bangsa Indonesia	118
C. Damai dan Toleransi	149
D. Program Pendidikan dan Penyadaran	161

BAB 6

Mengenal Politik Identitas	165
A. Konsep Politik Identitas.....	165
B. Munculnya Politik Identitas.....	167
C. Perkembangan Politik Identitas	175
D. Dinamika Politik Identitas Indonesia	184

BAB 7

Kerangka Dasar Pendidikan Multikultural	193
A. Konsep Pendidikan Multikultural	194
B. Pendidikan Multikultural di Indonesia.....	204

C.	Pendekatan Pendidikan Multikultural.....	211
D.	Hubungan Pendidikan Multikultural dengan Pendidikan Berbasis Masyarakat.....	219

BAB 8

Strategi Pengembangan Pendidikan Multikultural		225
A.	Kerangka Konseptual Pendidikan Multikultural	226
B.	Reorientasi Pendidikan Berbasis Multikultural	230
C.	Tema Pendidikan Multikultural di Indonesia	235
D.	Pengembangan Pendidikan Multikultural Berbasis Kompetensi.....	242

BAB 9

Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praksis Pendidikan di Indonesia		253
A.	Paradigma Pendidikan Multikultural	254
B.	Urgensi Pendidikan Multikultural di Indonesia.....	255
C.	Praktik Pendidikan Multikultural di Indonesia.....	256
D.	Pendidikan Multikultural Berbasis Karakter Keindonesiaan.....	260

BAB 10

Penerapan Pendidikan Multikultural pada Tingkat Satuan Pendidikan.....		267
A.	Pentingnya Penerapan Pendidikan Multikultural pada Tingkat Satuan Pendidikan.....	268
B.	Program Pendidikan Multikultural	273
C.	Peranan Guru dan Sekolah dalam Penerapan Pendidikan Multikultural	275

BAB 11

Model Pembelajaran Multikultural		281
A.	Konsep Pembelajaran Multikultural.....	282

B.	Kurikulum Pembelajaran Multikultural	285
C.	Manajemen Strategi dan Pembelajaran Pendidikan Multikultural	288
D.	Proses Pengelolaan Pembelajaran Multikultural	292

BAB 12

Model Pengembangan Kurikulum Berbasis Multikultural	305
A. Pentingnya Model-model Pendidikan Multikultural	306
B. Konsep Pengembangan Kurikulum Multikultural	310
C. Langkah Pengembangan Kurikulum Multikultural	311
D. Pendekatan dan Tahapan Pengembangan Kurikulum Multikultural	314

BAB 13

Model Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Perspektif Multikultural	319
A. Konsep Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural	319
B. Karakteristik dan Asumsi Pendidikan Agama Islam Multikultural	325
C. Revitalisasi PAI dalam Pendidikan Multikultural	327
D. Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam	331
Daftar Pustaka	345
Biografi Penulis	355

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Rasionalisasi

Indonesia sebagai sebuah negara yang masyarakatnya majemuk terdiri atas berbagai suku, ras, adat istiadat, golongan, kelompok dan agama, serta strata sosial. Kondisi dan situasi seperti ini merupakan suatu kewajaran sejauh perbedaan ini disadari keberadaannya dan dihayati. Namun, ketika perbedaan tersebut mengemuka dan menjadi ancaman untuk kerukunan hidup, perbedaan tersebut menjadi masalah yang harus diselesaikan.

Masyarakat Indonesia yang multikultur, multiras, dan multiagama memiliki potensi yang besar untuk terjadinya konflik antarkelompok, ras, agama, dan suku bangsa. Indikasi ke arah itu terlihat dari tumbuh suburnya berbagai organisasi kemasyarakatan, profesi, dan organisasi lainnya. Selain itu, muncul juga berbagai macam aliran keagamaan.

Konflik yang bernuansa agama tampaknya berkorelasi kuat dengan faktor nonagama. Agama biasanya merupakan faktor pemicu kerusuhan yang didahului dengan konflik yang bernuansa ekonomi, seperti rebutan lahan parkir, rebutan wilayah, dan faktor lainnya yang lebih ekonomis daripada politis. Dengan kata lain, konflik kecil sering terjadi menjadi persoalan besar.

Melihat konflik dan potensi konflik antarkelompok, golongan, dan agama di Indonesia perlu dipahami sebagai suatu hal yang dinamis. Perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia begitu cepat, terutama setelah era reformasi, juga turut memperkuat polarisasi konflik sosial termasuk konflik antarkelompok umat beragama. Kesenjangan yang semakin menganga antarkelompok sosial biasanya dilekatkan dengan penganut agama mayoritas. Keterbelakangan dan pembaruan yang tidak simultan dapat memperkeruh suasana disharmoni serta dapat merusak tatanan sosial atau tatanan hubungan antarkelompok sosial dan antarkelompok umat beragama.

Beragam kelompok ini secara sosial menyebabkan tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai baru melalui berbagai proses yang menuntut adanya institusionalisasi kepentingan. Akan tetapi, dapat pula berupa munculnya konflik-konflik baru karena kelompok lain, golongan lain, dan agama lain merasa bahwa kehadiran mereka menjadi ancaman bagi tatanan masyarakat yang telah ada dan ajeg serta kepentingan dari kelompok lainnya.

Hal itu menunjukkan bahwa sentimen dan kepercayaan yang berlebihan tentang keyakinan masyarakat terhadap salah satu kelompok, golongan, dan/atau agama akan menimbulkan konflik, baik yang bernuansa sosial-ekonomi, politik, maupun agama. Bukti ini sekaligus menunjukkan bahwa potensi konflik ada di berbagai bidang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang simultan dilakukan agar konflik yang potensial tersebut dikelola secara saksama, baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun aparat penegak hukum.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah peranan lembaga pendidikan dan proses pembelajaran yang terjadi di dalamnya. Bahkan, kita perlu bertanya, "Ada apa dengan sistem pendidikan kita? Mengapa sebagian masyarakat Indonesia mudah untuk melakukan kerusuhan? Bagaimana model pendidikan yang dapat menghindari terjadinya konflik sosial?"

B. Konsep Kemajemukan dan Konflik Sosial di Indonesia

1. Memahami Kemajemukan

Dalam masyarakat yang majemuk terdapat berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang adat istiadat, budaya, agama, dan kepentingan. Pernyataan ini diperkuat oleh Furnival (Nasikun, 1986: 31) yang menyatakan bahwa masyarakat majemuk (*plural societies*) adalah suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu dan lainnya dalam suatu kesatuan politik.

Masyarakat yang majemuk biasanya menghadapi tantangan ketidakharmonisan dan perubahan yang terus-menerus. Menurut Piere L. van Berghe (Niti Baskara, 2002: 7), masyarakat majemuk memiliki sifat dasar, antara lain sebagai berikut.

- a. Terjadi segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering memiliki kebudayaan, atau lebih tepat sub-kebudayaan, yang berbeda satu sama lain.
- b. Memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer.
- c. Di antara anggota masyarakat kurang mengembangkan konsensus atas nilai-nilai sosial dasar.
- d. Secara reaktif sering terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Secara reaktif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain.

Berdasarkan definisi Furnival dan karakteristik yang diajukan oleh Berghe, tampak bahwa masyarakat Indonesia memiliki karakteristik seperti itu. Secara vertikal ataupun horizontal, masyarakat kita memang masyarakat yang paling majemuk di dunia, selain Amerika Serikat dan India. Menurut Nasikun (1985: 38-44), kemajemukan ini terjadi karena:

- a. keadaan geografis, dengan beribu-ribu pulau;

- b. Indonesia terletak di antara Samudra Indonesia dan Pasifik, sangat memengaruhi terciptanya pluralitas agama dalam masyarakat Indonesia;
- c. iklim dan struktur tanah yang berbeda di antara berbagai daerah di kepulauan Nusantara ini.

2. *Memahami Keragaman dan Multikultural*

Keragaman atau kemajemukan merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan dalam kehidupan di masyarakat. Keragaman merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan pada masa silam, kini dan pada waktu-waktu mendatang (Azyumardi Azra, 2003).

Adapun multikultural berarti beraneka ragam kebudayaan. Menurut Parsudi Suparlan (2002), akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia.

Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme. Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.

Pembahasan tentang multikulturalisme akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.

Multikulturalisme/keragaman adalah sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Untuk memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang memiliki perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga

terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme, antara lain demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederhana, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

Suparlan mengutip Fay (1996), Jary dan Jary (1991), Watson (2000) dan Reed (ed. 1997) menyebutkan bahwa multikulturalisme ini akan menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural karena multikulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa Indonesia) memiliki sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mozaik. Dalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang memiliki kebudayaan seperti sebuah mozaik. Dengan demikian, multikulturalisme diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis meskipun terdiri atas beraneka ragam latar belakang kebudayaan.

Sebagai fakta, keragaman sering disikapi secara berbeda. Di satu sisi diterima sebagai fakta yang dapat memperkaya kehidupan bersama, tetapi di sisi lain dianggap sebagai faktor penyulit. Kemajemukan dapat mendatangkan manfaat yang besar, tetapi dapat pula menjadi pemicu konflik yang dapat merugikan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik.

Keragaman manusia bukan berarti manusia itu bermacam-macam atau berjenis-jenis seperti halnya binatang dan tumbuhan. Keragaman manusia berarti setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Perbedaan itu ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Contoh, sebagai mahasiswa baru akan menjumpai teman-teman mahasiswa lain dengan sifat dan watak yang

bergam. Dalam kehidupan sehari-hari akan menemukan keragaman sifat dan ciri khas dari setiap orang yang dijumpai. Dengan demikian, manusia sebagai pribadi adalah unik dan beragam.

Selain makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Setiap kelompok persekutuan hidup manusia pun beragam. Masyarakat sebagai persekutuan itu berbeda dan beragam karena ada perbedaan, misalnya dalam hal ras, suku, agama, budaya, ekonomi, status sosial, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan lain-lain. Hal-hal demikian disebut sebagai unsur-unsur yang membentuk keragaman dalam masyarakat.

Keragaman manusia dalam tingkat individu di tingkat masyarakat merupakan tingkat realitas atau kenyataan yang harus dihadapi dan dialami. Keragaman individual dan keragaman sosial adalah implikasi dari kedudukan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Kita sebagai individu akan berbeda dengan seseorang sebagai individu yang lain. Demikian pula, kita sebagai bagian dari satu masyarakat memiliki perbedaan dengan masyarakat lainnya.

Perbedaan inilah yang disebut keragaman. Manusia diciptakan sederajat dengan manusia lainnya. Keragaman juga berarti pengakuan dan jaminan atas kesetaraan dan kesederajatan dalam memenuhi hak dan kewajiban untuk mengikuti norma dan tertib sosial ataupun hukum yang berlaku.

Dalam masyarakat yang majemuk, seperti Indonesia, yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama, kelompok, dan golongan, masalah pengintegrasian kelompok-kelompok tersebut merupakan masalah yang pelik. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk mengelola konflik tersebut agar dapat menghasilkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik dan tidak destruktif.

3. Memahami Konflik Sosial

Istilah “konflik” berasal dari kata *configere*, yang artinya “saling mengejutkan”. Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan kepentingan oleh pihak yang berbeda. Konflik yang terjadi dalam masyarakat sesungguhnya hal yang wajar dan lumrah. Konflik

dapat diolah menjadi sesuatu yang konstruktif (membangun) dan dapat pula destruktif (menghancurkan).

Dapat dikatakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah konflik sosial seiring dengan perubahan yang mengelilinginya. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita terlalu takut dengan konflik. Hidup tanpa konflik merupakan sesuatu yang utopis. Hanya manusia yang tidak realistis yang ingin melarikan dirinya dari hakikat hidup manusia yang penuh dengan konflik sosial (Soetrisno, 2003).

a. *Konflik dan Kekerasan*

Konflik menyebabkan terjadinya interaksi pada tataran yang lebih serius dari sekadar kompetisi. Sebagaimana yang dinyatakan Schelling, konflik, kompetisi, dan kerja sama (*cooperation*) pada dasarnya saling berkaitan, konflik terjadi ketika tujuan, kebutuhan, dan nilai-nilai kelompok yang bersaing bertabrakan dan akibatnya terjadilah agresi, walaupun belum tentu berbentuk kekerasan (Schelling, 1960).

Hubungan-hubungan kelompok adalah akar dari masalah berbagai contoh konflik. Inti akar masalah itu adalah hubungan antarkomunitas/kelompok minoritas dan mayoritas. Tidak diragukan lagi bahwa sistem yang tidak stabil dari perpecahan sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas lebih mungkin dipandang tidak sah (*illegitimate*) dibandingkan dengan sistem yang stabil; sebaliknya, sistem yang dipandang tidak sah akan mengandung benih-benih ketidakstabilan.

Hubungan antara pandangan ketidakstabilan dan ketidakabsahan sistem (pihak-pihak) yang berbeda inilah yang dapat menjadi bumbu yang ampuh terjadinya peralihan dari penerimaan kelompok minoritas terhadap status quo ke penolakannya. Akibatnya, kelompok-kelompok itu menempatkan pentingnya pandangan keabsahan dalam lingkungan sosialnya. Legitimasi (keabsahan) merupakan konsep yang penting bagi kelompok-kelompok yang terlibat konflik karena memandang negara tidak sah. Seperti pengamatan Tajfel:

Pandangan ketidakabsahan (*perceived illegitimacy*) hubungan antarkelompok secara sosiologis dan psikologis adalah diterima dan dapat diterimanya pengungkit (*lever*) untuk tindakan dan

perubahan sosial dalam perilaku antarkelompok (*intergroup behavior*)... Dalam hal kelompok yang "inferior", fungsi pengungkit/pengaruh (*leverage*) terpenuhi dengan pandangan ketidaksaan hasil-hasil perbandingan antarkelompok; dalam hal kelompok-kelompok "inferior" yang sedang menuju perubahan, *leverage*-nya adalah keabsahan (legitimasi) citra perbandingannya yang baru (*new comparative image*); dalam hal kelompok-kelompok yang "superior" "*leverage*"-nya adalah keabsahan usaha-usaha untuk memelihara status quo perbedaan nilai manakala perbedaan nilai ini dipandang terancam.

b. *Konflik Bernuansa Etnik dan Agama*

Dalam teori makro terdapat seperangkat konsep yang dapat diambil dari studi konflik etnis. Di sinilah letak pentingnya memahami konflik etnonasional karena konsep yang sama dapat diterapkan pada konflik sektarian.

Apakah konflik itu didefinisikan dalam istilah-istilah etnis atau sektarian, tidak banyak perbedaannya secara teoretis karena konsepsi-konsepsi untuk konflik etnis dan sektarian beroperasi dengan cara yang sama. Hal yang penting adalah kelompok orang-orang ini telah menggolongkan diri sebagai kelompok-kelompok yang berbeda dan memandang satu sama lain sebagai *luar kelompok* atau *musuh*. Untuk itu, konflik etnis dari Donald Horowitz (1985: 5) tentang konflik etnis di negara-negara sedang berkembang, menguraikan kerangka tempat konflik etnis itu terjadi, antara lain sebagai berikut.

- 1) Sistem negara yang mulanya muncul dari feodalisme Eropa dan sekarang, dalam periode pascakolonial, meliputi seluruh dunia memberikan kerangka tempat konflik etnis itu terjadi. Penguasaan negara itu, penguasaan suatu negara dan pembebasan dari penguasaan oleh kelompok-kelompok lain merupakan tujuan konflik etnis.
- 2) Akibatnya, salah satu tujuan utama konflik etnis adalah berusaha menguasai negara tersebut. Kelompok-kelompok itu berusaha menguasai negara agar dapat menjamin terpenuhi

kebutuhannya, biasanya dengan merugikan/merusak kelompok-kelompok pesaingnya.

- 3) Konflik atas penguasaan negara ini sering dipandang sebagai *zero sum conflict* (konflik habis-habisan).

Maksudnya, kemenangan satu kelompok berarti kekalahan kelompok yang lain: konflik ini bukan “sama-sama menang” (win-win) untuk kedua kelompok itu. Menurut Horowitz (1985: 8), antara lain sebagai berikut.

- 1) Dalam masyarakat yang sangat terpecah-pecah, persoalan etnis merasuk ke dalam banyak sekali masalah: rencana pembangunan, kontroversi pendidikan, masalah perdagangan, kebijakan pertanahan, kebijaksanaan ekonomi, dan perpajakan.
- 2) Secara khusus, hal-hal yang di tempat lain akan ditempatkan ke dalam kategori administrasi rutin menduduki tempat utama dalam agenda politik masyarakat yang terpecah secara etnis.

Horowitz (1985: 30) membedakan sistem yang beranking dan sistem yang tidak beranking.

- 1) Sistem yang beranking adalah masyarakat yang satu kelompok etnis berkuasa penuh terhadap kelompok lain.
- 2) Sistem yang tidak beranking terdiri atas dua kelompok etnis dengan stratifikasi internalnya, yaitu elite dan massa.
- 3) Perpindahan (migrasi) dan penaklukan yang tidak sepenuhnya (*incomplete conquest*) juga menimbulkan berbagai jenis keluhan sejarah (*histories*) yang tidak kunjung hilang.
- 4) Sekelompok pribumi yang dijajah dan terpaksa membiarkan masuknya etnis asing untuk tujuan-tujuan ekonomi penjajah belakangan mungkin menganggap keberadaannya sebagai (*illegitimate*) *ab initio* yang tidak sah.

Horowitz (1985: 31) menguraikan akibat-akibat konflik, antara lain sebagai berikut.

- 1) Ketika kekerasan etnis terjadi, kelompok yang tidak beranking biasanya tidak bertujuan terjadinya transformasi sosial, tetapi bertujuan mendekati otonomi kekuasaan dengan mengucilkan kelompok etnis yang sejajar/serupa dari pembagian kekuasaan (*a share of power*).
- 2) Pengembalian dengan pengusiran atau pembasmian pada *status quo ante* (sebelum status quo) yang diperlakukan homogen secara etnis.

c. *Karakteristik Konflik*

Berdasarkan segi bentuk dan karakteristiknya, konflik antaragama dan antaretnis dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.

1) **Konflik Laten**

Konflik laten adalah konflik yang cenderung tertutup dan sifatnya mengakar dalam masyarakat. Konflik jenis ini belum mewujudkan dalam bentuk tindakan kekerasan sehingga dapat lebih cepat diselesaikan. Konflik laten berupa anggapan negatif, kecurigaan, dan isu-isu tertentu tentang agama atau isu lain. Di antara isu-isu yang sering muncul berkaitan dengan konflik antaragama dan antaretnis, yaitu isu tentang:

- a) Kristenisasi atau Islamisasi;
- b) penduduk asli dengan pendatang;
- c) sekte-sekte agama tertentu;
- d) simbol-simbol agama (kitab suci, tempat ibadah, dan sebagainya);
- e) pribumi dengan nonpribumi.

2) **Konflik Terbuka**

Konflik terbuka adalah konflik yang sudah muncul ke permukaan, baik berupa perilaku, sikap, maupun tindakan-tindakan tertentu. Konflik jenis ini melibatkan dua belah pihak atau lebih

yang kadang-kadang berhadapan secara langsung dan memunculkan tindakan kekerasan, baik fisik maupun nonfisik sehingga tidak mudah untuk diselesaikan.

Konflik terbuka yang berkaitan dengan antaragama dan antaretnis dapat muncul dalam bentuk sebagai berikut.

- a) Khotbah atau ceramah yang menghujat dan anti terhadap agama/etnis lain (perang mimbar), seperti khotbah Minggu atau khotbah Jumat yang menyudutkan dan menyalahkan agama lain.
- b) Selebaran, brosur, spanduk, dan berita di media cetak ataupun elektronik yang bernuansa provokatif.
- c) Tindakan yang merusak simbol agama/budaya tertentu, seperti pelemparan dan perusakan gereja dan masjid, perusakan kitab suci, pencemaran hostia, perusakan rumah-rumah adat, tempat-tempat pemujaan, dan sebagainya.
- d) Tindakan kekerasan lainnya berupa intimidasi, perkelahian, penganiayaan, sampai pembunuhan yang melibatkan penganut agama atau etnis yang berbeda.

Setiap bentuk konflik memiliki ciri dan karakteristik tertentu (khas/unik) yang sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budayanya. Oleh sebab itu, pendekatan dan cara penyelesaiannya pun akan berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah lainnya.

d. Aktor yang Terlibat dalam Konflik

Dilihat dari sisi aktor yang terlibat, konflik dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.

1) Aktor Intelektual

Aktor Intelektual, yaitu pihak-pihak yang tidak langsung terlibat dalam konflik, tetapi dipahami sebagai orang yang bertanggung jawab secara signifikan terhadap munculnya konflik, bahkan mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut.

Berdasarkan beberapa kasus konflik antaragama dan antaretnis yang pernah terjadi di Indonesia, aktor intelektual yang terlibat, yaitu:

- a) tokoh-tokoh agama;
- b) tokoh-tokoh adat;
- c) tokoh-tokoh masyarakat;
- d) orang-orang partai, baik di tingkat lokal maupun tingkat pusat;
- e) para birokrat, baik di tingkat lokal maupun tingkat pusat;
- f) kalangan militer (polisi dan tentara);
- g) usahawan;
- h) organisasi nonpemerintah (ornop).

2) **Aktor Lapangan**

Aktor lapangan, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam konflik. Aktor-aktor lapangan yang terlibat langsung dalam konflik antaragama dan antaretnis, yaitu:

- a) umat (beragama);
- b) remaja;
- c) ibu-ibu;
- d) milisia;
- e) preman;
- f) pemuda.

Aktor lapangan ini sekaligus menjadi korban dalam setiap konflik antaragama/antaretnis. Dari sekian banyak korban, yang menjadi korban utama adalah kelompok perempuan, anak-anak, dan remaja.

e. *Kelompok Bentuk Konflik Sosial*

Keberagaman merupakan peristiwa dari wujud konflik sosial yang dapat diklasifikasikan dalam enam kelompok bentuk konflik sosial, antara lain sebagai berikut.

- 1) Konflik pribadi, yaitu pertentangan yang terjadi secara individual yang melibatkan dua orang yang bertikai. Misalnya, pertentangan yang terjadi antardua teman, perselisihan suami dengan istri, serta pertentangan antara pimpinan dan salah seorang stafnya.
- 2) Konflik kelompok, yaitu konflik yang terjadi karena adanya pertentangan antara dua kelompok dalam masyarakat. Misalnya, pertentangan antara dua perusahaan yang memproduksi barang sejenis dalam memperebutkan daerah pemasaran, dan pertentangan antara dua kesebelasan olahraga.
- 3) Konflik antarkelas sosial; konflik ini dapat terjadi pada status sosial berbeda, yang dapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau perbedaan pandangan. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan bentuk konflik ini, seperti pertentangan antara majikan dan buruh, pertentangan antara orang kaya dan orang miskin, dan pertentangan antara petani dan tuan tanah.
- 4) Konflik rasial; ras, yaitu sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri badaniah yang sama dan berbeda dengan kelompok lainnya. Ciri-ciri tersebut dapat terlihat dari bentuk tubuh, warna kulit, corak rambut, bentuk wajah, dan lain-lain, yang bersifat kasat mata, sehingga mudah dibedakan dengan kelompok lain. Konflik rasial adalah pertikaian yang terjadi karena didasarkan perbedaan pandangan terhadap perbedaan ciri-ciri jasmaniah.
- 5) Konflik politik. Politik merupakan salah satu aspek dalam sistem sosial yang menyangkut masalah kekuasaan, wewenang, dan pemerintahan. Konflik politik, yaitu pertentangan yang terjadi dalam masyarakat karena perbedaan pendapat atau ideologi yang dianut oleh masing-masing kelompok. Misalnya, pertikaian antara kaum penjajah dan pribumi, pertentangan

antardua partai politik, serta pertentangan antara pemerintah dan rakyat.

- 6) Konflik budaya. Budaya berkaitan erat dengan kebiasaan atau adat istiadat yang dianut oleh anggota masyarakat. Konflik budaya, yaitu pertentangan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh adanya perbedaan budaya. Bentuk konflik ini terjadi pada penduduk yang pluralistik dengan latar belakang budaya yang berbeda sehingga dapat menimbulkan pertentangan antara budaya yang satu dan lainnya. Selain itu, dapat pula terjadi pertentangan antara budaya daerah dan budaya yang berasal dari luar atau pertentangan budaya Barat dan Timur.

Selain berdasarkan bentuknya, konflik sosial dapat dikelompokkan dalam tiga kategori berdasarkan tingkatannya, yaitu sebagai berikut.

1) Konflik tingkat rendah

Konflik tingkat rendah merupakan konflik yang tidak rasional, bertujuan untuk membinasakan lawan secara langsung dengan menggunakan kekerasan. Konflik ini bersifat emosional yang dapat terjadi pada setiap individu atau kelompok. Misalnya, perkelahian antardua gang atau perkelahian antarpelajar.

2) Konflik tingkat menengah

Pada tingkat ini, konflik yang terjadi merupakan pertentangan yang menggunakan strategi dengan tujuan untuk mengalahkan lawan. Strategi yang digunakan mungkin dengan cara kekerasan yang menggunakan pihak lain, memaksakan kehendak, atau memberikan pengaruh. Misalnya, seorang calon kepala desa menggunakan *money politic* untuk mengalahkan lawannya.

3) Konflik tingkat tinggi

Konflik ini merupakan konflik yang positif karena pertentangan yang terjadi berlangsung secara lebih rasional berdasarkan pandangan yang berbeda, tetapi memiliki dasar pemikiran atau argumen yang

jelas. Konflik ini terjadi pada debat pendapat atau dalam rangka mencari solusi untuk suatu masalah sehingga tujuan utamanya adalah menemukan kesamaan pendapat atau memecahkannya masalah.

Pihak yang terlibat konflik tidak memperpanjang pertentangannya, baik yang pendapatnya diterima maupun ditolak, saat berakhirnya forum maka berakhir pula konflik tersebut.

C. Konsep, Indikator, dan Fase Terjadinya Konflik

1. Teori-teori Konflik

Tinjauan teori konflik akan mengetengahkan sejumlah pengamatan mengenai adanya literatur yang ditulis tentang sifat dan teori konflik, terutama yang berhubungan dengan peperangan. Terdapat kurangnya kesepakatan (*consensus*) antara pandangan kontemporer dan historis mengenai konflik manusia, dana di antara literatur yang sangat erat kaitannya (relevan) dengan para ahli teori ilmu politik, ada beberapa dikotomi yang mengarah ke pencarian paradigma yang dominan.

Dikotomi berkenaan dengan sifat konflik. Dougherty dan Pfaltzgraff (1981: 187) menjelaskan masalah itu, "Para ilmuwan sosial terbagi dalam persoalan apakah konflik sosial harus dipandang sebagai sesuatu yang rasional, konstruktif, dan berfungsi secara sosial, atau sesuatu yang irasional, patologis, dan tidak berfungsi secara sosial."

Hal ini menimbulkan akibat yang penting, terutama untuk resolusi konflik. Selain itu, juga ada polaritas yang nyata dalam pendekatan teoretisnya. Ada dua pendekatan yang berlawanan, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan behavioris.

Pendekatan klasik memusatkan diri pada analisis tataran makro. Perhatiannya tertumpu pada analisis interaksi antarkelompok. Kelompok-kelompok ini dapat dibagi dalam berbagai sempalan berdasar, antara lain nasional, institusional, etnis, kelas, dan ideologis. Ahli teori klasik menaruh perhatian pada interaksi antarkelompok pada tataran sadar (*conscious level*). Adapun kaum behavioris memusatkan diri pada tataran mikro, dengan individu, bukan kelompok, sebagai unit kajiannya.

Kaum behavioris mengkaji faktor ketidaksadaran (*the unconscious*) untuk memahami faktor-faktor motif yang tidak terungkap. Untuk hal itu, Dougherty dan Pfaltzgraff (1981: 37) menggambarkan metode penelitian yang lain. Kaum behavioris lebih menyukai mengisolasi sedikit variabel dan menganalisis banyak kasus untuk menentukan hubungan antarvariabel. Sebaliknya, kaum tradisional (klasik) lebih sering mengkaji semua variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap hasil (*outcome*) sebuah kasus.

Teori konflik yang dikemukakan Ralf Dahrendorf (1973: 101) menyatakan bahwa dalam suatu perubahan pada hakikatnya masyarakat memiliki dua sisi, yaitu konflik di satu pihak dan stabilitas, harmoni, serta konsensus di pihak lain. Dalam upaya menjelaskan pandangannya, Dahrendorf mengusulkan model konflik yang dikaitkan dengan kekuasaan. Model ini berguna untuk kepentingan analisis dan menjelaskan hasil yang diperoleh di lapangan.

Pada bagian lain tulisannya, Dahrendorf (1973: 102) menyatakan bahwa konflik sosial tidak kalah kompleks dibandingkan dengan integrasi sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang konflik sepatutnya dikaitkan dengan proses-proses sosial yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, konflik yang terjadi dapat disebabkan oleh sistem dalam struktur sosial tertentu. Dengan kata lain, konflik yang timbul berkaitan erat dengan sejumlah kedudukan sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, teori fungsional tentang perubahan yang dikemukakan Talcot Parson (1949) dapat digunakan pula untuk melihat keterkaitan konflik dengan fungsi kedudukan sosial yang berlaku dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut.

- a. Parsons menginginkan agar keseimbangan selalu terjaga, antara lain dengan mengeliminasi berbagai sumber konflik.
- b. Parsons mendasarkan pandangannya pada konsep stabilitas atau ekuilibrium yang dianggap sebagai ciri utama suatu struktur. Pengertian struktur perlu dibedakan dengan ciri suatu sistem. Istilah struktur mengandung pengertian keseimbangan yang stabil dalam arti kata statis (*static*), tetapi bergerak (*moving*).

- c. Parsons berpandangan bahwa pada hakikatnya sistem berada dalam keadaan stabil atau relatif seimbang ketika berlangsung hubungan antarstruktur dan berbagai proses di dalamnya. Pada masa berlangsung hubungan antarsistem dengan lingkungannya, sistem cenderung menjaga sifat-sifat yang menyeimbangkan. Keadaan (hubungan) inilah yang disebut struktur karena secara relatif tidak berubah.

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan hal yang wajar dan biasa karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda. Ketika kepentingan antara satu individu dan individu lain ataupun kepentingan kelompok dengan kelompok lain berbenturan, terjadilah konflik.

Pada dasarnya munculnya konflik tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat karena konflik adalah fenomena yang tidak dapat dihilangkan dalam suatu interaksi sosial. Hal tersebut terjadi karena hal-hal berikut.

- a. Samuel P. Huntington (1993) menyebutkan bahwa terjadinya berbagai konflik sosial dan etnis di berbagai belahan dunia disebabkan oleh perbedaan kebudayaan yang semakin nyata.
- b. Berbagai konflik sosial yang telah menimbulkan keterpurukan di negeri ini disebabkan oleh kurangnya kemauan untuk menerima dan menghargai perbedaan, ide dan pendapat orang lain, karya dan jerih payah orang lain, melindungi yang lemah dan tidak berdaya, menyayangi sesama, kurangnya kesetiakawanan sosial, dan tumbuhnya sikap egois serta kurang perasaan atau kepekaan sosial (Al-Qadrie, 2005).
- c. Konflik-konflik kedaerahan sering terjadi seiring dengan ketiadaan pemahaman akan keberagaman atau multikultur. Untuk mencegah atau meminimalkan konflik tersebut, perlu dikembangkan pendidikan multikulturalisme (Rahman, 2005).

Konflik hanya dapat dikendalikan dan diminimalisasi sehingga konflik yang timbul tidak sampai stadium lanjut yang mengancam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini integrasi selalu menjadi harapan dan dambaan untuk meminimalisasi permasalahan yang timbul akibat konflik sosial.

Setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan sosial (*social change*). Setiap elemen masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya perubahan sosial yang sering menimbulkan pertentangan atau konflik antarmasyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan disharmonisasi yang berakibat pada instabilitas.

Konflik terjadi akibat adanya perbedaan sosiokultural, politik, ekonomi, dan ideologi di antara berbagai komunitas masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari hakikat keberadaan manusia dalam kehidupan kolektif. Konflik yang terjadi bukan hanya antarmasyarakat (konflik horizontal), melainkan juga dapat terjadi antara masyarakat dan pemerintah (konflik vertikal). Konflik sosial secara horizontal dan vertikal yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia berakar pada sejumlah faktor struktural. Kecemburuan sosial yang muncul akibat adanya gap sosial dan ekonomi pada berbagai kelompok masyarakat merupakan sumber utama konflik.

Pada hakikatnya konflik pasti terjadi, berkonotasi negatif, hasil akhir bergantung pada manajemennya, dan perlu dikenali. Munculnya konflik biasanya diisyaratkan oleh adanya komentar emosional, serangan gagasan yang apriori, saling tuduh, dan saling serang pada pribadi.

Penanganannya dapat dilakukan dengan cara konfrontasi agresif, manufer negatif, penundaan terus-menerus, dan bertempur secara pasif.

Bedasarkan pemahaman di atas, teori konflik dapat dikategorikan pada dua teori konflik yang bersifat makro dan teori kelompok mikro.

a. *Teori Konflik Makro*

Teori makro memusatkan perhatian pada interaksi kelompok, terutama pada tataran sadar. Para ahli teori politik awal, dari Thucydides dan Sun Tsu sampai Machiavelli dan Von Clausewitz telah memilih satu unsur tertentu sebagai pusat perhatian: kekuasaan.

Memakai dan menjalankan kekuasaan adalah konsep utama teori konflik makro. Para ahli teori makro sependapat bahwa kekuasaan itu datang dalam berbagai bentuk: ekonomi, politik, militer, bahkan budaya. Asumsi umum makro atau teori klasik adalah akar konflik berasal dari persaingan kelompok dan pengejaran kekuasaan serta sumber-sumber. Asumsi-asumsi ini beroperasi pada faktor-faktor motivasi sadar di lingkungan yang berorientasi materiel.

Teori klasik menggunakan pengamatan fenomena kelompok pada suatu peristiwa untuk mempelajari masalahnya secara mendalam dan menentukan pentingnya dan hubungan banyak variabel daripada hanya menggunakan sedikit variabel untuk banyak kasus. Metodologi utama yang digunakan adalah pendekatan historis atau studi kasus.

Pada abad kesembilan, Eropa pasca-Napoleon umumnya konsern dengan perimbangan kekuasaan (*balance of power*). Konsep ini dipergunakan oleh Matternich pada Konser Eropa. Pada saat meletusnya Perang Dunia I umumnya menghancurkan teori ini, asumsi-asumsinya digunakan dalam teori pencegahan (*deterrence theory*) Perang Dingin. Teori pencegahan berdasar pada asumsi bahwa perimbangan teror (*balance of terror*) karena arsenal nuklir negara-negara adikuasa akan mencegah konflik.

Teori pencegahan membuka jalan bagi teori-teori yang lebih canggih, seperti teori pengambilan keputusan (*decision making theory*) dan teori permainan (*game theory*).

Teori pengambilan keputusan dan teori permainan berasal dari model aktor/pelaku rasional abad kedua puluh. Model aktor/pelaku rasional dikembangkan oleh para ahli ekonomi untuk menjelaskan perilaku ekonomi manusia.

Teori ini beranggapan bahwa masyarakat membuat pilihan dan keputusan secara rasional berdasarkan informasi tentang pilihan itu dan pertimbangan kesempatan (Downs, 1957). Teori permainan berdasar pada model aktor/pelaku rasional dalam hal mengandalkan pada asumsi proses pengambilan keputusan yang rasional bagi keikutsertaan dalam konflik manusia.

Thomas Schelling (1960) mengembangkan model ini lebih jauh dengan menciptakan teori permainan yang canggih. Model permainan Schelling meliputi komunikasi, negosiasi, informasi, dan memperkenalkan pentingnya irasionalitas dalam pemikiran strategis. Salah satu sumbangsih Schelling yang paling penting adalah hipotesisnya mengenai saling kebergantungan (*interdependency*) konflik, kompetisi (persaingan), dan kooperasi (kerja sama) di antara para pelakunya.

Dalam setiap peristiwa konflik ada unsur-unsur kerja sama (kooperasi); keterlibatan kerja sama (*cooperative engagements*) sering melahirkan unsur konflik. Pandangan ini menjadi unsur penting dalam pemahaman konflik.

- 1) Schelling menggunakan teori permainan sebagai usaha untuk memecah (menyederhanakan) kompleksitas hubungan antarkelompok dengan menggunakan permainan untuk menggambarkan situasi-situasi yang serupa.
- 2) Schelling menggunakan tiga jenis permainan: kesempatan (*chance*), kecakapan (*skill*), dan strategi (*strategic*) untuk menggambarkan akibat-akibat wajar dari hubungan antarbangsa (internasional), baik bersifat kerja sama (*cooperative*) maupun konflik (*conflictual*).

b. Teori Konflik Mikro

Di antara asumsi-asumsi kaum behavioris yang paling penting adalah keyakinan bahwa akar penyebab perang terletak pada sifat dan perilaku manusia; dan keyakinan bahwa ada hubungan yang erat/penting antara konflik intrapersonal dan konflik yang merambah tata sosial eksternal.

Kaum behavioris meyakini peran sentral hipotesis stimulus-respons. Penganut aliran ini berusaha mengukuhkan bahwa manusia memiliki karakteristik biologis atau psikologis yang akan cenderung ke arah agresi atau konflik. Kaum behavioris juga berusaha menyelidiki hubungan antara individu dan keberadaannya di lingkungannya. Mereka ingin memperhitungkan kemungkinan, dengan cara berpikir induktif, variabel-variabel khusus mengenai

BAB 2

MANUSIA DAN PENDIDIKAN

Hakikat manusia dipandang dari sisi penciptaannya adalah makhluk yang sempurna karena dibekali dengan akal. Dengan bekal akal, manusia akan selalu berpikir tentang kelangsungan hidup dan generasinya. Dengan akal, manusia selalu berupaya untuk menemukan berbagai cara untuk *survive*, baik bagi dirinya maupun keturunan atau generasinya. Dengan akal pula manusia dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, baik fisik maupun nonfisik yang berlangsung secara alami.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, pendidikan dilaksanakan secara lebih sistematis dan terorganisasi dalam bentuk pendidikan formal ataupun nonformal. Dalam konteks ini manusia pada dasarnya dapat sebagai subjek sekaligus objek pendidikan. Sebagai subjek pendidikan, manusia berperan aktif dalam proses dan pelaksanaannya. Manusia juga bertanggung jawab sebagai perencana, pengelola sekaligus pihak yang harus mengevaluasi dan mengawasi proses berlangsungnya pendidikan. Adapun sebagai objek, manusia menjadi sasaran yang harus digarap dan dituju oleh pendidikan.

Memahami hakikat manusia dan pendidikan diibaratkan dua sisi mata uang. Hal itu disebabkan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik pendidikan yang

berlangsung secara alami oleh orang tua maupun masyarakat terlebih pendidikan tersistemkan diselenggarakan oleh sekolah. Modal dasar untuk didik, manusia memiliki beberapa potensi yang ada pada dirinya, yaitu potensi intelektual, rasa, karsa, karya, dan religi yang dapat dan akan ditumbuhkembangkan melalui proses pendidikan yang baik dan terarah. Hal tersebut merupakan hakikat pendidikan secara umum.

A. Konsep Manusia

1. Pandangan Filosofis tentang Manusia

Pertanyaan filosofis tentang sosok manusia adalah "*What is man, and what of is man made?*" (Apa dan terbuat dari apa manusia itu?). Untuk menjawab pertanyaan tersebut, banyak filsuf dengan pandangan filsafatnya yang memberikan batasan atau definisi tentang manusia.

Sigmund Freud (Muhammad, 1986) berpandangan bahwa hakikat manusia sebenarnya bisa ditinjau dari struktur jiwa yang dimiliki yang terdiri atas tiga hal, yaitu *das Es*, *das Ich*, dan *das Uber Ich*.

- a. *Das Es* bagian dasar (*the Id*), terisolasi dari dunia luar, hanya mementingkan masalah kesenangan dan kepuasan (*lust principle*), yang merupakan sumber nafsu kehidupan, yaitu hasrat-hasrat biologis (*libido-sexualis*), bersifat asadar, amoral, asosial, dan egoistis.
- b. *Das Ich* (aku = ego), sifatnya lebih baik daripada *das Es*. *Das Ich* dapat mengerti dunia asadar, asosial, dan amoral, lebih realistik, tetapi belum etis.
- c. *Das Uber Ich* (superego), yaitu bagian jiwa yang paling tinggi, paling sadar norma, dan paling luhur. Bagian ini sering dinamakan budinurani (*consciencia*). Superego atau *das Uber Ich* selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan religius.

Selain itu, dalam perkembangannya (Muhammad, 1986), terdapat perbedaan paham, antara lain sebagai berikut.

- a. Paham monoisme atau paham materialisme memandang manusia hanya dari segi materi. Manusia tidak berbeda dengan alam semesta yang serba materi. Manusia adalah yang tampak sebagai wujudnya.
- b. Paham idealisme yang sering juga disebut dengan paham rasionalisme atau spiritualisme memandang manusia dari aspek mentalnya, jasmani atau tubuh hanya merupakan alat jiwa untuk melaksanakan tujuan, keinginan dan dorongan jiwa (rohani, spirit, dan rasio) manusia.
- c. Paham dualisme atau realisme yang melihat realita sebagai sintesis dua kategori *animate* dan *inanimate*, makhluk hidup dan makhluk mati. Dalam perkembangannya manusia menurut paham ini, bahwa:
 - 1) manusia adalah kesatuan antara rohani dan jasmani, jiwa dan raga;
 - 2) manusia adalah satu totalitas, sebagai satu individu dengan kepribadian yang unik, baik sebagai umat manusia keseluruhan maupun sebagai satu pribadi;
 - 3) paham ini mengakui adanya potensi hereditas di samping realita lingkungan sebagai faktor luar.

2. *Pandangan Ahli Biologi tentang Manusia*

Para ahli biologi menyebut manusia adalah hewan yang berakal budi. Hal ini disebabkan dalam dunia hewan, manusia digolongkan *metazoa* dengan *phylum chordata*, *subphylum*-nya *vertebrata* termasuk dalam kelas *mammalia* yang *orde*-nya *primata*, *subordo antropoidea*, keluarga dari *homonidae* dengan *genus homo* termasuk *spesies sapiens*. Wacana seperti ini yang kemudian melahirkan pengertian bahwa manusia adalah makhluk biologis.

a. *Manusia disebut Makhluk Biologis*

Manusia disebut makhluk biologis karena memiliki tanda-tanda yang sama dengan makhluk primata lainnya, yaitu:

- 1) sebagian primata hidup di atas pohon, hanya baboon dan manusia yang hidup di atas tanah;

- 2) anggota badannya mudah digerakkan, terutama yang berusia muda;
- 3) jari-jari primata dapat memegang benda kasar ataupun halus, mencengkeram, meraih, dan fungsi lainnya;
- 4) penglihatan primata lebih tajam, tetapi penciumannya lebih buruk dari mamalia lainnya;
- 5) volume otak primata relatif lebih besar daripada mamalia lainnya.

b. *Manusia sebagai Makhluk Biologis*

Manusia sebagai makhluk biologis, sesuai dengan sifat dan kemampuannya diberi berbagai macam sebutan.

- 1) Manusia disebut *homo sapiens*, yaitu dikategorikan sebagai bagian dari *zoology* (ilmu hewan) yang dapat menggunakan sifat dan kemampuan berpikir secara bijaksana sehingga manusia juga disebut sebagai makhluk rasional.
- 2) Manusia disebut *homo faber* karena manusia mampu menggunakan sifat dan kemampuannya untuk membuat dan mempergunakan alat.
- 3) Manusia disebut *homo loquens*, yaitu makhluk yang dapat berbicara dan berkomunikasi sosial.
- 4) Manusia disebut *homo socialis* karena sifat dan kemampuannya untuk berkelompok (bermasyarakat).
- 5) Manusia disebut *homo economicus* karena menggunakan sifat dan kemampuannya untuk mengorganisasi pemenuhan kebutuhan hidupnya.
- 6) Manusia disebut *homo religiousus* karena memiliki sifat dan kemampuan untuk berpikir dan menyadari adanya kekuatan supranatural (Tuhan Yang Maha Segalanya).
- 7) Manusia disebut *homo delegans* karena sifat dan kemampuannya untuk mendelegasikan pekerjaan kepada yang lain dan menyadari keterbatasannya.

- 8) Manusia disebut *homo legatus* karena sifat dan kemampuannya untuk mewariskan kebudayaannya kepada generasi berikutnya.
- 9) Manusia disebut *artis creator* karena sifat dan kemampuannya untuk menciptakan keindahan (estetika).

Oleh karena itu, manusia memiliki berbagai macam sebutan yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk multidimensional.

3. *Pandangan Ahli Sosiologi tentang Manusia*

a. *Manusia sebagai Makhluk Individu*

Kata "individu" dalam bahasa Prancis berarti orang seorang. Kata ini mengacu pada manusia atau satu orang manusia. *In-dividere* berarti makhluk individual yang tidak dapat dibagi-bagikan (W.A. Gerungan, t.t.: 26).

Kata sifatnya "individual" (bahasa Prancis), menunjuk pada satu orang yang sekaligus untuk membedakan dengan masyarakat dan dimaksudkan ciri-ciri khas yang melekat pada satu orang tersebut. Setiap individu memiliki ciri khas yang telah *built-in* dalam dirinya. Ciri-ciri watak seorang individu yang konsisten, yang memberikan kepadanya identitas yang khusus, disebut sebagai "kepribadian" (Koentjaraningrat, 1980: 116).

Menurut G.W. Allport (Nursid Sumaatmadja, 2006), kepribadian adalah organisasi dinamis sistem psikofisik yang ada pada suatu individu, yang menentukan karakteristik tingkah laku dan berpikirnya.

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Theodore M. Newcomb (Surjono Sukanto, 1990: 203), kepribadian merupakan organisasi sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku.

Manusia disebut makhluk individu karena manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara anggota tubuhnya yang satu dan yang lain. Kata individu berasal dari bahasa Latin, yaitu *individuum*, artinya yang tidak terbagi, entitas yang terkecil.

Pemahaman ilmu sosial-budaya menunjuk pada tabiat kehidupan jiwa manusia yang majemuk dengan peranannya dalam kehidupan sosial-budaya manusia.

Diferensiasi sosial melekat dan berkaitan dengan dunia sosial-budaya manusia. Pemberian identitas sosial kepada orang lain menjadi contoh konkret diferensiasi sosial yang melekat pada manusia, sedangkan seorang siswa yang paling (maha) dibandingkan dengan siswa lainnya adalah contoh konkret dari diferensiasi sosial yang berkaitan dengan dunia sosial-budaya.

Ernst Cassirer (1944) memberikan pandangannya tentang manusia dan mencoba menggambarkan dalam satu istilah *animal symbolicu*. Dengan istilah ini, Cassirer merangkum semua sebutan untuk manusia yang diuraikan di muka sekalipun istilah itu masih tidak mampu menghadirkan gambaran manusia secara utuh.

Setiap individu merupakan pribadi yang unik, berbeda antara yang satu dan yang lain. Oleh karena itu, kepribadian setiap individu pun berbeda.

Kepribadian individu sangat bergantung pada beberapa faktor berikut.

1) Pengetahuan

Pengetahuan adalah unsur-unsur yang mengisi akal dan alam jiwa seseorang manusia yang sadar, secara nyata terkandung dalam otaknya.

Dalam lingkungan individu itu ada bermacam-macam hal yang dialaminya melalui penerimaan pancaindranya dan alat penerima atau reseptor organismenya yang lain, sebagai getaran eter (cahaya dan warna), getaran autistik (suara), bau, rasa, sentuhan, tekanan mekanikal (berat-ringan), tekanan termikal (panas-dingin), dan sebagainya yang masuk ke dalam sel-sel tertentu di bagian-bagian tertentu dari otak.

Seluruh proses akal manusia yang sadar (*conscious*) dalam ilmu psikologi disebut persepsi. Sementara itu, penggambaran baru dengan banyak pengertian tentang keadaan lingkungannya disebut apersepsi. Penggambaran yang lebih intensif terfokus, yang terjadi karena pemusatan akal yang lebih intensif disebut pengamatan.

Adapun penggambaran abstrak tentang sesuatu berdasarkan penggabungan dan perbandingan dengan penggambaran lain yang sejenis berdasarkan asas-asas tertentu secara konsisten disebut konsep. Sebaliknya, ada pula penggambaran baru yang kadang-kadang juga tidak realistis disebut fantasi.

Seluruh penggambaran, persepsi, apersepsi, pengamatan, konsep, dan fantasi merupakan unsur-unsur pengetahuan seorang individu yang sadar. Selain itu, banyak pengetahuan atau bagian dari himpunan pengetahuan yang ditimbun oleh seorang individu selama hidupnya sering hilang dari alam akalnya yang sadar atau dalam kesadarannya dengan berbagai sebab, disebut alam bawah sadar (*subconscious*). Ada pula pengetahuan individu yang saling baur dan tercampur disebut alam tidak sadar (*unconscious*).

2) Alam kesadaran

Alam kesadaran manusia juga mengandung berbagai macam perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif atau negatif.

Suatu perasaan selalu bersifat subjektif karena adanya unsur penilaian yang menimbulkan suatu kehendak dalam kesadaran seorang individu. Kehendak itu bisa bersifat positif, artinya individu tersebut ingin mendapatkan hal yang dirasanya sebagai suatu hal yang akan memberikan kenikmatan, keuntungan, kebahagiaan kepadanya, atau bisa juga negatif, artinya ada upaya untuk menghindari, menjauh, tidak senang, merasa tidak enak, dan sebagainya dari hal yang dirasanya sebagai hal yang akan membawa perasaan tidak nikmat padanya.

Suatu kehendak keras untuk mendapatkan sesuatu dinamakan keinginan. Perasaan dan upaya keras untuk mendapatkan sesuatu disebut emosi.

3) Setiap individu memiliki dorongan naluri

Dengan pengetahuan dan perasaannya, dorongan naluri harus dikelola agar antara yang satu dan yang lain menyadari bahwa manusia sama dan sederajat (apalagi di hadapan Sang Pencipta).

Dalam proses mengelola dorongan naluri inilah nilai-nilai sosial tentang cinta-kasih (bahkan diajarkan oleh Tuhan melalui nabi-nabi-Nya), tanggung jawab, pengabdian, keadilan, pandangan hidup, keindahan, penderitaan, kegelisahan, dan harapan bermunculan dalam berbagai versi sangat bergantung pada kepribadian setiap individu.

b. Manusia sebagai Makhluk Kultural

Manusia disebut pula sebagai makhluk kultural. Manusia merupakan kelompok makhluk yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi dalam proses evolusi sehingga memiliki kedudukan yang khusus dalam ekosistem alam sekitarnya.

Perbedaan yang utama bahwa manusia dikaruniai Tuhan selain kecerdasan dan akal, yaitu sebagai berikut.

- 1) Akal inilah yang membedakan secara mutlak manusia dengan binatang.
- 2) Manusia dengan akalnya dapat berusaha membantu tubuhnya menghadapi berbagai keadaan, berbagai tempat dan cara hidup sehingga lebih luas dalam menyesuaikan diri dengan alam sekitar tempatnya hidup.
- 3) Dengan akal manusia membuat alat-alat yang dapat digunakan untuk melengkapi dirinya dalam keadaan tertentu.
- 4) Dengan kecerdasan otaknya manusia dapat membantu tubuhnya dan mempermudah hidupnya.

Hal-hal yang dibuat dan diciptakan pada awalnya terbatas pada benda-benda yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Sebagai kebutuhan untuk makan, alat-alatnya berkaitan dengan upaya mencari makan. Sebagai alat yang digunakan untuk menyambung akal sehingga mengalami kemajuan dan semakin luas bentuk alat-alat tersebut dan kegunaannya.

Hal tersebut akan mempermudah manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya dan menjadi dasar perekonomian di lingkungan sosial dengan kerja yang teratur.

Semua kemampuan manusia itu dilandasi oleh dorongan naluri yang dimilikinya, ditambah dengan kemampuan akal pikirannya. Dorongan naluri yang dimiliki oleh manusia, yaitu:

- 1) dorongan naluri untuk mempertahankan hidup;
- 2) dorongan naluri untuk mencari makan;
- 3) dorongan naluri untuk mencari teman;
- 4) dorongan naluri untuk meniru;
- 5) dorongan naluri untuk seks;
- 6) dorongan naluri untuk mengabdikan;
- 7) dorongan naluri akan keindahan.

Dorongan naluri itu diolah dengan akal pikirannya menghasilkan unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki oleh semua manusia di dunia, yaitu sebagai berikut.

- 1) Keinginan atau hasrat disertai dengan keindahan akan melahirkan kesenian.
- 2) Keinginan atau hasrat mengatur alam sekitar dalam menghadapi tenaga alam yang gaib menimbulkan kepercayaan dan keagamaan.
- 3) Keinginan untuk mengetahui hal yang dihadapinya akan menimbulkan ilmu pengetahuan.

Semua ciptaan manusia merupakan hasil usaha untuk mengubah dan memberikan bentuk serta susunan baru sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohaninya yang dikenal dengan *kebudayaan*. Dengan demikian, manusia memiliki dua bagian yang tidak dapat dilepaskan, yaitu:

- 1) segi kebendaan adalah buatan manusia, artinya perwujudan dari akal yang hasilnya dapat diraba atau nyata;
- 2) segi kerohanian, artinya alam pikiran dan kumpulan perasaan yang tersusun teratur dan tidak dapat diraba hanya dapat dipahami dari keagamaan, kesenian, dan kemasyarakatan.

c. *Manusia sebagai Makhluk Politik*

Manusia disebut juga makhluk politik (*zoon politicon*). Dalam setiap interaksi dengan manusia lain selalu terdapat kepentingan sekalipun kepentingannya itu tersembunyi.

Manusia selalu menginginkan pengakuan akan eksistensinya sehingga akan berdaya upaya agar kepentingannya terpenuhi. Oleh karena itu, manusia akan menggunakan seluruh kemampuan akal pikirannya dalam menyusun strategi untuk memengaruhi manusia lainnya.

Pada ranah ini manusia mulai berpolitik, dengan argumentasi yang disusun dalam pikirannya, manusia menyembunyikan kepentingannya. Paling tidak, manusia yang satu akan memengaruhi manusia lainnya agar memiliki pengikut. Jika sudah demikian, manusia mulai membuat kelompok. Selanjutnya, manusia mengenal dan mengenakan identitas sosialnya agar mudah menandai kawan *the others* (yang bukan kawan), "orang dalam" dan "orang luar".

Walaupun demikian, sering terjadi yang semula kawan berubah menjadi lawan. Hal itu disebabkan oleh hal-hal berikut.

- 1) *Homo homini lupus*, manusia adalah srigala bagi manusia lainnya. Hal itu disebabkan sifat manusia yang dinamis. Pikiran manusia tidak dapat diikat oleh waktu ataupun tempat.
- 2) Manusia adalah makhluk *homo duplex* yang memperlihatkan sifat-sifat yang paradoks (bertentangan). Misalnya:
 - a) Di satu pihak menjadi konsumen produk masyarakat, di pihak lain menjadi produsen produk masyarakat.
 - b) Di satu pihak menjadi pengendali masyarakat (*controler*), di pihak lain menjadi objek yang dikendalikan masyarakat; di satu sisi menjadi pengaman masyarakat, tetapi di pihak lain menjadi perusak masyarakat.
 - c) Pada satu sisi menjadi penegak nilai-nilai sosial, tetapi di sisi lain menjadi pelanggar nilai-nilai sosial.
 - d) Manusia adalah hakim sekaligus terdakwa, bertindak sebagai jaksa dan pada saat yang sama akan bertindak sebagai pembela.

Hakikat manusia sebagai *homo duplex* dapat diungkapkan sebagai makhluk yang dikuasai oleh nafsu hewani di satu pihak dan di pihak lain dikendalikan oleh “semangat malaikat”.

Menurut Zijderveld (1980), sifat manusia seperti itu menunjukkan hal berikut.

- a) Manusia merupakan individu yang unik, baik kehidupannya, cara berpikirnya, emosinya, kesadarannya, maupun segala tingkah laku serta tindakannya. Di pihak yang lain, pada saat yang sama, manusia merupakan anggota dari jenisnya, menjadi makhluk sosial yang diatur oleh norma sosial yang membatasi cara berpikir, pengungkapan perasaan, dan tindakannya sesuai dengan peraturan serta pola masyarakat.
- b) Manusia sebagai individu, bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya, sedangkan sebagai makhluk sosial harus bertindak sesuai dengan pola masyarakatnya dan bertanggungjawab serta mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada masyarakat.

Dinamika manusia yang memadukan manusia dengan sesamanya dan dunia lingkungannya, memadukan “dunia sosial” yang penuh makna dengan “dunia alamiah” yang penuh keteraturan, regularitas.

Menghayati dan mendalami hakikat kehidupan manusia memerlukan pengindraan dan kepekaan terhadap gejala-gejala seperti digambarkan di muka, yang meliputi sikap dan tingkah laku serta seluruh kepribadiannya sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat.

Kemampuan seperti itu, selain dapat diperoleh dari mempelajari bidang keilmuan yang berhubungan dengan gejala-gejala bersangkutan, juga dapat diperoleh dari latihan penghayatan terhadap gejala serta masalah sosial yang terjadi dengan melakukan pengindraan, pengamatan dan penghayatan tentang hal-hal yang dialami di masyarakat.

B. Fungsi dan Peran Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial

1. Peran Manusia sebagai Makhluk Individu

Berdasarkan sifat kodrat sebagai individu, manusia memiliki harkat dan martabat yang memiliki hak-hak dasar. Setiap manusia memiliki potensi diri yang khas dan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dirinya.

Individu berasal dari kata *in* dan *devided*. Dalam bahasa Inggris, *in* salah satunya mengandung pengertian *tidak*, sedangkan *devided* artinya terbagi. Individu berarti tidak terbagi atau satu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata *individuum* yang berarti yang tidak terbagi sehingga merupakan sebutan yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan tidak terbatas.

Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu ketika unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, seseorang tidak disebut sebagai individu. Dalam diri individu ada unsur jasmani dan rohaninya, ada unsur fisik dan psikisnya, atau ada unsur raga dan jiwanya.

Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama.

Seorang individu adalah perpaduan antara faktor fenotip dan genotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Faktor genotip merupakan faktor keturunan, dibawa individu sejak lahir. Jika seorang individu memiliki ciri fisik atau karakter sifat yang dibawa sejak lahir, berarti memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan (faktor fenotip).

Faktor lingkungan (*fenotip*) turut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik seperti kondisi alam sekitarnya. Adapun lingkungan sosial merujuk pada lingkungan tempat seorang individu melakukan interaksi sosial.

Karakteristik yang khas dari seseorang dapat disebut dengan kepribadian. Menurut Nursid Sumaatmadja (2000), kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi bio-psiko-fiskal (fisik dan psikis) yang dibawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan, yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Ia menyimpulkan bahwa faktor lingkungan (fenotip) ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang.

Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal berikut:

- a. menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya;
- b. mengupaya terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia;
- c. merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani;
- d. memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya.

2. *Peran Manusia sebagai Makhluk Sosial*

Dalam kehidupannya, manusia tidak hidup dalam kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Hal ini merupakan salah satu kodrat manusia yang selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. Hal ini menunjukkan kondisi yang interdependensi. Dalam kehidupan selanjutnya, manusia selalu hidup sebagai warga suatu kesatuan hidup, warga masyarakat, dan warga negara.

Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualistis. Artinya, selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerja sama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi makhluk sosial menurut para ahli.

Johannes Garang (1965) mendefinisikan manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk berkelompok dan tidak mampu hidup menyendiri.

Menurut Nana Supriatna (1996), makhluk sosial adalah makhluk yang memiliki kecenderungan menyukai dan membutuhkan kehadiran sesamanya sebagai kebutuhan dasar yang disebut kebutuhan sosial (*sosial needs*)

Pada prinsipnya makhluk sosial merupakan makhluk yang saling berhubungan satu sama lain serta tidak dapat melepaskan diri dari hidup bersama.

Menurut Soerjono Soekanto (1990), tidak semua himpunan manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Himpunan manusia dapat dikatakan kelompok sosial apabila:

- a. kesadaran setiap anggota bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan;
- b. ada interaksi dan timbal balik antara anggota kelompok satu dan anggota lainnya;
- c. ada sesuatu yang dimiliki bersama, misalnya tujuan, cita-cita, ideologi, dan kepentingan;
- d. berstruktur, berkaidah, dan memiliki pola perilaku;
- e. bersistem dan berproses.

Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, tetapi selalu berkembang dan mengalami perubahan, baik dalam aktivitas maupun bentuknya.

Hidup dalam hubungan antaraksi dan interdependensi mengandung konsekuensi sosial, baik dalam arti positif maupun negatif. Keadaan positif dan negatif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai sekaligus watak manusia, bahkan pertentangan yang diakibatkan oleh interaksi antarindividu. Tiap-tiap pribadi harus rela mengorbankan hak-hak pribadi demi kepentingan bersama.

Untuk itu, dikembangkanlah perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pada zaman modern seperti saat ini manusia memerlukan pakaian yang tidak mungkin dibuat sendiri.

Tidak terbatas pada segi badaniah, manusia juga memiliki perasaan emosional yang ingin diungkapkan kepada orang lain dan mendapatkan tanggapan emosional dari orang lain. Manusia memerlukan pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan berbagai rasa emosional lainnya. Tanggapan emosional tersebut hanya dapat diperoleh apabila manusia berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, manusia sebagai makhluk sosial berarti di samping hidup bersama demi memenuhi kebutuhan jasmaniah, manusia juga hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan rohani. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dicapai melalui interaksi sosial.

Maryati dan Suryawati (2003) menyatakan bahwa interaksi sosial adalah kontak atau hubungan timbal balik atau interstimulasi dan respons antarindividu, antarkelompok, atau antarindividu dan kelompok.

Pendapat lain dikemukakan oleh Murdiyatmoko dan Handayani (2004), "Interaksi sosial adalah hubungan antarmanusia yang menghasilkan suatu proses pengaruh memengaruhi yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial." Interaksi positif hanya terjadi apabila terdapat suasana saling memercayai, menghargai, dan saling mendukung (Siagian, 2004).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antarsesama manusia yang saling memengaruhi, baik dalam hubungan antarindividu, antarkelompok, maupun antarindividu dan kelompok.

Menurut Maryati dan Suryawati (2003), interaksi sosial dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Interaksi antara individu dan individu. Dalam hubungan ini dapat terjadi interaksi positif ataupun negatif. Interaksi positif terjadi jika hubungan yang terjadi saling menguntungkan. Interaksi negatif terjadi jika hubungan timbal balik merugikan satu pihak atau keduanya (bermusuhan).

- b. Interaksi antara individu dan kelompok; interaksi ini dapat berlangsung secara positif ataupun negatif. Bentuk interaksi sosial individu dan kelompok bermacam-macam sesuai dengan situasi dan kondisinya.
- c. Interaksi sosial antarkelompok; interaksi sosial ini terjadi sebagai satu kesatuan, bukan kehendak pribadi.

Menurut Tim Sosiologi (2002), interaksi dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut.

- a. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yaitu yang mengarah pada bentuk-bentuk asosiasi (hubungan atau gabungan) sebagai berikut.
 - 1) Kerja sama; kerja sama adalah suatu usaha bersama antara orang perseorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
 - 2) Akomodasi; akomodasi adalah suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan.
 - 3) Asimilasi; asimilasi adalah proses sosial yang timbul jika ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu lama sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran.
 - 4) Akulturasi; akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri.
- b. Interaksi sosial yang bersifat disosiatif, yaitu yang mengarah pada bentuk-bentuk pertentangan atau konflik sebagai berikut.

- 1) Persaingan; persaingan adalah suatu perjuangan yang dilakukan perseorangan atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya.
- 2) Kontraversi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontraversi, antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan yang ditujukan pada perseorangan atau kelompok atau terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik.
- 3) Konflik; konflik adalah proses sosial antarperseorangan atau kelompok masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara yang bertikai.

Di samping interaksi sosial, manusia membutuhkan lembaga sosial (institusi sosial) yang berbentuk materiel dan nonmateriel.

Pengertian institusi sosial yang berbentuk materiel adalah lembaga yang berupa wadah untuk mencapai tujuan bersama. Secara implisit, lembaga sosial memiliki fungsi sosial, antara lain:

- a. memberi pedoman kepada anggota-anggota masyarakat, tentang cara berbuat dan bersikap dalam pergaulannya di masyarakat;
- b. menjaga keutuhan masyarakat;
- c. memberikan pegangan untuk pengendalian sosial (*social control*) terhadap perilaku anggota masyarakat.

Agar hubungan antarmanusia dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, diciptakanlah norma-norma sosial yang memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Norma sosial yang dibangun dan dihasilkan itu akan berguna

untuk menjadi “koridor” bagi dinamika sosial manusia dalam berinteraksi.

Dengan demikian, norma sosial merupakan aturan untuk para anggota masyarakat dalam berinteraksi. Norma sosial dibagi dalam empat tingkatan, mulai dari tingkat yang sanksinya paling ringan hingga tingkatan yang sanksinya paling berat.

- a. Norma sosial disebut cara (*usage*) yang menunjuk pada perbuatan. Misalnya, cara makan, cara tidur, cara berbicara, setiap individu pasti berbeda-beda.
- b. Norma sosial adalah kebiasaan (*folkways*), yaitu menunjuk pada perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Jika kebiasaan dilanggar, sanksinya dapat berupa cemoohan orang sekitar.
- c. Norma sosial adalah tata kelakuan (*mores*), yaitu menunjuk pada kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima sebagai norma pengatur. Sanksi bagi pelanggar berupa pengucilan, pemarginalan.
- d. Norma sosial disebut adat istiadat (*customs*), yaitu menunjuk pada tata kelakuan yang kekal dan kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Jika adat dilanggar, sanksinya berwujud denda adat yang besarnya bergantung pada berat-ringannya pelanggaran.

Norma sosial dapat menjadi pranata sosial jika melalui proses berikut.

- a. *Institutionalization*, proses pelebagaan yang meliputi norma sosial baru yang dikenal, diakui, dihargai, kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari.
- b. *Internalized*, proses pelebagaan yang meliputi norma tersebut kemudian menjadi “darah daging” dalam jiwa anggota-anggota komunitasnya.

Dalam pemahaman seperti ini, menjadi sulit untuk mengatakan pranata sosial atau norma sosial yang lebih penting. Akan tetapi, yang perlu diingat adalah bahwa hal itu diperlukan ketika kita

akan menganalisisnya sehingga dalam kehidupan sehari-hari agak sulit untuk memilah antara pranata dan norma. Norma sosial harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, lebih khusus lagi anggota komunitas (kelompok pendukung kebudayaan). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan sosial (*social control*).

Hubungan antarmanusia hanya akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika norma-norma sosialnya dijaga dan difungsikan sebagaimana mestinya dan disesuaikan dengan tuntutan zaman. Hubungan antarmanusia menyebabkan terjadinya perubahan dan perkembangan masyarakat. Sebelum terjadi perubahan, biasanya didahului oleh proses-proses sosial, yaitu proses interaksi sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses-proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila anggota atau kelompok masyarakat saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan. Dengan kalimat lain, pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama menyebabkan perubahan dan perkembangan masyarakat. Inilah yang disebut dengan dinamika sosial.

Hubungan antarmanusia menghasilkan kehidupan bersama. Kehidupan bersama hanya akan terjadi jika ada proses interaksi sosial. Oleh karena itu, interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Meskipun secara jasmaniah manusia saling bertemu, saling bersinggungan, saling melihat, belum tentu (bahkan tidak akan) menghasilkan pergaulan hidup dalam kelompok sosial.

Adanya pertikaian dalam masyarakat tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, diperlukan proses akomodasi-proses penyesuaian kembali agar pertikaian kembali menjadi kerja sama baru. Begitu seterusnya dengan landasan dasar belajar dari pengalaman.

Di sana ada proses belajar yang merupakan representasi dari konsep dinamika sosial. Oleh karena itu, untuk membahas masalah tersebut, diawali dengan konsep tersebut. Untuk itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dinamika sosial agar pemahaman kita berasal dari satu titik yang sama. Dengan berawal dari titik yang sama, berarti menyamakan persepsi sehingga pembahasannya menjadi lebih terarah, tetapi saling bersinggungan.

3. *Dinamika Sosial*

Dinamika sosial berisi proses internalisasi (*internalization*), sosialisasi (*socialization*), dan enkulturasi (*enculturation*) (Koentjaraningrat, 1980). Ketiga istilah ini menunjuk pada proses belajar dalam masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat merupakan wahana pendidikan mengenai hubungan antarmanusia bagi setiap anggotanya.

a. *Internalisasi (Internalization)*

Istilah internalisasi menunjuk pada proses panjang seorang anak manusia sejak dilahirkan hingga hampir meninggal. Selama hidupnya belajar dan memperoleh pengalaman mengenai perasaan, hasrat, nafsu, dan emosinya sehingga dapat hidup bersama dengan anak manusia lainnya. Ia belajar cara “rangsangan” itu datang dan harus memperoleh serta mengelolanya agar terpuaskan.

Setiap hari selama ia masih hidup, pengalamannya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perasaannya bertambah. Secara antropologis, ia belajar memperoleh kesenangan, kegembiraan, perhatian, kebencian, kecintaan, benar-salah, malu, dan lain-lain. Secara sosiologis, ia memiliki keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Semua itu diperolehnya melalui proses belajar yang disebut internalisasi. Hal yang diperolehnya itu menjadi milik kepribadiannya yang khas, unik, dan berbeda dengan orang lain. Hal itu harus dipelajari karena setiap orang memiliki dorongan naluri untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, yang dalam sosiologi disebut dengan istilah *gregariuosness*. Dengan demikian, ahli antropologi atau sosiologi menyebut manusia sebagai *social animal* (makhluk sosial).

b. *Sosialisasi (Socialization)*

Istilah sosialisasi menunjuk pada proses belajar dari seorang manusia tentang pola-pola berperilaku dalam hidup bermasyarakat dengan bermacam peran sosialnya. Proses ini dilakukan sejak masa kanak-kanak hingga masa tua.

BAB 3

PENDIDIKAN SEBAGAI PROSES TRANSFORMASI BUDAYA

Pendidikan merupakan proses perubahan tingkah laku dari seorang manusia menuju pada kedewasaan. Salah satu indikator manusia yang dewasa adalah memiliki budaya yang unggul dan tangguh. Artinya, di samping memiliki pengetahuan dan keterampilan, juga memiliki nilai-nilai dan norma yang unggul dalam peri kehidupannya. Melalui pendidikan manusia dapat mengetahui baik, buruk, dan mengenal budaya.

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari budaya. Hal itu disebabkan antara pendidikan dan budaya terdapat hubungan yang sangat erat dalam arti keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama, yaitu nilai-nilai.

Kebudayaan memiliki tiga unsur penting, yaitu kebudayaan sebagai suatu tata kehidupan, kebudayaan suatu proses, dan kebudayaan yang memiliki visi tertentu maka pendidikan dalam rumusan tersebut sebenarnya proses pembudayaan. Dengan demikian, tidak ada proses pendidikan tanpa kebudayaan dan tidak ada suatu pendidikan tanpa kebudayaan dan masyarakat. Bagaimana pendidikan dijadikan sebagai alat transformasi budaya?

Pendidikan berperan penting untuk membentuk manusia yang dewasa dan berbudaya. Oleh sebab itu, pendidikan dikatakan sebagai *enkulturasi*, artinya proses membuat orang berbudaya, membuat

orang berperilaku mengikuti budaya yang disepakati bersama dalam masyarakat. Jadi, salah satu fungsi pendidikan adalah proses transformasi kebudayaan.

Kebudayaan sebagai dinamika kehidupan manusia akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, percepatan perkembangan ilmu dan teknologi, serta perkembangan proses pemikiran manusia. Perkembangan tersebut tidak dapat disangkal dipengaruhi oleh pendidikan. Selain itu, pendidikan adalah bagian dari kebudayaan dan memiliki pengaruh timbal balik. Jika kebudayaan berubah, pendidikan pun dapat berubah dan jika pendidikan berubah, akan dapat mengubah kebudayaan.

A. Konsep Kebudayaan

1. Definisi Kebudayaan

Kata dasar kebudayaan adalah budaya. Budaya adalah segala hasil pikiran, perasaan, kemauan, dan karya manusia secara individual atau kelompok untuk meningkatkan hidup dan kehidupan manusia atau secara singkat adalah cara hidup yang telah dikembangkan oleh masyarakat.

Budaya dapat berupa benda-benda konkret, dapat pula bersifat abstrak. Contoh benda konkret, yaitu bangunan rumah, mobil, televisi, barang-barang seni, dan tindakan-tindakan seni. Tindakan-tindakan seni, misalnya cara menerima tamu, cara duduk, dan cara berpakaian. Adapun contoh yang abstrak adalah cara berpikir ilmiah, kemampuan menciptakan sesuatu, imajinasi, cita-cita, kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, dan keimanan (Made Pidarta, 2000: 2-3).

Dari kata "budaya" terbentuk kata "kebudayaan". Menurut Taylor, kebudayaan adalah totalitas kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat dan kemampuan, serta kebiasaan yang diperoleh orang sebagai anggota masyarakat (H.A.R. Tilaar, 1999: 39).

Hassan (1983) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dari hidup manusia dan bermasyarakat berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota masyarakat

yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain.

Kneller (Made Pidarta, 2000: 157) menegaskan bahwa kebudayaan adalah cara hidup yang telah dikembangkan oleh anggota-anggota masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi hakikat kebudayaan, yaitu sebagai berikut.

- a. Hakikat dan inti dari kebudayaan adalah manusia. Dengan kata lain, kebudayaan adalah khas insani. Hanya manusia yang berbudaya dan membudaya.
- b. Kebudayaan merupakan suatu "pencapaian" manusia yang bukan bersifat materiel. Bentuk-bentuk "pencapaian" manusia tersebut, seperti ilmu pengetahuan, kepercayaan, ekonomi, dan seni.
- c. Kebudayaan dapat pula berbentuk kelakuan-kelakuan yang terarah, seperti hukum, dan adat istiadat yang berkesinambungan.
- d. Kebudayaan merupakan suatu realitas objektif yang dapat dilihat.
- e. Kebudayaan tidak terwujud dalam kehidupan manusia yang solider atau terasing, tetapi yang hidup dalam suatu masyarakat.
- f. Kebudayaan diwariskan melalui proses transformasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses transformasi kebudayaan terjadi melalui pendidikan karena kebudayaan berkaitan erat dengan pendidikan. Hal itu disebabkan pendidikan adalah bagian dari kebudayaan dan perkembangan kebudayaan pun dipengaruhi oleh pendidikan.

Dengan demikian, hakikat budaya dikategorikan dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan epistemologis dan pendekatan ontologi atau metafisik. Pendekatan tentang hakikat pendidikan telah melahirkan berbagai jenis teori mengenai pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya suatu kata benda, melainkan juga suatu proses atau kata kerja.

Menurut Edward B. Tylor (H.A.R. Tilaar, 1999: 39), budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Kebudayaan merupakan proses per manusian, artinya dalam kehidupan berbudaya terjadi perubahan, perkembangan, dan motivasi. Proses pendidikan sebagai proses kebudayaan tidak hanya harus melihat peserta didik suatu entitas yang terpecah-pecah, tetapi juga sebagai individu yang menyeluruh atau sebagai seorang manusia seutuhnya.

Budaya dicapai manusia melalui proses panjang, melalui pendidikan, melalui sosialisasi sehingga diperoleh internalisasi nilai yang menjadi satu dengan dirinya, menjadi cara berpikirnya, menjadi kebiasaannya, menjadi miliknya yang diaktualisasi secara spontan dalam kehidupan nyata.

2. *Wujud Kebudayaan*

J.J. Honigsmann (Koenjtaraningrat, 2000) membedakan tiga gejala kebudayaan, yaitu *ideas*, *activities*, dan *artifact*. Hal ini diperjelas oleh Koenjtaraningrat yang mengistilahkannya dengan tiga wujud kebudayaan, yaitu *ideas*: wujud kebudayaan sebagai suatu yang kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya; *activities*: wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat; *artefact*: wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Mengenai wujud kebudayaan, Elly M. Setiadi dkk. (2007: 29-30) memberikan penjelasannya sebagai berikut.

a. *Wujud Ide*

Wujud dari kebudayaan menunjukkan wujud ide, sifatnya abstrak, tidak dapat diraba, dipegang, ataupun difoto, dan tempatnya ada di alam pikiran warga masyarakat tempat kebudayaan yang bersangkutan itu hidup.

Budaya ideal memiliki fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberikan arah pada tindakan, kelakuan, dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Kebudayaan ideal ini dapat pula disebut adat istiadat.

b. Wujud Perilaku

Wujud ini dinamakan sistem sosial karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia. Wujud ini dapat diobservasi, difoto, dan didokumentasikan karena dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, dan bergaul satu dan lainnya dalam masyarakat. Bersifat konkret dalam wujud perilaku dan bahasa.

c. Wujud Artefak

Wujud ini disebut juga kebudayaan fisik yang seluruhnya merupakan hasil fisik. Sifatnya paling konkret, dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Contohnya: candi, bangunan, baju, kain, komputer dan lain-lain.

3. Fungsi Kebudayaan

Fungsi kebudayaan, yaitu untuk mengatur manusia agar dapat bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap jika akan berhubungan dengan orang lain dalam menjalankan hidupnya. Kebudayaan berfungsi sebagai berikut.

- a. Suatu hubungan pedoman antarmanusia atau kelompok. Contohnya: norma. Norma adalah kebiasaan yang dijadikan dasar bagi hubungan antara orang-orang sehingga tingkah laku masing-masing dapat diatur. Norma bersifat tidak tertulis dan berasal dari masyarakat. Apabila dilanggar, sanksinya berupa cemoohan dari masyarakat.
- b. Wadah untuk menyalurkan perasaan dan kehidupan lainnya. Contoh: kesenian.
- c. Melindungi diri pada alam. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang memiliki kegunaan

utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya.

- d. Pembimbing kehidupan manusia.
- e. Pembeda antarmanusia dan binatang.

B. Proses Transformasi Kebudayaan

Pembentukan dan pewarisan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya merupakan proses transformasi. Dalam proses transformasi itulah pendidikan berfungsi. Jadi, proses pendidikan adalah proses transformasi kebudayaan. Salah satu fungsi yang mendasar dari pendidikan adalah untuk pengembangan kebudayaan.

Fortes (H.A.R. Tilaar, 1999: 54) mengemukakan tiga variabel utama dalam transformasi kebudayaan, yaitu unsur-unsur yang ditransformasikan, proses transformasi, dan cara transformasi.

1. Unsur-unsur Transformasi Kebudayaan

Unsur-unsur transformasi kebudayaan adalah nilai-nilai budaya, adat istiadat masyarakat, pandangan mengenai hidup serta berbagai konsep hidup lainnya yang ada dalam masyarakat; berbagai kebiasaan sosial yang digunakan dalam interaksi atau pergaulan para anggota masyarakat tersebut; berbagai sikap dan peranan yang diperlukan dalam dunia pergaulan dan akhirnya berbagai tingkah laku lainnya termasuk proses fisiologi, refleksi dan gerak atau reaksi-reaksi tertentu, dan penyesuaian fisik termasuk gizi dan tata makanan untuk dapat bertahan hidup.

Unsur-unsur itu merupakan ikhtiar kebudayaan yang memungkinkan berkembangnya peradaban manusia. Dalam konteks ini, pendidikan bukan hanya merupakan pengalihan pengetahuan dan keterampilan (*transfer of knowledge and skill*), melainkan juga meliputi pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (*transmission of cultural values and sosial norms*). Setiap masyarakat sebagai pengemban budaya (*culture bearer*) berkepentingan untuk memelihara keterjalinan antara berbagai upaya pendidikan dan usaha pengembangan kebudayaan.

BAB 4

PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, etnis atau kelompok sosial, kepercayaan, agama, dan kebudayaan yang berbeda-beda dari daerah satu dengan daerah lain yang mendominasi khazanah budaya Indonesia.

Dengan semakin beraneka ragamnya masyarakat dan budaya, setiap individu masyarakat memiliki keinginan yang berbeda-beda. Orang-orang dari daerah yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, struktur sosial, dan karakter yang berbeda, memiliki pandangan yang berbeda dengan cara berpikir dalam menghadapi hidup dan masalahnya. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik dan perpecahan yang hanya berlandaskan emosi di antara individu masyarakat. Untuk itu, diperlukan paham pluralisme dan multikulturalisme untuk mempersatukan bangsa.

Apabila kita melihat pedoman dari bangsa Indonesia, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* yang memiliki pengertian berbeda-beda, tetapi tetap menjadi satu, yang mengingatkan kita betapa pentingnya pluralisme dan multikulturalisme untuk menjaga persatuan dari kebhinnekaan bangsa. Pedoman itu telah tercantum pada lambang negara yang di dalamnya telah terangkum dasar negara kita.

A. Konsep Pluralisme dan Multikulturalisme

1. Pengertian Pluralisme

Dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka, di dalamnya ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain.

Secara teoretis, pluralisme merupakan konsep yang menerangkan ideologi kesetaraan kekuasaan dalam suatu masyarakat multikultural, yang kekuasaan “terbagi secara merata” di antara kelompok-kelompok etnik yang bervariasi sehingga mampu mendorong pengaruh timbal balik di antara mereka.

Individu menunjuk pada keterbatasan manusia sebagai manusia perseorangan, manusia yang membutuhkan manusia lainnya, manusia sebagai makhluk sosial-budaya yang otonom. Manusia dalam berbagai hal banyak kesamaannya dengan yang lain, tetapi dalam banyak hal banyak pula perbedaannya. Sejenis, tetapi berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya sendiri. Keunikannya ini yang menjadikan tingkat peradaban yang berbeda sehingga akan menghasilkan diferensiasi sosial.

Keunikan individu menjadi kepribadiannya. Tingkat kepribadian ini turut menentukan dan mewarnai dunia sosial-budaya. Kepribadian yang unsurnya pengetahuan, perasaan, dan naluri kemudian dikelola sedemikian rupa hingga melahirkan budaya, pola perilaku, dan budaya materi.

Menurut John Gray (Singelis, 2003), pada dasarnya pluralisme mendorong perubahan cara berpikir dari monokultur ke cara berpikir multikultur. Perubahan cara berpikir ini dianggap sangat penting untuk mencegah klaim sebuah kebudayaan bahwa hanya pandangan kebudayaannya yang paling benar.

Dalam masyarakat multikultur tersebut, kelompok-kelompok etnik itu dapat menikmati hak-hak mereka yang sama dan seimbang, dapat memelihara dan melindungi diri mereka sendiri karena mereka menjalankan tradisi kebudayaannya (Suzuki, 1984).

Pluralisme berhubungan erat dengan dan menjadi dasar dari multikulturalisme. Idealnya, suatu masyarakat multikultural merupakan kelanjutan dari pluralisme. Masyarakat multikultural

biasanya terjadi pada masyarakat plural. Sebaliknya, pluralisme bukan apa-apa tanpa menjadi multikulturalisme. Pengakuan terhadap pluralisme seharusnya meningkat menjadi multikulturalisme. Namun, pada kenyataannya, kesenjangan selalu ada antara pengakuan pluralisme dan pelaksanaan multikulturalisme.

a. *Makna Pluralisme dalam Konsep Ilmu Pengetahuan (Ilmu Sosial)*

Makna yang pertama, makna pluralisme dalam konsep ilmu pengetahuan (ilmu sosial), yaitu sebagai berikut.

- 1) Pluralisme merupakan sebuah model “politik” yang memungkinkan terjadinya perluasan peran individu atau kelompok yang beragam dalam masyarakat untuk terlibat dalam proses politik bagi lahirnya demokrasi terbuka. Jika hal ini tercapai, akan hadir sebuah spektrum sosial atas kekuasaan yang lebih demokratis karena kekuasaan berada di tangan beberapa individu dari kelompok yang berbeda-beda.
- 2) Pluralisme menggambarkan keadaan masyarakat ketika setiap individu atau kelompok yang berbeda-beda dapat memperkaya peran mereka dalam suatu masyarakat sebagai *sosial fabric*.
- 3) Pluralisme merupakan salah satu pandangan bahwa sebab dari sebuah peristiwa sosial, misalnya sebab dari sebuah perubahan sosial, harus dapat diuji melalui interaksi beragam faktor, bukan dianalisis hanya dari satu faktor. Beragam faktor itu adalah faktor kebudayaan.
- 4) Pluralisme merupakan pandangan posmodern yang mengatakan bahwa semua kebudayaan manusia harus dihargai dan diperhatikan. Tidak ada satu kebudayaan (atau masyarakat) pun yang superior terhadap kebudayaan atau masyarakat yang lain; bahwa setiap kebudayaan memiliki kontribusi tertentu terhadap proses memanusiakan orang lain. Pandangan ini wajar karena pada kenyataannya betapa sering kita menemukan ada kebudayaan atau seperangkat kebudayaan dari komunitas atau masyarakat tertentu yang tidak diketahui secara pasti. Pluralisme mengklaim bahwa dalam masyarakat tempat kita hidup bersama tidak ada kebudayaan yang tidak setara. Oleh

karena itu, setiap kebudayaan harus diakui dan dihargai secara sosial oleh penduduk yang beragam.

Rumusan istilah yang dapat ditarik dari makna pluralisme di atas adalah sebagai berikut. *Pertama*, pluralisme (budaya) menggambarkan kenyataan bahwa dalam masyarakat ada kelompok-kelompok etnik yang tidak terakulturasi dalam identitas budaya etnik. Pada umumnya budaya kelompok seperti ini menampilkan perilaku budaya yang berbeda, misalnya berbicara dengan bahasa yang lain dari bahasa etniknya, memeluk agama yang berbeda dengan mayoritas agama yang dipeluk etniknya, dan lain-lain. Mereka menampilkan sistem nilai yang berbeda dari nilai etniknya. *Kedua*, terbentuk pula pluralisme struktural dalam masyarakat yang menggambarkan perbedaan budaya di antara kelompok-kelompok etnik, tetapi perbedaan tersebut hanya terletak pada wilayah struktur sosial. Hal itu berarti meskipun kelompok-kelompok etnik itu memiliki beberapa unsur budaya yang sama dengan budaya dominan, mereka selalu tampil dengan budaya tertentu (subkultur) yang terpisah dari kelompok dominan.

Menurut Suzuki dan Soderquist (1995), dalam pluralisme terkandung konsep bahwa setiap orang tetap memiliki etnik tertentu dan tetap mempraktikkan etnisitas sebagai suatu yang sentral dalam menentukan relasi dengan orang lain dari kebudayaan dominan. Akhirnya, pluralisme sebagai sebuah ideologi berasumsi bahwa semua "isme" (rasisme, reksisme, kelasisme) menerapkan pendekatan bagi kehidupan yang harmonis satu sama lain. Bagaimanapun, konsep pluralisme budaya sangat bertentangan dengan fokus etnisitas yang tunggal. Sebagaimana dikatakan oleh Newman, pluralisme merupakan gerakan yang berdampak terhadap perubahan struktur sosial masyarakat, dimulai dari perubahan struktur sosial individu dan kelompok.

John Gray (Singelis, 2003) menegaskan bahwa pada dasarnya pluralisme mendorong perubahan cara berpikir dan bersifat universal, untuk mencegah klaim pandangan bahwa ada kebudayaan yang paling benar. Menurut Gray, semua kebudayaan itu penting sehingga tidak ada satu kebudayaan pun yang mengklaim bahwa apa yang dikatakan oleh kebudayaan itu menjadi rasionalisasi atas

semua kebudayaan lain. Inilah argumentasi paling penting dari pluralisme. Dengan demikian, seorang pluralis harus dan selalu akan mengatakan bahwa meskipun setiap kebudayaan memiliki norma-norma universal, dan norma-norma tersebut dapat diberlakukan kapan dan di mana saja, harus diingat bahwa norma-norma universal itu tidak lebih baik daripada validitas kearifan budaya sendiri.

b. Makna Pluralisme sebagai Doktrin

Makna yang kedua, pluralisme sebagai doktrin, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pluralisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat tidak ada satu pun "sebab" yang bersifat tunggal (*monism*) atau ganda (*dualism*) bagi terjadinya perubahan suatu masyarakat. Pluralisme yakin ada banyak sebab yang dapat mengakibatkan timbulnya gejala sosial atau perubahan dalam masyarakat.
- 2) Pluralisme merupakan doktrin yang pada awalnya timbul sekitar tahun 1980-an. Pemunculan kembali ideologi itu disebabkan tidak ada satu pun "gaya simbolis budaya" yang mampu menciptakan dominasi budaya dalam suatu masyarakat yang beragam.
- 3) Konsep pluralisme dimaknai oleh pemerintah sebagai proses melakukan *bargaining* atau kompromi terhadap para pemimpin dari beragam kelompok (etnik dan ras atau kelompok lainnya) yang bersaing dalam bidang bisnis, tenaga kerja, pemerintahan, dan lain-lain.

Pluralisme dianjurkan sebagai jalan terbaik untuk melayani atau sebuah proses yang mendorong lahirnya demokrasi paling ideal dalam masyarakat yang semakin modern dan kompleks agar setiap individu atau kelompok dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan.

Adapun prinsip pluralisme adalah perlindungan terhadap hak individu dan kelompok melalui peraturan dan perundang-undangan dengan memberikan kemungkinan terjadinya *check and balances*. Dalam arti luas, konsep ini menjelaskan bahwa tidak ada

satu kelompok pun yang menduduki keputusan selama-lamanya. Kekuasaan itu selalu berganti; sekurang-kurangnya pergantian itu dilakukan melalui pengaruh individu atau kelompok terhadap kelompok yang berkuasa dalam proses pengambilan keputusan.

c. *Makna Pluralisme Dihubungkan dengan Konsep Lain*

Makna pluralisme jika dihubungkan dengan konsep lain, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pluralisme (*ethnic*); pluralisme etnik adalah konsistensi atau pengakuan terhadap kesetaraan sosial dan budaya antara beragam kelompok etnik yang ada dalam suatu masyarakat.
- 2) Pluralisme (*political*); pluralisme politik merupakan konsistensi atau pengakuan terhadap kesetaraan dalam distribusi kekuasaan pada berbagai kelompok *interest*, kelompok penekan, kelompok etnik dan ras, organisasi dan lembaga politik dalam masyarakat. Struktur kekuasaan yang pluralistik (*pluralistic power structure*) merupakan sebuah sistem yang mengatur pembagian hak kepada semua kelompok yang beragam dalam suatu masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- 3) Pluralisme media, menurut Liliweri (2003), dalam studi media (*media studies*), antara lain sebagai berikut.
 - a) Pluralisme merupakan pandangan bahwa media massa memiliki kebebasan dan kemerdekaan yang sangat besar dan diakui oleh negara, partai politik, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat.
 - b) Media massa harus dipandang sebagai media untuk melakukan kontrol sosial. Oleh karena itu, media harus dikelola oleh sebuah manajemen yang profesional sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi yang ideal bagi kebebasan dan kemerdekaan berpendapat rakyat.
 - c) Dalam pandangan pluralisme media, audiensi tidak boleh dilihat sebagai sasaran yang dapat dimanipulasi media. Audiensi harus dipertimbangkan dalam relaksi yang setara dengan media karena audiensi merupakan sumber pemberitaan dan sasaran bisnis.

- d) Pluralisme juga memandang bahwa media massa merupakan agen terciptanya kebebasan berpendapat dari suatu masyarakat demokratis. Oleh sebab itu, institusi media harus dibiarkan bebas untuk mengontrol pemerintah dan berhubungan dengan audiens ketika audiens bebas memilih informasi yang bermanfaat bagi mereka.

2. *Multikulturalisme*

Multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang kadang-kadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikulturalisme juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara.

Secara etimologis multikulturalisme terdiri atas kata *multi* yang berarti plural, *kultural* yang berarti kebudayaan, dan *isme* yang berarti aliran atau kepercayaan. Jadi, multikulturalisme secara sederhana adalah paham atau aliran tentang budaya yang plural.

Dalam pengertian yang lebih mendalam istilah multikulturalisme bukan hanya pengakuan terhadap budaya (kultur) yang beragam, melainkan juga pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, multikulturalisme adalah gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan.

Adapun dalam *Kamus Sosiologi*, multikulturalisme adalah perayaan keberagaman budaya dalam masyarakat-keragaman yang biasanya dibawa melalui imigrasi. Inggris telah menjadi masyarakat multikultural, kecuali untuk semacam keengganan atau ambivalensi. Kebijakan multikultural di Inggris terwujud dalam respons yang *defensive* terhadap migrasi dan bukan afirmasi yang positif terhadap keragaman budaya. Sebaliknya, di Amerika Serikat, populasi terlepas dari komunitas penduduk asli Amerika secara keseluruhan tersusun dari kaum migran atau keturunan migran dari belahan dunia lain.

Konsep tentang multikulturalisme, sebagaimana konsep-konsep ilmu sosial dan kemanusiaan yang tidak bebas nilai, tidak luput dari pengayaan ataupun penyesuaian ketika dikaji untuk diterapkan. Demikian pula, konsep ini masuk ke Indonesia, yang dikenal dengan sosok keberagamannya.

S. Saptaatmaja (1996) mengemukakan bahwa multikulturalisme bertujuan untuk kerja sama, kesederajatan, dan mengapresiasi dalam dunia yang kian kompleks dan tidak monokultur lagi.

Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut.

Multikulturalisme berhubungan dengan kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu.

Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat pula dipahami sebagai pandangan dunia yang diwujudkan dalam kesadaran politik (Azyumardi Azra, 2007).

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihanannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, dan kebiasaan (*A multicultural society, then is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinct conception of the world, sistem of [meaning, values, forms of sosial organizations, historis, customs and practices; Parekh, 1997 yang dikutip dari Azra, 2007]*).

Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan

ini berujung pada kegagalan atau kesalahan perspektif tentang kesatuan budaya (*unikultural*). Yang seharusnya tidak berarti kemajemukan harus dipaksakan untuk menjadi satu. Akan tetapi, perbedaan itu harus menjadi kekuatan yang kompleks untuk bersatu dan berjalan bersama tanpa adanya konflik.

Adanya sebuah konsensus Neo Liberal, yaitu datang berdasarkan kepentingan ekonomi liberalisme. Selain itu, juga menjadi faktor penghambat integrasi bangsa.

Adapun menurut Kenan Malik (1998), multikulturalisme merupakan produk dari kegagalan politik di negara Barat pada tahun 1960-an. Kemudian, kegagalan perang dingin pada tahun 1989, kegagalan dunia Marxisme, kegagalan gerakan LSM di Asia Tenggara yang menemukan konsep multikultural sebenarnya.

Jalan keluar dari semua itu adalah sebuah keadilan yang masih berpegang pada keanekaragaman budaya yang sejati.

Sejarah multikultural dimulai ketika dijadikan kebijakan resmi di negara-negara berbahasa Inggris. Dimulai di Kanada pada tahun 1971, kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa sebagai kebijakan resmi dan sebagai konsensus sosial di kalangan elite. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini, beberapa negara di Eropa, seperti Belanda dan Denmark mulai mengubah kebijakan kebudayaan mereka ke arah monokulturalisme. Wacana kebijakan ke arah monokulturalisme juga muncul di beberapa negara di Eropa lainnya, seperti Britania, Prancis, dan Jerman.

3. *Perbedaan Pluralisme dan Multikulturalisme*

Pendapat para ahli tentang perbedaan pluralisme dengan multikulturalisme, antara lain sebagai berikut.

- a. Menurut Al Khawarizmi (1998), konsep pluralitas mengandaikan adanya "hal-hal yang lebih dari satu" (*many*), keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, heterogen, bahkan tidak dapat disamakan.

Adapun konsep mutikulturisme adalah sebuah pandangan dunia yang pada akhirnya diimplementasikan dalam kebijakan tentang kesediaan menerima kelompok lain secara sama

sebagai kesatuan, tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama.

Berdasarkan konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa pluralitas adalah bentuk, sedangkan multikultikultur adalah pengakuan dari perbedaan bentuk. Dengan demikian, hubungan antara pluralitas dan multikultur tidak dapat dipisahkan begitu saja. Di Indonesia makna dari kedua kata tersebut masih rancu dan kadang-kadang disamakan. Pengertian konsep tersebut dapat menekankan pengertian dari pluralitas dan multikultur.

- b. Pluralisme adalah paham yang memberikan ruang nyaman bagi paradigma perbedaan sebagai salah satu entitas mendasar kemanusiaan seorang manusia. Adapun multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan kultur atau sebuah keyakinan yang mengakui pluralisme kultur sebagai corak kehidupan masyarakat (Parsudi Suparlan, 2001).
- c. Menurut R.J. Mouw dan S. Griffon (Syahrial Syarbaini, Rusdiyanta, 2009: 114), pluralisme berasal dari kata *plural* (Inggris) yang berarti jamak, dalam arti ada keanekaragaman dalam masyarakat, ada banyak hal lain di luar kelompok kita yang harus diakui.

Lebih luas lagi, pluralisme adalah sebuah *ism* atau aliran tentang pluralitas (S. Ma'arif, 2005: 11). Pluralisme dapat dikatakan sebagai paham yang mengakui adanya perbedaan antara suku bangsa, agama, budaya, dan lain-lain.

Selain itu, pluralisme juga mengakui adanya kemajemukan dan dalam masyarakat pluralisme ada perbedaan perlakuan, baik antara anggota masyarakat maupun antara kelompok masyarakat, ada dominasi yang kuat kepada yang lemah, dominasi mayoritas kepada minoritas sehingga sering terjadi konflik.

Adapun multikulturalisme menuntut masyarakat untuk hidup penuh toleransi, saling pengertian antarbudaya dan antarbangsa dalam membina suatu dunia baru.

B. Perjalanan Multikulturalisme di Indonesia

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang multikulturalisme apakah menjadi faktor perpecahan ataukah justru menjadi pemersatu suatu bangsa, hal yang harus diwaspadai adalah munculnya perpecahan etnis, budaya, dan suku dalam tubuh bangsa kita.

Bangsa Indonesia memiliki bermacam-macam kebudayaan yang dibawa oleh banyak suku, dan adat istiadat yang tersebar di seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke kita telah mengenal suku yang majemuk, seperti suku Jawa, Madura, Batak, Dayak, Asmat, dan lainnya. Semua itu memiliki keunggulan dan tradisi yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Bangsa kita sangat kaya dengan suku, adat istiadat, budaya, bahasa, dan khazanah yang lain ini. Apakah hal tersebut menjadi sebuah kekuatan bangsa ataukah justru berbalik menjadi faktor pemicu timbulnya disintegrasi bangsa? Seperti yang telah diramalkan Huntington, keanekaragaman di Indonesia ini harus diwaspadai. Hal itu disebabkan telah banyak kejadian yang menyulut pada perpecahan, yang disebabkan adanya paham sempit tentang keunggulan suku tertentu.

1. Paham Sukuisme

Paham sukuisme sempit akan membawa pada perpecahan, seperti konflik di Timor-Timur, di Aceh, di Ambon, dan yang lainnya. Konflik itu dapat muncul karena perselisihan di antara masyarakat atau ada provokator yang sengaja menjadi penyulut konflik karena tidak menginginkan Indonesia yang utuh dan kukuh dengan keanekaragamannya. Oleh sebab itu, kita harus berusaha agar ke-*bhinneka*-an ini tidak sampai meretas simpul-simpul persatuan yang telah diikat dengan paham kebangsaan oleh Bung Karno dan para pejuang kita.

Hal ini disadari oleh para *founding father* kita sehingga mereka merumuskan konsep multikulturalisme ini dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, sebuah konsep yang mengandung makna yang luar biasa, baik secara eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit, semboyan ini mampu mengangkat dan menunjukkan keanekaragaman bangsa kita.

BAB 5

MENGENAL KULTUR SUKU BANGSA YANG DAMAI DAN TOLERAN

Dalam paham multikulturalisme, kesederajatan dan/atau kesetaraan sangat dihargai untuk semua budaya yang ada dalam masyarakat. Paham ini merupakan bentuk akomodasi dari budaya arus utama (besar) terhadap munculnya budaya-budaya kecil yang datang dari berbagai kelompok. Oleh karena itu, penting sekarang ini membahas keragaman dan kesetaraan dalam hidup manusia. Untuk konteks Indonesia sebagai masyarakat majemuk, sehubungan dengan pentingnya tiga hal: manusia, keragaman, dan kesetaraan, tatkala berbicara tentang keragaman, hal itu harus dikaitkan dengan kesetaraan. Hal itu disebabkan keragaman tanpa kesetaraan akan memunculkan diskriminasi: kelompok etnis yang satu bisa memperoleh lebih daripada yang lain; atau kelompok umur tertentu dapat memiliki hak-hak khusus atas yang lainnya. Keragaman yang didasarkan pada kesetaraan akan mendorong munculnya kreativitas, persaingan yang sehat dan terbuka, dan pada akhirnya akan memacu kesaling-mengertian.

Perkembangan pembangunan yang terjadi dalam dua dekade terakhir di Indonesia menjadikan pertemuan antarorang dari berbagai kelompok suku dan budaya sangat mudah terjadi. Hal itu akan menimbulkan banyak guncangan dan persoalan. Oleh karena itu, sebelum menjadi sebuah konflik yang keras, Indonesia harus mempersiapkan masyarakatnya mengenai adanya keragaman.

Agar bermanfaat, keragaman itu harus diletakkan dalam bingkai kebersamaan dan kesetaraan.

A. Keanekaragaman Suku Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keragaman budaya, adat istiadat, serta suku bangsa. Dari Sabang sampai Merauke kita mengenal berbagai suku bangsa yang mendiami berbagai pulau, seperti Suku Badui, Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Jambi, Suku Asmat, dan lain-lain. Menjaga kekayaan budaya, adat istiadat, dan mengenal suku bangsa di Indonesia adalah salah satu upaya meningkatkan jiwa nasionalis, memperluas wawasan Nusantara, serta mempersatukan bangsa Indonesia sesuai dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Berikut ini adalah nama-nama suku mewakili yang ada di Indonesia.

1. Pulau Sumatra

Suku-suku di Pulau Sumatra, antara lain suku Abung, Aceh, Akit, Alas, Anabas, Aneuk Jame, Angkola, Bangka, Banyak, Batak, Batu, Bengkulu, Benua, Biliton, Darat, Enggano, Gayo, Jambi, Juru, Karo, Kluet, Kubu, Lampung, Lebong, Lingga, Lom, Lubu, Mamak, Mandailing, Medan, Melayu, Mentawai, Minangkabau, Musihulu, Natuna, Nias, Orang Laut, Pak Pak, Palembang, Pasemah, Pulo, Rawas, Rejang, Riau, Sakai, Sekah, Semendo, Seumeuleu, Sichole, Simalungun, Simalur, Talang, Tambelan, Tamiang, Tapung, Timur, Toba, Ulu, dan Utan.

2. Pulau Jawa

Suku-suku di Pulau Jawa, antara lain suku Badui/Badug, Banten, Bawean, Betawi, Jawa, Kangean, Karimun, Madura, Sapudi, Sunda, Tampus, dan Tengger.

3. Pulau Kalimantan

Suku-suku di Pulau Kalimantan, antara lain suku Adang, Aput, Bahau, Banjarmasin, Basap, Batang Lupar, Batu Blah, Biaju,

Biasaya, Boh, Bukar, Bukit, Bukitan, Busang, Desa, Iban, Kadayan, Kahayan, Kalabit, Kanowit, Katingan, Kayan, Kelai, Kenya, Kinjing, Klamantan, Kota Waringin, Land Dayak, Lawangan, Lisum, Long Glat, Long Kiput, Long Wai, Lundu, Lugat, Manyan, Manyukei, Mlabuh, Melanau, Melayu, Mualang, Murik, Murung, Murut, Ngayu, Ot Danum Ngayu, Ot Danum Punan, Patai, Penyabong, Pnihing, Pontianak, Punan, Saban, Sodong Dayak, Samarinda, Saputan, Saruyan, Sebop, Segal, Sekadau, Siang, Siding, Siong, Tabuyan, Tagal, Taman, Tamonan, Tarakan, Tidong, Tingalan, Treng, Tring, Ukit, Ulu Aer, Uma Pagong, dan Uma Suling.

4. Pulau Sulawesi

Suku-suku di Pulau Sulawesi, antara lain suku Ampana, Bada, Bajo, Baku, Balantak, Banasu, Banggai, Bantenan, Bantik, Bela, Belang, Besoa, Bobongko, Bolang Mongondou, Bugis, Bungku, Buol, Buton, Buyu, Gimpu, Gorontalo, Kabaena, Kodombuku, Kaidipan, Kinadu, Kulawi, Lage, Lajolo, Laki, Laleo, Lambatu, Lampu, Leboni, Lindu, Loinang, Makasar, Mamasa, Mamaju, Manado, Mangki, Mapute, Maronene, Masenrempulu, Matano, Mengkongga, Minahasa, Muna, Pakambia, Pakawa, Parigi, Pebato, Pipikoro, Pitu Ulama, Ponosokan, Poso, Pu'u Mboto, Rampi, Rato, Rongkong, Sandang, Selayar, Saluan, Salu Maogge, Sangir, Seko, Sigi, Talaud, Tabe'e, Tawaelia, Toala, To Belantik, To Ganti, To Gian, Tojo, To Liwu, To Landawe, Toli-Toli, To Loinang, Tolour, Tombolu, To Mini, To Mori, Tompakewa, Tondano, Tonsawang, Tonsea, Tonsina, Toraja, Totemboan, Wana, dan Wanji.

5. Nusa Tenggara

Suku-suku di Pulau Nusa Tenggara, antara lain suku Adonara, Alor Solor, Bali Aga, Belu, Bima, Bodha, Damar, Do Dongko, Dompou, Ende, Flores, Kisar, Kupang, Larantuka, Leti, Lia, Lomblem, Lombok, Mambaro, Manggarai, Marea, Nage Keo, Ngada, Pantar, Riung, Roti, Ruma, Sabu, Sanggau, Sasak, Sikka, Sumba, Sumbawa, Solor, Timor, dan Waingapu.

6. Pulau Maluku

Suku-suku di Kepulauan Maluku, antara lain suku Ambon, Aru, Badar, Banda, Bonfia, Buli, Buru, Damar, Galela, Gane, Goram, Halmahera, Kayoa, Kei, Kisar, Laras Fordata, Leti, Loda, Maba, Makian, Moa, Morotai, Nila Teun Serui, Obi Patani, Patasiwa Putih, Patasiwa Hitam, Roma Damar, Selaru, Seram, Sermana, Serua, Seti, Sula, Tali Abu, Tanibar, Ternate, Teun, dan To Belo.

7. Irian Jaya (Papua)

Suku-suku di Pulau Irian, antara lain suku Anggi, Arguni, Asmat, Batanta, Biak, Bintuni, Dani, Demta, Genyem, Guai, Hattam, Hulu Sungai Tor, Iha, Jakui, Kapauku, Kiman, Mairasi, Mamberamo, Manikion, Marindanim, Mejbrat, Mimika, Misol, Moni, Muyu, Numfor, Pantai Timur, Salawati, Sarmi, Schouten, Senggi, Sentani, Serui, Teluk Jayapura, Uhunduni, dan Waigeo.

Beberapa budaya yang ada di Indonesia, di antaranya rumah adat Rumah Joglo (Jawa Barat), Rumah Gadang (Sumatra Barat), Rumah Panggung (Sulawesi Utara), Honai (Papua), dan sebagainya.

Berbagai tarian daerah yang menarik, lagu daerah dengan bahasanya masing-masing, dan berbagai alat musik semakin menambah kekayaan bangsa ini, misalnya tari Jaipong, tari Saman, tari Pendet, tari Kecak, dan lain-lain.

Kita sebagai warga negara Indonesia harus turut melestarikan suku dan karena budayanya yang unik, budaya yang ada. Keragaman suku disertai dengan keragaman budaya. Indonesia sangat dikenal bangsa lain.

B. Keanekaragaman Kultur/Budaya Bangsa Indonesia

1. *Indonesia sebagai Masyarakat Majemuk*

Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional yang biasanya dilakukan secara paksa (*by force*) menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara.

Ditinjau dari aspek mana pun Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Ini terlebih jika dikontraskan dengan bangsa-bangsa lain, seperti Jepang, Korea, Thailand, ataupun Anglo Saxon (Inggris). Kemajemukan ini tampak dalam manifestasi kebudayaan bangsa Indonesia yang tidak "satu". Dengan mudah budaya Indonesia dapat dipecah ke dalam budaya Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, ataupun Toraja.

2. *Keanekaragaman Kultur Indonesia*

Mengkaji mengenai masyarakat majemuk ini signifikan, terutama dalam masyarakat yang terdiri atas aneka pelapisan sosial dan budaya yang satu sama lain berbeda. Oleh sebab itu, Indonesia mengembangkan slogan *Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda-beda, tetapi tetap satu). Slogan ini bersifat filosofis politis.

Mengenai keanekaragaman kultur ini, Bhikhu Parekh (1964) membedakannya menjadi tiga, yaitu:

- a. keanekaragaman subkultural, yaitu suatu kondisi ketika para anggota masyarakat memiliki satu kebudayaan umum yang luas dianut;
- b. keanekaragaman perspektif, yaitu suatu kondisi ketika beberapa anggota masyarakat sangat kritis terhadap beberapa prinsip atau nilai-nilai sentral kebudayaan yang berlaku dan berusaha untuk menyatakannya kembali di sepanjang garis kelompok yang sesuai;
- c. keanekaragaman manual, yaitu suatu kondisi sebagian besar masyarakat yang mencakup beberapa komunitas yang sadar diri dan terorganisasi dengan baik.

Ciri dari masyarakat majemuk adalah secara struktural memiliki subkebudayaan yang bersifat *diverse*. Masyarakat majemuk kurang mengalami perkembangan dalam hal sistem nilai atau konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat.

Bagi seorang ahli Indonesia lain, Clifford Geerts (1997), masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi ke dalam subsistem yang berdiri sendiri-sendiri, yang tiap-tiap subsistem terikat ke dalam ikatan-ikatan yang bersifat primordial.

Hal yang menarik kemudian dinyatakan Pierre L. van den Bergehe (1985), seputar ciri dasar dari masyarakat majemuk ini, yaitu:

- a. terjadinya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok sering memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain;
- b. memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer;
- c. kurang mengembangkan konsensus di antara anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar;
- d. secara relatif sering mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain;
- e. secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi;
- f. adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain.

Masyarakat majemuk tersegmentasi ke dalam kelompok yang memiliki subkebudayaan yang berbeda.

Untuk mengatasi kemajemukan Indonesia, secara historis *founding fathers* merumuskan Pancasila. Lima kalimat singkat dalam Pancasila digunakan sebagai basis *consensus* yang diyakini merupakan *common will* dari subkultur-subkultur yang hidup di masyarakat majemuk Indonesia.

Nasikun (2005) menandakan keragaman ini kemudian mengimbas pada aspek-aspek kehidupan lainnya. Dengan mengontraskan yang ia sebut sebagai "masyarakat majemuk" (*plural society*) dengan "masyarakat homogen" (*homogeneous society*),

Selanjutnya, Nasikun (2005) mengetengahkan beberapa konflik yang muncul akibat ketiadaan *common will* (kehendak bersama).

Pada masyarakat *homogeny*, *common will* relatif ada. Hal ini akibat serupanya asal usul etnis, agama, dan tata adat istiadat. Adapun pada masyarakat plural, *common will* menjadi sesuatu yang jarang akibat adanya perbedaan asal-usul etnis, agama, dan tata adat istiadat (budaya).

3. *Persebaran Etnis di Indonesia*

Sebagai gambaran berikut ini komposisi etnis dari beberapa provinsi di Indonesia.

Melihat dari sebagian komposisi penduduk di beberapa provinsi Indonesia, tampak wilayah domisili suatu etnis dapat tersebar di luar daerah basis etnis yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia memiliki tingkat keragaman kultural yang sangat tinggi. Keragaman ini tidak lagi dibatasi oleh wilayah asal basis etnis. Keragaman telah meliputi hampir seluruh wilayah yang berada di bawah NKRI. Dengan demikian, upaya-upaya serius seputar manajemen hubungan antaretnis menjadi signifikan dengan adanya realitas ini.

Pertumbuhan kuantitas etnis tidaklah tetap antarperiode. Kemampuan pertumbuhan suatu etnis dapat menurun atau meningkat jika dilihat dalam dua periode sensus.

Tabel 5.1 Keadaan Etnik di Indonesia

No.	Ethnic	Group Number	Percentage (%)
1.	Javanese	83,865,724	41.71
2.	Sundanese	30,978,404	15.41
3.	Malay	6,946,040	3.45
4.	Madurese	6,771,727	3.37
5.	Batak	6,076,440	3.02
6.	Minangkabau	5,475,145	2.72
7.	Betawi	5,041,688	2.51
8.	Buginese	5,010,421	2.49
9.	Bantenese	4,113,162	2.05
10.	Banjarese	3,496,273	1.74
11.	Balinese	3,027,525	1.51
12.	Sasak	2,611,059	1.30

No.	Ethnic	Group Number	Percentage (%)
13.	Makassarese	1,982,187	0.99
14.	Cirebon	1,890,102	0.94
15.	Chinese	1,738,936	0.86
16.	Gorontalo/Hulandalo	974,175	0.48
17.	Acehnese	871,944	0.43
18.	Toraja	750,828	0.37
19.	Nias, Kono Niha	731,620	0.36
20.	Minahasa	659,209	0.33
21.	Boton, Butung, Butong	578,231	0.29
22.	Atoni Metto	568,445	0.28
23.	Manggarai	566,428	0.28
24.	Bima	513,055	0.26
25.	Mandar	504,827	0.25
26.	Sumba, Humba, Tau Humba	501,345	0.25
27.	Sambas	444,929	0.22
28.	Peminggir	426,723	0.21

Sumber: BPS (2004)

Tabel tersebut hanya menunjukkan beberapa etnis. Padahal, menurut BPS (2004), total etnis dan subetnis yang tersebar di Indonesia adalah 1.072.

Delapan etnis “besar” dalam populasi penduduk Indonesia adalah Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Betawi, Bugis, Banten, dan Banjar. Hal ini dengan memerhatikan ketersebaran etnis-etnis tersebut di wilayah provinsi Indonesia.

Selain itu, faktor yang turut menentukan besaran komposisi etnis di Indonesia adalah natalitasnya. Tidak semua etnis memiliki perkembangan tingkat kelahiran yang sama.

Berdasarkan hasil sensus tahun 2000, dapat dilihat persentase terbesar orang Indonesia tinggal di Provinsi Jawa Barat dengan 17,36% (35.724.092), disusul Jawa Timur dengan 16,89% (34.765.998), kemudian Jawa Tengah dengan 15,17% (31.223.259). Adapun provinsi terjarang penduduknya adalah Maluku Utara dengan 0,36% (732.453).

Keragaman etnis di Indonesia ini sangat kontras jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Misalnya, Jepang yang hanya memiliki beberapa etnis seperti Yamato yang dominan, Okinawa (minoritas), Burakumin (minoritas), dan Ainu (minoritas).

4. *Identitas Setiap Kelompok Suku Bangsa di Pulau Jawa Bagian Barat*

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan. Bukti nyata adanya kemajemukan dalam masyarakat tampak dalam keberagaman kebudayaan di Indonesia. Tidak dapat dimungkiri bahwa kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia.

Pemaparan berikut ini merupakan gambaran tentang kultur identitas setiap kelompok suku bangsa di Pulau Jawa bagian barat.

a. *Mengenal Suku Badui*

Keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sebuah identitas yang harus dilindungi. Budaya bukan hanya tarian dan nyanyian, melainkan juga adat istiadat dari warga atau komunitas.

Badui merupakan sebuah desa adat yang berada di daerah Banten, tepatnya di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak. Desa Badui terbagi menjadi dua bagian, yaitu Badui Luar dan Badui Dalam.

Menurut Judistira (1995), Badui sebenarnya telah banyak diteliti dan diperhatikan oleh orang-orang dari luar negeri. Bukan hanya oleh orang Belanda sebagai penjajah, melainkan juga orang Prancis, Inggris, Jerman, dan negara Eropa lainnya.

Judistira (1985) menekuni Badui sejak tahun 1960-an. Sejak itu, ia menemukan bahwa Badui dibagi atas dua paruh masyarakat, yaitu paruh bagian dalam dan paruh bagian luar. Paruh luar dan dalam ini tahan guncangan dari berbagai pengaruh zaman dan perubahan sejak Padjadjaran runtuh. Di Indonesia, Badui adalah satu-satunya masyarakat yang homogen, kuat dalam mempertahankan adat.

Penelitian tentang Badui yang telah lama ditekuni Judistira melahirkan sebuah buku tentang Badui yang juga diterbitkan di Malaysia dengan sebutan *Etnografi Bergambar*. Buku tersebut diluncurkan oleh duta besar Indonesia, yang kemudian diterbitkan juga di Malaysia. Selain itu, Judistira juga akan menerbitkan edisi bahasa Malaysia.

Orang Kanekes atau orang Badui adalah suatu kelompok masyarakat adat subetnis Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Populasinya sekitar 5.000 hingga 8.000 orang dan mereka merupakan salah satu suku yang menerapkan isolasi dari dunia luar. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk difoto, khususnya penduduk wilayah Badui dalam.

Wilayah

Secara geografis, wilayah Kanekes terletak pada koordinat $6^{\circ}27'27''-6^{\circ}30'0''$ LS dan $108^{\circ}3'9''-106^{\circ}4'55''$ BT (Permana, 2001). Mereka bermukim di kaki Pegunungan Kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak-Rangkasbitung, Banten, berjarak sekitar 40 km dari Kota Rangkasbitung. Wilayah yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 300–600 m di atas permukaan laut (DPL) memiliki topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 45%, yang merupakan tanah vulkanik (di bagian utara), tanah endapan (di bagian tengah), dan tanah campuran (di bagian selatan). Suhu rata-rata 20°C .

Etimologi

Sebutan “Badui” merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut. Hal itu berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang mempersamakan

mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah (nomaden). Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Badui dan Gunung Badui yang terletak di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka lebih suka disebut sebagai *urang Kanekes* atau “orang Kanekes” sesuai dengan nama wilayah atau sebutan yang mengacu pada nama kampungnya seperti *Urang Cibeo* (Garna, 1993).

Tiga desa utama orang Kanekes Dalam adalah Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo.

Bahasa

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda dialek Sunda-Banten. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar, mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia, walaupun tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Orang Kanekes Dalam tidak mengenal budaya tulis sehingga adat istiadat, kepercayaan/agama, dan cerita nenek moyang hanya tersimpan dalam tuturan lisan.

Orang Kanekes tidak mengenal sekolah karena pendidikan formal berlawanan dengan adat istiadatnya. Mereka menolak usulan pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah di desa-desa mereka. Bahkan hingga kini, walaupun sejak era Suharto pemerintah telah berusaha memaksa untuk mengubah cara hidup dan membangun fasilitas sekolah modern di wilayah mereka, orang Kanekes masih menolak usaha pemerintah tersebut. Akibatnya, mayoritas orang Kanekes tidak dapat membaca atau menulis.

1) Asal-usul Suku Badui

Delegasi Kanekes sekitar tahun 1920. Menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Kanekes mengaku keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari tujuh dewa atau batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya, termasuk warga Kanekes memiliki tugas bertapa atau asketik (*mandita*) untuk menjaga harmoni dunia.

Pendapat mengenai asal-usul orang Kanekes berbeda dengan pendapat para ahli sejarah yang mendasarkan pendapatnya dengan

cara sintesis dari beberapa bukti sejarah berupa prasasti, catatan perjalanan pelaut Portugis dan Tiongkok, serta cerita rakyat mengenai Tatar Sunda yang keberadaannya cukup minim. Masyarakat Kanekes dikaitkan dengan Kerajaan Sunda yang sebelum keruntuhannya pada abad ke-16 berpusat di Pakuan Pajajaran (sekitar Bogor sekarang). Sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah ujung barat Pulau Jawa ini merupakan bagian penting dari Kerajaan Sunda. Banten merupakan pelabuhan dagang yang cukup besar.

Sungai Ciujung dapat dilayari berbagai jenis perahu dan ramai digunakan untuk pengangkutan hasil bumi dari wilayah pedalaman. Dengan demikian, penguasa wilayah tersebut yang disebut sebagai Pangeran Pucuk Umum menganggap bahwa kelestarian sungai perlu dipertahankan. Untuk itu, diperintahkanlah pasukan tentara kerajaan yang sangat terlatih untuk menjaga dan mengelola kawasan berhutan lebat dan berbukit di wilayah Gunung Kendeng. Keberadaan pasukan dengan tugasnya yang khusus tersebut tampaknya menjadi cikal bakal masyarakat Kanekes yang hingga kini masih mendiami wilayah hulu Sungai Ciujung di Gunung Kendeng (Adimihardja, 2000). Perbedaan pendapat tersebut membawa pada dugaan bahwa pada masa yang lalu, identitas dan kesejarahan mereka sengaja ditutup untuk melindungi komunitas Kanekes dari serangan musuh-musuh Pajajaran.

Van Tricht (Garna, 1993b: 146), seorang dokter yang pernah melakukan riset kesehatan pada tahun 1928, menyangkal teori tersebut. Menurutnya, orang Kanekes adalah penduduk asli daerah tersebut yang memiliki daya tolak kuat terhadap pengaruh luar.

Orang Kanekes pun menolak jika dikatakan bahwa mereka berasal dari orang-orang pelarian dari Pajajaran, ibu kota Kerajaan Sunda. Menurut Danasasmita dan Djatisunda (1986: 4-5), orang Badui merupakan penduduk setempat yang dijadikan mandala" (kawasan suci) secara resmi oleh raja karena penduduknya berkewajiban memelihara *kabuyutan* (tempat pemujaan leluhur atau nenek moyang), bukan agama Hindu atau Buddha.

Kebuyutan di daerah ini dikenal dengan kabuyutan Jati Sunda, "Sunda Asli" atau Sunda Wiwitan (wiwitan = asli, asal, pokok, jati). Oleh karena itu, agama asli mereka pun diberi nama Sunda

Wiwitan. Raja yang menjadikan wilayah Badui sebagai mandala adalah Rakeyan Darmasiksa.

2) Kepercayaan

Kepercayaan masyarakat Kanekes yang disebut sebagai Sunda Wiwitan berakar pada pemujaan arwah nenek moyang (animisme) yang pada perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh agama Buddha dan Hindu. Inti kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan adanya *pikukuh* atau ketentuan adat mutlak yang dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Kanekes (Garna, 1993).

Isi terpenting dari *pikukuh* (kepatuhan) Kanekes tersebut adalah konsep “tanpa perubahan apa pun” atau perubahan sesedikit mungkin:

“Lojor heunteu beunang dipotong, pèndèk heunteu beunang disambung” (Panjang tidak bisa/tidak boleh dipotong, pendek tidak bisa/tidak boleh disambung).

Tabu tersebut dalam kehidupan sehari-hari diinterpretasikan secara harfiah. Di bidang pertanian, bentuk *pikukuh* tersebut adalah dengan tidak mengubah kontur lahan bagi ladang sehingga cara berladangnya sangat sederhana, tidak mengolah lahan dengan bajak, tidak membuat terasering, hanya menanam dengan tugal, yaitu sepotong bambu yang diruncingkan. Pada pembangunan rumah juga kontur permukaan tanah dibiarkan apa adanya sehingga tiang penyangga rumah Kanekes sering tidak sama panjang. Perkataan dan tindakan mereka pun jujur, polos, tanpa basa-basi, bahkan dalam berdagang tidak melakukan tawar-menawar.

Objek kepercayaan terpenting bagi masyarakat Kanekes adalah Arca Domas yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral. Orang Kanekes mengunjungi lokasi tersebut untuk melakukan pemujaan setahun sekali pada bulan Kalima, yang pada tahun 2003 bertepatan dengan bulan Juli. Hanya *Pu'un* atau ketua adat tertinggi dan beberapa anggota masyarakat terpilih yang mengikuti rombongan pemujaan tersebut.

Di kompleks Arca Domas terdapat batu lumpang yang menyimpan air hujan. Apabila pada saat pemujaan ditemukan batu

lumpang tersebut ada dalam keadaan penuh air yang jernih, bagi masyarakat Kanekes itu merupakan pertanda bahwa hujan pada tahun tersebut akan banyak turun dan panen akan berhasil baik. Sebaliknya, apabila batu lumpang kering atau berair keruh, hal itu merupakan pertanda kegagalan panen (Permana, 2003a).

Bagi sebagian kalangan, berkaitan dengan keteguhan masyarakatnya, kepercayaan yang dianut masyarakat adat Kanekes ini mencerminkan kepercayaan keagamaan masyarakat Sunda secara umum sebelum masuknya Islam.

3) Pemerintahan

Masyarakat Kanekes mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut digabungkan atau diakulturasikan sehingga tidak terjadi benturan. Secara nasional, penduduk Kanekes dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai *jaro pamarentah*, yang ada di bawah Camat, sedangkan secara adat tunduk pada pimpinan adat Kanekes yang tertinggi, yaitu *Pu'un*.

Struktur Pemerintahan Kanekes

Pemimpin adat tertinggi dalam masyarakat Kanekes adalah *Pu'un* yang ada di tiga kampung *tangtu*. Jabatan tersebut berlangsung turun-temurun, namun tidak otomatis dari bapak ke anak, tetapi dapat juga kerabat lainnya. Jangka waktu jabatan *Pu'un* tidak ditentukan, hanya berdasarkan kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut.

4) Mata Pencaharian

Sebagaimana yang telah terjadi selama ratusan tahun, mata pencaharian utama masyarakat Kanekes adalah bertani padi huma. Selain itu, mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari menjual buah-buahan yang mereka dapatkan di hutan, seperti durian dan asam keranji, serta madu hutan.

5) Interaksi dengan Masyarakat Luar

Masyarakat Kanekes yang hingga kini ketat mengikuti adat istiadat bukanlah masyarakat terasing, terpencil, ataupun masyarakat yang terisolasi dari perkembangan dunia luar.

Berdirinya Kesultanan Banten yang secara otomatis memasukkan Kanekes ke dalam wilayah kekuasaannya pun tidak lepas dari kesadaran mereka. Sebagai tanda kepatuhan/pengakuan kepada penguasa, masyarakat Kanekes secara rutin melaksanakan *seba* ke Kesultanan Banten (Garna, 1993).

Sampai sekarang, upacara *seba* terus dilangsungkan setahun sekali, berupa menghantar hasil bumi (padi, palawija, buah-buahan) kepada Gubernur Banten (sebelumnya ke Gubernur Jawa Barat) melalui Bupati Kabupaten Lebak.

Di bidang pertanian, penduduk Kanekes Luar berinteraksi erat dengan masyarakat luar, misalnya dalam sewa-menyewa tanah dan tenaga buruh.

Perdagangan yang pada waktu yang lampau dilakukan secara barter, kini telah mempergunakan mata uang rupiah biasa. Orang Kanekes menjual hasil buah-buahan, madu, dan gula kawung/aren melalui para tengkulak. Mereka juga membeli kebutuhan hidup yang tidak diproduksi sendiri di pasar. Pasar bagi orang Kanekes terletak di luar wilayah Kanekes, seperti pasar Kroya, Cibengkung, dan Ciboleger.

Pada saat ini orang luar yang mengunjungi wilayah Kanekes semakin meningkat sampai dengan ratusan orang per kali kunjungan. Mereka biasanya remaja dari sekolah, mahasiswa, dan para pengunjung dewasa lainnya. Penduduk Kanekes menerima para pengunjung tersebut, bahkan untuk menginap satu malam, dengan ketentuan bahwa pengunjung menuruti adat istiadat yang berlaku di sana.

Aturan adat tersebut antara lain tidak boleh berfoto di wilayah Kanekes Dalam, tidak menggunakan sabun, atau odol di sungai. Meskipun demikian, wilayah Kanekes tetap terlarang bagi orang asing (non-WNI). Beberapa wartawan asing yang mencoba masuk ke sana hingga kini selalu ditolak.

Ketika pekerjaan di ladang tidak terlalu banyak, orang Kanekes juga senang berkelana ke kota besar sekitar wilayah mereka dengan syarat harus berjalan kaki. Pada umumnya mereka pergi dalam rombongan kecil yang terdiri atas 3 sampai 5 orang, berkunjung ke rumah kenalan yang pernah datang ke Kanekes sambil menjual madu dan hasil kerajinan tangan. Dalam kunjungan tersebut biasanya mereka mendapatkan tambahan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup.

6) Perkembangan Suku Badui

Perkembangan zaman yang semakin maju dengan segala macam atribut teknologi canggih yang menyertainya tidak mampu mengusik eksistensi suku Badui untuk tetap memegang teguh adat istiadat yang telah diwariskan oleh para leluhurnya. Badui atau lebih dikenal dengan sebutan masyarakat Kanekes adalah kelompok masyarakat adat Sunda yang tinggal di pedalaman Jawa barat, lebih tepatnya Desa Kanekes, sebuah desa di kaki Pegunungan Kendeng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak-Rangkasbitung, Banten.

Masyarakat suku Badui lebih memilih untuk tetap terisolasi dari dunia luar dan berpegang teguh dengan pola hidup yang sederhana dan tradisional.

Masyarakat Kanekes masih memiliki hubungan sejarah dengan orang Sunda. Penampilan fisik dan bahasa mereka mirip dengan orang-orang Sunda pada umumnya. Satu-satunya perbedaan adalah kepercayaan dan cara hidup mereka. Orang Kanekes menutup diri dari pengaruh dunia luar dan secara ketat menjaga cara hidup mereka yang tradisional, sedangkan orang Sunda lebih terbuka pada pengaruh asing dan mayoritas memeluk Islam.

Karakteristik Suku Badui

Masyarakat Kanekes secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu *Tangtu*, *Panamping*, dan *Dangka* (Permana, 2001).

Kanekes Tangtu (Badui Dalam)

Kelompok *tangtu* adalah kelompok yang dikenal sebagai Kanekes Dalam (Badui Dalam), yang paling ketat mengikuti adat,

yaitu warga yang tinggal di tiga kampung: Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik. Ciri khas orang Kanekes Dalam adalah pakaiannya berwarna putih alami dan biru tua serta memakai ikat kepala putih. Mereka dilarang secara adat untuk bertemu dengan orang asing.

Sebagian peraturan yang dianut oleh suku Kanekes Dalam, antara lain:

- a. tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi;
- b. tidak diperkenankan menggunakan alas kaki;
- c. pintu rumah harus menghadap ke utara/selatan (kecuali rumah *Pu'un* atau ketua adat);
- d. dilarang menggunakan alat elektronik (sama sekali tidak tersentuh teknologi);
- e. menggunakan kain berwarna hitam/putih sebagai pakaian yang ditenun dan dijahit sendiri dan tidak diperbolehkan menggunakan pakaian modern.

Kanekes Panamping (Badui Luar)

Kanekes Panamping (Badui Luar) tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Kanekes Dalam, seperti Cikadu, Kaduketuk, Kadukolot, Gajeboh, Cisagu, dan sebagainya. Masyarakat Kanekes Luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna hitam. Kanekes Luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah Kanekes Dalam.

Beberapa hal yang menyebabkan dikeluarkannya warga Kanekes Dalam ke Kanekes Luar, yaitu:

- a. telah melanggar adat masyarakat Kanekes Dalam;
- b. berkeinginan untuk keluar dari Kanekes Dalam;
- c. menikah dengan anggota Kanekes Luar.

Ciri-ciri masyarakat orang Kanekes Luar, yaitu sebagai berikut.

- a. Telah mengenal teknologi, seperti peralatan elektronik, meskipun penggunaannya tetap merupakan larangan untuk setiap warga Kanekes, termasuk warga Kanekes Luar. Mereka menggunakan peralatan tersebut secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui pengawas dari Kanekes Dalam.
- b. Proses pembangunan rumah penduduk Kanekes Luar telah menggunakan alat-alat bantu, seperti gergaji, palu, paku, dan lain-lain, yang sebelumnya dilarang oleh adat Kanekes Dalam.
- c. Menggunakan pakaian adat dengan warna hitam atau biru tua (untuk laki-laki) yang menandakan bahwa mereka tidak suci. Kadang-kadang mereka menggunakan pakaian modern seperti kaos oblong dan celana *jeans*.
- d. Menggunakan peralatan rumah tangga modern, seperti kasur, bantal, piring, gelas kaca, dan plastik;
- e. Tinggal di luar wilayah Kanekes Dalam.

Kanekes Dangka

Kanekes Dangka tinggal di luar wilayah Kanekes. Kini yang tersisa yang tersisa hanya dua kampung, yaitu Padawaras (Cibengkung) dan Sirahdayeuh (Cihandam). Kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam *buffer zone* atas pengaruh dari luar

b. Mengenal Suku Betawi

1) Memahami Suku Betawi

Suku Betawi adalah suku bangsa di Indonesia yang pada umumnya bertempat tinggal di Jakarta. Sejumlah pihak berpendapat bahwa suku Betawi berasal dari hasil kawin-mawin antaretnis dan bangsa pada masa lalu. Mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran berbagai suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Orang atau suku Betawi sebenarnya pendatang baru di Jakarta. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang lebih

dahulu hidup di Jakarta, seperti orang Sunda, Jawa, Arab, Bali, Bugis, Makassar, Ambon, Melayu, dan Tionghoa.

Namun, pihak lain berpendapat bahwa pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar karena eksistensi suku Betawi menurut sejarawan Sagiman M.D. telah ada serta mendiami Jakarta dan sekitarnya sejak zaman batu baru atau pada zaman Neolithicum. Penduduk asli Betawi adalah penduduk Nusa Jawa sebagaimana orang Sunda, Jawa, dan Madura. Pendapat Sagiman M.D. tersebut senada dengan Uka Tjandarasasmita yang mengeluarkan monografinya "Jakarta Raya dan Sekitarnya dari Zaman Prasejarah hingga Kerajaan Pajajaran (1977)" dan mengungkapkan bahwa penduduk asli Jakarta telah ada pada sekitar tahun 3500-3000 sebelum Masehi.

Adapun menurut sebagian peneliti yang sepaham dengan Lance Castles yang pernah meneliti tentang penduduk Jakarta, secara biologis mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang telah lebih dahulu hidup di Jakarta, seperti orang Sunda, Jawa, Bali, Bugis, Makassar, Ambon, dan Melayu serta suku-suku pendatang, seperti Arab, India, Tionghoa, dan Eropa.

Dalam penelitiannya, Lance Castles menitikberatkan pada empat sketsa sejarah, yaitu *Daghregister*, yakni catatan harian tahun 1673 yang dibuat Belanda yang berdiam di dalam kota benteng Batavia; catatan Thomas Stanford Raffles dalam *History of Java* pada tahun 1815; Catatan penduduk pada *Encyclopaedia van Nederlandsch Indie* tahun 1893; sensus penduduk yang dibuat pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930.

Semua sketsa sejarahnya dimulai pada tahun 1673 (pada akhir abad ke-17). Sketsa inilah yang oleh sebagian ahli lainnya dirasakan kurang lengkap untuk menjelaskan asal mula suku Betawi karena dalam Babad Tanah Jawa yang ada pada abad ke-15 (tahun 1400-an Masehi) telah ditemukan kata "Negeri Betawi".

2) Etimologi Betawi

Kata *Betawi* digunakan untuk menyatakan suku asli yang menghuni Jakarta, bahasa Melayu Kreol yang digunakannya, dan kebudayaan Melayunya. Mengenai asal mula kata Betawi, menurut para ahli dan sejarawan ada beberapa acuannya. Acuan tersebut sebagai berikut.

- a) Pitawi (bahasa Melayu Polynesia Purba) yang berarti larangan. Perkataan ini mengacu pada kompleks bangunan yang dihormati di Batu Jaya. Sejarawan Ridwan Saidi mengaitkan bahwa kompleks bangunan di Batu Jaya, Karawang merupakan sebuah kota suci yang tertutup, sementara Karawang merupakan kota yang terbuka.
- b) Betawi (bahasa Melayu Brunei). Kata "Betawi" digunakan untuk menyebut giwang. Nama ini mengacu pada ekskavasi di Babelan, Kabupaten Bekasi, yang banyak ditemukan giwang dari abad ke-11 M.
- c) Flora guling Betawi (*cassia glauca*), famili *papilionaceae* yang merupakan jenis tanaman perdu yang kayunya bulat seperti guling dan mudah diraut serta kukuh. Dahulu jenis batang pohon Betawi banyak digunakan untuk pembuatan gagang keris atau gagang pisau. Tanaman guling Betawi banyak tumbuh di Nusa Kelapa dan beberapa daerah di Pulau Jawa dan Kalimantan. Sementara di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, guling Betawi disebut Kayu Bekawi. Ada perbedaan pengucapan kata "Betawi" dan "Bekawi" pada penggunaan kosakata "k" dan "t" antara Kapuas Hulu dan Betawi Melayu. Hal ini biasa terjadi dalam bahasa Melayu, seperti kata tanya *apakah* atau *apatah* yang memiliki persamaan makna.

Nama Betawi yang berasal dari jenis tanaman mungkin benar. Menurut sejarawan Ridwan Saidi (1994), karena beberapa nama jenis flora selama ini digunakan pada pemberian nama tempat atau daerah yang ada di Jakarta, seperti Gambir, Krekot, Bintaro, Grogol, dan sebagainya. Seperti Kecamatan Makasar, nama ini tidak memiliki hubungan dengan orang Makassar, tetapi diambil dari jenis rerumputan.

Dengan demikian, kata “Betawi” bukan berasal dari kata “Batavia” (nama lama Kota Jakarta pada masa Hindia Belanda). Hal itu disebabkan nama Batavia lebih merujuk pada wilayah asal nenek moyang orang Belanda.

Batavia merupakan nama Latin untuk tanah Batavia pada zaman Romawi. Perkiraan kasarnya berada di sekitar Kota Nijmegen, Belanda, dalam Kekaisaran Romawi. Sisa lahan ini kini dikenal sebagai Betuwe. Selama Renaisans, sejarawan Belanda mencoba untuk mempromosikan Batavia menjadi sebuah status “nenek moyang” dari orang-orang Belanda. Mereka mulai menyebut diri “Orang-orang atau penduduk Batavia,” sehingga menyebabkan munculnya Republik Batavia. Mereka mengambil nama “Batavia” untuk koloninya seperti Hindia Belanda, mereka mengganti nama dari Kota Jayakarta menjadi Batavia dari 1619 sampai sekitar 1942, ketika namanya diubah menjadi Djakarta (ini adalah kependekan dari nama mantan Jayakarta, kemudian diubah kembali ejaannya menjadi Jakarta).

Nama Batavia digunakan pula di Suriname, di tempat mereka mendirikan Batavia, Suriname, dan di Amerika Serikat di tempat mereka mendirikan kota dan kota Batavia, New York. Nama ini menyebar lebih jauh ke barat di Amerika Serikat untuk tempat-tempat seperti Batavia, Illinois, dekat Chicago, dan Batavia, Ohio. Kemudian, penggunaan kata Betawi sebagai sebuah suku yang pada masa Hindia Belanda diawali dengan pendirian sebuah organisasi bernama *Perkoempoelan Kadoemi Betawi* yang lahir pada tahun 1923.

3) Seni dan Kebudayaan

Seni dan budaya asli penduduk Jakarta atau Betawi dapat dilihat dari temuan arkeologis, misalnya giwang-giwang yang ditemukan dalam penggalian di Babelan, Kabupaten Bekasi yang berasal dari abad ke-11 Masehi. Selain itu, budaya Betawi juga terjadi dari proses campuran budaya antara suku asli dan dari beragam etnis pendatang atau yang dikenal dengan istilah *Mestizo*. Sejak zaman dahulu, wilayah bekas Kerajaan Salakanagara atau kemudian dikenal dengan “Kalapa” (sekarang Jakarta) merupakan wilayah yang menarik pendatang dari dalam dan luar Nusantara. Percampuran budaya pun datang pada masa kepemimpinan Raja

Pajajaran, Prabu Surawisesa, ketika ia mengadakan perjanjian dengan Portugal. Dari hasil percampuran budaya antara penduduk asli dan Portugal inilah lahir Keroncong Tugu.

Suku-suku yang mendiami Jakarta sekarang, antara lain Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan Bugis. Selain dari penduduk Nusantara, budaya Betawi juga banyak menyerap dari budaya luar, seperti budaya Arab, Tiongkok, India, dan Portugis.

Suku Betawi sebagai penduduk asli Jakarta agak tersingkirkan oleh penduduk pendatang. Mereka keluar dari Jakarta dan pindah ke wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Budaya Betawi pun tersingkirkan oleh budaya lain, baik dari Indonesia maupun budaya Barat. Untuk melestarikan budaya Betawi, didirikanlah cagar budaya di Situ Babakan.

4) Bahasa

Sifat campur aduk dalam dialek Betawi adalah cerminan dari kebudayaan Betawi secara umum yang merupakan hasil perkawinan berbagai macam kebudayaan, baik yang berasal dari daerah-daerah lain di Nusantara maupun kebudayaan asing.

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa suku bangsa yang mendiami daerah sekitar "Kalapa" (sekarang Jakarta) juga dikelompokkan sebagai suku Betawi awal (proto Betawi).

Berdasarkan sejarah, Kerajaan Tarumanagara yang berpusat di Sundapura pernah diserang dan ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya dari Sumatra. Oleh karena itu, penduduk asli Betawi yang pada awalnya berbahasa Kawi dan mendiami daerah sekitar pelabuhan Sunda Kalapa (jauh sebelum Sumpah Pemuda) telah menggunakan bahasa Melayu. Bahkan, ada pula yang mengatakan bahwa suku lainnya seperti suku Sunda yang mendiami wilayah ini pun turut menggunakan bahasa Melayu yang umum digunakan di Sumatra dan Kalimantan Barat. Penggunaan bahasa ini disebabkan semakin banyaknya pendatang dari wilayah Melayu lainnya, misalnya Kalimantan Barat karena dianggap abainya Syailendra ketika dimintai tolong oleh Sriwijaya untuk menjaga wilayah perairan laut sebelah barat Sungai Cimanuk sebagai hasil Perjanjian Damai

Sriwijaya Kediri yang dimediasi oleh Cina yang kemudian dijadikan sebagai bahasa nasional.

Karena perbedaan bahasa yang digunakan antara suku Betawi dan suku Sunda di wilayah lainnya tersebut, pada awal abad ke-20, Belanda menganggap orang yang tinggal di sekitar Batavia sebagai etnis yang berbeda dengan etnis Sunda dan menyebutnya sebagai etnis Betawi. Walaupun demikian, masih banyak nama daerah dan nama sungai yang masih tetap dipertahankan dalam bahasa Sunda seperti kata Ancol, Pancoran, Cilandak, Ciliwung, Cideng (yang berasal dari Cihideung dan kemudian berubah menjadi Cideung dan terakhir menjadi Cideng), dan lain-lain yang masih sesuai dengan penamaan yang digambarkan dalam naskah kuno *Bujangga Manik* (*Three Old Sundanese Poems*, 2007) yang saat ini disimpan di perpustakaan Bodleian, Oxford, Inggris.

Meskipun bahasa formal yang digunakan di Jakarta adalah bahasa Indonesia, bahasa informal atau bahasa percakapan sehari-hari adalah bahasa Indonesia dialek Betawi. Dialek Betawi terbagi atas dua jenis, yaitu dialek Betawi tengah dan dialek Betawi pinggir. Dialek Betawi tengah umumnya berbunyi “é”, sedangkan dialek Betawi pinggir adalah “a”. Dialek Betawi pusat atau tengah sering dianggap sebagai dialek Betawi sejati karena berasal dari tempat bermulanya Kota Jakarta, yaitu daerah perkampungan Betawi di sekitar Jakarta Kota, Sawah Besar, Tugu, Cilincing, Kemayoran, Senen, Kramat, hingga batas paling selatan di Meester (Jatinegara).

Dialek Betawi pinggiran mulai dari Jatinegara ke Selatan, Condet, Jagakarsa, Depok, Rawa Belong, Ciputat hingga ke pinggir selatan hingga Jawa Barat. Contoh penutur dialek Betawi tengah adalah Benyamin S., Ida Royani, dan Aminah Cendrakasih karena mereka berasal dari daerah Kemayoran dan Kramat Sentiong. Adapun contoh penutur dialek Betawi pinggiran adalah Mandra dan Pak Tile. Contoh paling jelas adalah ketika mereka mengucapkan “kenape/ kenapa” (mengapa). Dialek Betawi tengah jelas menyebutkan “é”, sedangkan Betawi pinggir bernada “a” keras mati seperti “ain” mati dalam cara baca mengaji Al-Quran.

5) Seni Betawi

Musik

Dalam bidang kesenian, misalnya, orang Betawi memiliki seni Gambang Kromong yang berasal dari seni musik Tionghoa. Akan tetapi, ada pula Rebana yang berakar pada tradisi musik Arab, Keroncong Tugu dengan latar belakang Portugis-Arab, dan Tanjidor yang berlatar belakang ke-Belanda-an. Saat ini suku Betawi terkenal dengan seni Lenong, Gambang Kromong, Rebana, Tanjidor dan Keroncong. Betawi juga memiliki lagu tradisional seperti "Kicir-kicir".

Tari

Seni tari di Jakarta merupakan perpaduan antara unsur-unsur budaya masyarakat yang ada di dalamnya. Contohnya, tari Topeng Betawi, Yapong yang dipengaruhi tari Jaipong Sunda, Cokek, dan lain-lain. Pada awalnya seni tari di Jakarta memiliki pengaruh Sunda dan Tiongkok, seperti tari Yapong dengan kostum penari khas pemain Opera Beijing. Namun, Jakarta dapat dinamakan daerah yang paling dinamis. Selain seni tari lama, muncul juga seni tari dengan gaya dan koreografi yang dinamis.

Drama

Drama tradisional Betawi, antara lain Lenong dan Tonil. Pementasan lakon tradisional ini menggambarkan kehidupan sehari-hari rakyat Betawi dengan diselingi lagu, pantun, lawak, dan lelucon jenaka. Kadang-kadang pemeran lenong dapat berinteraksi langsung dengan penonton.

Cerita Rakyat

Cerita rakyat yang berkembang di Jakarta selain cerita rakyat yang sudah dikenal seperti Si Pitung, juga dikenal cerita rakyat lain, seperti serial Jagoan Tulen atau Si Jampang yang mengisahkan jawara-jawara Betawi, baik dalam perjuangan maupun kehidupannya yang dikenal "keras".

BAB 6

MENGENAL POLITIK IDENTITAS

A. Konsep Politik Identitas

1. *Pengertian Politik*

Menurut Max Weber (Isaak, 1975: 18), secara keliruan, politik adalah usaha untuk ikut ambil bagian dalam kekuasaan atau usaha untuk memengaruhi pembagian kekuasaan, baik antarnegara maupun antarkelompok dalam suatu negara.

Kata politik mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan kedudukan yang dipegang oleh para pegawai pemerintah.

Pegawai pemerintah adalah sekelompok orang yang memegang kekuasaan untuk mengatur masyarakat secara keseluruhan (David Easton, 1965: 47-57) dan, dalam usaha mengatur masyarakat, berhak menggunakan kekerasan fisik yang memaksa (Gabriel A. Almond dan James S. Coleman (1975: 6-7).

Kekuasaan yang memiliki kedua sifat tersebut, yaitu mengatur masyarakat secara keseluruhan dan menggunakan kekerasan fisik secara sah disebut kekuasaan politik. Adapun orang atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan politik disebut penguasa politik, sementara keputusan yang dihasilkan oleh penguasa politik dalam usaha untuk mengatur masyarakat disebut kebijakan politik.

2. *Makna Politik Identitas*

Politik identitas bukanlah politik dalam makna tradisional. Fokus perhatian politik identitas adalah perbedaan identitas yang meliputi etnik, agama, dan hal lain yang digunakan untuk menghimpun orang atas dasar kesamaan yang dimiliki. Politik identitas merupakan subdisiplin ilmu politik yang bersifat empiris dan mulai dibicarakan pada tahun 1960-an. Pada tahun 1967, dalam suatu pertemuan pertama yang diadakan oleh asosiasi ilmu politik internasional dibicarakan tentang biologi dan politik.

Merujuk Eriksen (2001), timbulnya perasaan untuk berkumpul pada identitas yang sama seperti etnisitas misalnya berdasarkan kecenderungan dalam setiap kumpulan manusia untuk membedakan antara orang dalam dan orang luar, untuk menarik garis batas sosial, dan kecenderungan untuk membangun stereotip-stereotip tentang "kumpulan lain". Kecenderungan membangun stereotip-stereotip tentang kumpulan lain ini juga sebenarnya merupakan cara untuk mendukung dan membenarkan garis batas sosial ini.

Eriksen menekankan bahwa etnisitas muncul ketika perbedaan kultural yang dipersepsikan akan berakibat pada perbedaan sosial (*ethnicity occurs when perceived cultural differences make a social difference*). Etnisitas muncul karena adanya interaksi dari kumpulan yang merasa "berbeda" ketika perbedaan "kita" dan "mereka" menjadi penting.

3. *Esensi Politik Identitas*

Menurut Lukmantoro (2008: 2), politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan dari anggota suatu kumpulan karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik baik berdasarkan ras, etnisitas, gender, maupun keagamaan.

Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Kemunculan politik identitas merupakan respon terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang sering diterapkan secara tidak adil.

Politik identitas berkaitan dengan upaya-upaya mulai sekedar penyaluran aspirasi untuk memengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan

yang paling fundamental, yaitu penentuan nasib sendiri atas asas keprimordialan.

Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mula pada upaya memasukkan nilai-nilai ke dalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pentadbiran, keinginan menerapkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis.

Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksi-kan dari beragam upaya untuk memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya peraturan daerah tentang syariah ataupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu.

B. Munculnya Politik Identitas

Secara teoretis munculnya politik identitas merupakan fenomena yang disebabkan oleh banyaknya faktor, seperti aspek struktural berupa disparitas ekonomi masa lalu dan masih berlanjutnya kesulitan ekonomi sehingga hari ini yang telah memberikan alasan pembenaran upaya pemisahan diri sebuah kumpulan primordial yang bertautan dengan aspek keterwakilan politik dan institusional.

1. Politisasi Identitas Etnik

Dalam konteks keterwakilan politik belum meluas dan menginstitusinya partisipasi dan keterwakilan politik masyarakat secara komprehensif telah memicu munculnya kebijakan yang diskriminatif dan eksklusif yang pada akhirnya memperkuat alasan kebangkitan politik identitas etnik.

Menurut Barker (2005: 217) karena terdorong perjuangan politik serta minat terhadap filsafat dan bahasa, identitas berkembang menjadi tajuk utama kajian budaya pada era 1990-an. Politik feminisme, etnisitas, orientasi seks, dan tajuk-tajuk lain menjadi minat utama yang memiliki kaitan rapat dengan politik identitas.

Politik identitas diasaskan pada esensialisme strategis, artinya bertindak seolah-olah identitas merupakan entitas yang stabil demi tujuan politis dan praktikal tertentu. Hall (1993: 136) mengatakan bahwa setiap gagasan mengenai diri, identitas, komunitas identifikasi

(bangsa, etnisitas, seksualitas, kelas, dan lain-lain), dan politik yang mengalir darinya hanyalah fiksi yang menandai pembakuan makna secara temporer, parsial, dan arbitrer. Politik tanpa penyisipan kuasa secara arbitrer ke dalam bahasa, pemotongan ideologi, pemosisian, persilangan arah, retidakan adalah mustahil.

Penanda-penanda identitas “budaya” boleh berasal dari sebuah kekhasan yang diyakini ada pada agama, bahasa, dan adat resam pada masyarakat yang bersangkutan (Mauneti, 2004: 30). Akan tetapi, tidak sesederhana itu pula karena King mengatakan bahwa konstruksi identitas budaya bersifat kompleks sebagian karena konstruksi ini merupakan salah satu produk sejarah.

Merujuk kepada Eriksen (2001: 10) bahwa apabila ditinjau dari sudut pandang antropologi, pada semua masyarakat sedang terjadi perubahan identitas sosial dan budaya. Sekurang-kurangnya dalam sepuluh tahun terakhir menjelang abad ke-20, kita dapat melihat secara dramatis rekonseptualisasi konsep kebudayaan dan masyarakat dalam studi-studi ilmu sosial.

Sampai tahun 1960-an terjadi tumpang tindih antara kebudayaan dan etnisitas (diasumsikan bahwa identitas ditentukan oleh etnisitas, sejauh etnik memelihara kekhasan kulturalnya) dengan masalah kewarganegaraan (status kebangsaan seseorang). Namun, lebih kurang tiga puluh tahun berlalu atau sekitar tahun 1990-an, mulai tampak perubahan yang sangat cepat sehingga tidak bisa lagi menunjukkan hubungan langsung antara kebudayaan dan etnisitas. Artinya, identitas etnik belum tentu ditunjukkan lagi oleh kebudayaan dari etnik itu (bdk. Barth, 1969).

Eriksen menjelaskan bahwa hal-hal yang digambarkan itu menunjukkan sekurang-kurangnya dua isu yang selalu terus diperdebatkan.

- a. Selalu ada kontroversi tentang primordialisme dan instrumentalisme. Hal ini dikarenakan identitas etnik pada galibnya merupakan sesuatu yang bersifat primordial, yang semula berakar pada kebudayaan yang dihayati bersama secara kolektif baru akibat asimilasi dua atau lebih budaya yang didukung oleh perkawinan (amalgamasi) ataupun komunikasi antarbudaya di tempat kerja, sekolah, dan lain-lain. Kolektiva

komunitas baru itu dihasilkan oleh keberhasilan memanipulasi simbol-simbol komunikasi bersama yang baru atau menafikan simbol-simbol budaya yang asli. Jadi, perdebatan ini berkaitan dengan dikotomi antara mempertahankan karakteristik kebudayaan tertentu secara primordial atau menerima karakteristik kebudayaan tertentu secara primordial atau menerima karakteristik kebudayaan baru sebagai sesuatu yang sekadar instrumental.

- b. Perdebatan antara konstruktivisme dan esensialisme; bahwa etnik dan identitas dapat dibentuk dan hasil bentukan etnik baru secara esensial menghilangkan atau mengurangi simbol-simbol kultural dari etnik sebelumnya, atau secara esensial pula membentuk karakteristik etnik baru dengan simbol-simbol etnik baru.

Isu inilah yang didiskusikan oleh Ernest Gellnar (1983, 1997) dan Anthony D. Smith (1986). Keduanya mencoba “duduk” pada posisi “antara”, di satu pihak tetap mengakui keberadaan etnik-etnik, dalam rangka etnik itu atau dalam rangka sebuah bangsa (artinya ada hubungan antara etnisitas dan nasionalisme), dan di pihak lain harus berhadapan dengan bentuk etnik baru karena arus modernisasi.

Gellner (1988) mengatakan bahwa bagaimanapun, bangsa adalah sebuah bentukan atau kreasi modern, sekurang-kurangnya kreasi pemikiran tentang negara. Jika demikian, perkembangan negara harus dibicarakan tanpa mengabaikan bahwa dalam kenyataannya ada negara dan bangsa yang terbentuk karena etnisitas dari etnik. Buktinya, kata Gellner, bangsa merupakan bentukan dari kelompok etnik yang sekurang-kurangnya ditunjukkan oleh pemimpin (dari etnik mana) yang memerintah.

Sebaliknya, Anderson (1983) melihat bahwa bangsa adalah suatu komunitas abstrak atau *imagined community* dari sebuah bangsa, khususnya kelompok etnik. Contoh *imagined community* adalah Filipina dan Indonesia yang merupakan negara multi-etnik sehingga harus membedakan antara etnik dan bangsa (Smith, 1991).

Hal yang diuraikan di atas merupakan gejala dari transformasi identitas etnik karena perubahan tertentu dari arah sejarah, keadaan sosial ekonomi, kondisi sosial dan politik. Tindakan dan kelompok etnik merespons kemajuan dan modernisasi sebagai perubahan yang selalu harus dan akan terjadi. Suka atau tidak, kini sedang terjadi transformasi identitas etnik. Konsep kemajuan dan modernisasi telah meningkatkan pandangan tentang kebebasan, termasuk kebebasan ekspresi etnik-etnik.

Modernisasi dalam bidang pemerintahan yang demografis turut membentuk otonomi individual, termasuk otonomi etnik terhadap perubahan struktur dalam masyarakat. Kemajuan yang bersifat fundamental tersebut melahirkan masyarakat sipil (*civil society*), yang kini mulai menuntut kembali hak-haknya yang hilang dalam sejarah peradaban etnik-etnik tersebut. Oleh karena itu, definisi sosial terhadap individu kini berubah seiring dengan perubahan struktur kekuasaan, dominasi gender, kekuasaan politik, seperti hak-hak minoritas, termasuk perkembangan agama yang tidak membatasi kesukubangsaan sebagai sesuatu yang membatasi peran. Dengan demikian, dalam batas-batas dan konteks tertentu, masih membutuhkan pemaknaan etnik secara kontekstual, terutama dalam suasana masyarakat yang multietnik dan multikultur.

2. *Politisasi Identitas Budaya*

Fundamentalisme adalah salah satu dari berbagai pilihan untuk dapat mengerti dan mempraktikkan tradisi budaya. Sebagai bentuk ekstrem dari politisasi perbedaan budaya, fundamentalisme tidak terbatas pada budaya Barat (yang menciptakan terminologi tersebut) atau pada peradaban tertentu, seperti Islam walaupun banyak sekali pandangan yang menentangnya. Fundamentalisme juga bukan merupakan sebuah instrumen analisis Barat, seperti dapat ditemukan dalam budaya lainnya, tetapi mungkin cara penerapannya di budaya lain melalui perspektif Barat. Sebaliknya, semua budaya dunia terbukti berupa sekat-sekat diskusi dan wacana sosial yang pada hakikatnya sangat beranekaragam dan dinamis. Dalam budaya tersebut, dengan ukuran berbeda-beda, fundamentalisme muncul; dalam semua budaya itu pula, fundamentalisme merupakan

ekspresi yang mendapatkan tentangan dalam keseluruhan identitas budaya.

Perbandingan empiris yang menjangkau semua budaya menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu setiap budaya menghasilkan aliran fundamentalisme bersamaan dengan modernisasi dan tradisionalisasi yang mengitarinya.

Dalam tiap-tiap budaya ini, fundamentalisme menyatakan perang terhadap kedua aliran bersaing, yaitu modernisme dan tradisionisme, dan dengan tidak tergoyahkan mengupayakan dikembalikannya identitas yang sesungguhnya dari budaya tradisional yang saat itu berada dalam keterpurukan, dengan membangkitkannya kembali dengan cara mengambil alih kendali kekuasaan politik dan mencapai supremasi absolut.

Dengan berakhirnya konflik Timur-Barat, pola-pola budaya yang berbeda-beda menjadi lebih jelas sebagai nilai-nilai dasar dan bentuk-bentuk hidup, sebagai merek dan harapan kolektif. Fakta yang kurang menonjol ini tidak begitu berhasil meninggalkan kesan di benak masyarakat luas dalam beberapa tahun setelah era ideologi, sama gagalannya dengan usahanya untuk menjadi pusat publisitas dan eksploitasi politik. Dibentuk sebagian untuk tujuan politik, dibuat berlebihan sebagian untuk mempertahankan pengakuan, ditelan oleh publik yang tidak terorientasi dengan sebuah perasaan kelegaan dengan jarak aman terhadap kejadian tidak menyenangkan, perasaan kesadaran budaya dan bersamanya juga kesadaran perbedaan budaya tampaknya telah mengambil alih keadaan konfrontasi terbesar yang mendominasi abad ke-20.

Politisasi perbedaan budaya terjadi, baik di dalam maupun dari luar. Dari dalam mewakili strategi fundamentalisme yang berupaya meyakinkan bahwa kejahatan yang timbul di dunia hanya dapat disembuhkan, jika tuntutan kepastian yang dipegang oleh pemimpin-pemimpin fundamental dalam tiap-tiap kasus, dapat berlangsung tanpa ketakutan akan kontradiksi. Dari luar mewakili strategi dari pihak luar seperti Huntington yang tanpa menjadi fundamentalis sendiri, membuka jalan untuk tindakan fundamentalisme dengan mengungkapkan pernyataan bahwa peradaban yang telah menyebar di dunia pada hakikat bersifat fundamental.

Orang nonfundamentalis pun harus membayar dengan uang yang sama jika tidak mau membahayakan kekuasaan untuk menuntut yang mereka miliki dalam perbenturan peradaban global yang diasumsikan. Fundamentalisme adalah sebuah ideologi abad ke-20 yang merekrut anggotanya atas dasar kesamaan karakteristik etnis dan agama. Pengalaman penghinaan, penderitaan, keputusasaan, atau kurangnya pengakuan memberikan kontribusi besar pada kesuksesan politisnya.

Dengan menggabungkan elemen zaman modern secara pragmatis dualis dengan aspek-aspek dogma yang berasal dari tradisi zaman pra-modern, fundamentalisme berupaya untuk menyerang struktur dasar dan konsekuensi budaya yang tidak toleran pada era modern – yang tidak mendapatkan dukungan – dengan menggunakan perangkat modern dan dengan cara modern.

3. *Politisasi Identitas Agama*

Sebagai bagian dari fenomena global, di Indonesia, politik identitas berdasarkan agama terasa semakin jelas, terutama sejak kejatuhan rezim Soeharto pada bulan Mei 1998. Setidaknya, bangkitnya kembali *politics of identity* ini terlihat dari munculnya dua gejala politik utama, antara lain:

- a. terjadinya kerusuhan antaretnis di beberapa daerah, seperti Kalimantan Barat, Maluku, Papua, dan Kupang;
- b. terjadinya tindak kekerasan dengan menggunakan sentimen-sentimen agama.

Dalam perspektif historis terlihat bahwa kekerasan politik agama merupakan fenomena khas Orde Baru. Hal ini tampak dari data Thomas Santoso (2000: 4) yang memperlihatkan bahwa pada masa Orde Lama hampir tidak ada kerusuhan yang berlatar belakang agama seperti perusakan gereja.

Pada kurun waktu 1945-1966 hanya terdapat dua gereja yang dirusak. Itu pun terjadi di daerah-daerah yang mengalami gejolak politik dan keamanan bertalian dengan gerakan Darul Islam. Adapun pada masa Orde Baru (1966-1998) tercatat tidak kurang dari 456 gereja dirusak, ditutup, ataupun diresolusi. Perusakan gereja yang terjadi

setelah 21 Mei 1998 dapat dikatakan sebagai epilog atau warisan Orde Baru. Dalam kurun waktu 1996 sampai dengan akhir April 2000 tercatat 473 gereja dirusak, ditutup, atau diresolusi. Dari 473 gereja (100%) tersebut dapat dipilah atas tahun dan tempat kejadian, denominasi gereja, dan bentuk kekerasan fisik serta simbolis. Pada tahun 1996 tercatat 71 gereja (15,01%) dirusak, dibakar, dan diresolusi. Selanjutnya, pada tahun 1997 tercatat 92 gereja (19,45%), pada tahun 1998 tercatat 134 gereja (28,33%), pada tahun 1999 tercatat 123 gereja (26%), dan pada tahun 2000 tercatat 53 gereja (11,2%). Berdasarkan tempat kejadian, perusakan gereja terjadi di berbagai pelosok Indonesia meliputi 76 kabupaten/kota. Dari 473 gereja, perusakan lebih banyak terjadi di Jawa (273 gereja/57,72%) dibandingkan dengan di luar Jawa (200 gereja/42,28%). Perusakan gereja lebih banyak terjadi di kota pesisir (291 gereja/61,52%) dibandingkan dengan kota pedalaman (182 gereja/38,48%). Denominasi gereja dibedakan atas Protestan, Pantekosta, dan Katolik. Dari 473 gereja tersebut terdiri atas Protestan (240 gereja/50,74%), Pantekosta (179 gereja/37,84%), dan Katolik (54 gereja/11,42%).

Apabila dibedakan menjadi Jawa dan luar Jawa, komposisi perusakan di Jawa adalah Protestan (235). Karena pertimbangan akses data, tulisan ini hanya menampilkan data-hanya tindak kekerasan terhadap komunitas Kristen. Adapun di luar Jawa, Protestan (27,48%), Pantekosta (9,09%), dan Katolik (5,71%). Berdasarkan jenis kekerasan yang dilakukan dari 473 gereja tercatat 446 gereja (94,29%) mengalami kekerasan fisik dan 27 gereja yang mengalami kekerasan simbolis. Kekerasan simbolik lebih banyak terjadi di Jawa (25 gereja) dibandingkan dengan di luar Jawa (2 gereja).

Semua label fundamentalisme agama, baik Kristen, Yahudi, Islam, Hindu, maupun Buddha senantiasa bertendensi untuk membentuk sebuah sistem berpikir tertutup yang secara sintesis mengisolasi perbedaan pendapat, keraguan, alternatif, dan keterbukaan. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk memberikan keamanan, keyakinan orientasi, identitas yang mantap, dan kebenaran yang menyeluruh.

Mereka akan tiba pada sebuah kepastian sistem kepercayaan yang dihasilkan sendiri dan disterilkan terhadap keraguan. Fundamentalisme modern memberikan pelayanan dalam bentuk

militerannya sebagai legitimasi tuntutan intelektual, agama, dan supremasi terhadap mereka yang berbeda pendapat. Sistem iman yang tertutup dan penerapan peraturan dalam format fundamentalisme mewakili suatu paham kembali secara absolut dalam politik sampai pada batas bahwa mereka berasumsi memiliki peran dalam lingkungan publik dan mematikan kritik, semua alternatif, keraguan, serta dialog terbuka mengenai tuntutan kognitif di antara mereka yang setara.

Yang terjadi selanjutnya adalah pengabaian penuh (atau kadang-kadang dalam masyarakat demokratis yang telah berkembang hanya secara selektif) terhadap hak asasi manusia, pluralisme, toleransi, hukum, dan prinsip mayoritas demokrasi atas nama kebenaran absolut yang dipercayai oleh kaum fundamentalis.

Dalam budaya Barat akhir-akhir ini kita telah menjadi saksi beraneka ragam gerakan fundamentalisme: fundemantalisme Protestan di Amerika Serikat, fundamentalisme etnis di Balkan atau Jerman, dan Marxisme-Leninisme dalam berbagai bentuknya. Pada akhir abad ke-20 fundamentalisme modern telah menjadi formula tanpa banding untuk mendapatkan keberhasilan dalam politisasi perbedaan budaya dalam semua peradaban walaupun memperlihatkan unsur-unsur yang sama beraneka ragamnya seperti modernisasi yang ingin dilawannya di berbagai pusat sebagai kekuatan dominan.

Dalam isi ajaran-ajarannya, kebiasaan hidup masyarakat yang tergabung dalam lingkungannya dan bentuk/struktur tujuan politik sosial yang dituju, terdapat perbedaan yang besar antara fundamentalisme Protestan di Amerika Serikat, fundamentalisme Hindu di India, fundamentalisme Evangelis di Guatemala, fundamentalisme Yahudi di Israel, fundamentalisme Buddha di Sri Lanka, fundamentalisme Islam di Iran atau Aljazair, fundamentalisme Khong Hu Cu di Asia Timur, serta fundamentalisme Katolik Roma di Eropa dan Amerika Serikat. Perbedaan tersebut terungkap dalam kasus-kasus yang terjadi dengan jelas dan dalam ungkapan-ungkapan lumrah yang berakar pada masing-masing budaya yang berbeda.

Namun, di antara semua perbedaan itu, ada satu elemen bersama yang mengikat mereka, yaitu suatu gaya yang ditandai oleh sebuah pendekatan permusuhan terhadap perbedaan budaya, sebuah strategi yang berorientasi untuk mencapai supremasi dengan cara memolitisasikan budayanya melawan budaya pihak lainnya, baik di lingkungan masyarakatnya maupun dengan masyarakat di luarnya.

Hampir tanpa pengecualian, kepemimpinan fundamentalis diilhami dengan kemauan untuk menggunakan energi pengikut setia yang dimobilisasikan untuk meraih atau mengonsolidasikan kepentingan politik atau membenarkan perlakuan kekerasan terhadap pihak yang dinyatakan sebagai musuh. Penelitian sosiologi terperinci terhadap fundamentalisme Islam di Iran dan fundamentalisme Protestan di Amerika Serikat dengan jelas menunjukkan bahwa lingkup tradisional memberikan reaksi terhadap bahaya disintegrasi diri yang diakibatkan oleh modernisasi kota dengan cara mundur ke dalam isolasi fundamentalis. Fundamentalis dalam kedua negara ini memiliki tendensi untuk mencari suaka kepada rekan-rekan yang berpikiran sama dengan beberapa alasan.

Ada ketakutan dalam diri mereka bahwa pengakuan sosial terhadap kebiasaan hidupnya sedikit demi sedikit akan berkurang; mereka menolak identitas sosial yang telah mereka raih didevaluasi; atau ada kekhawatiran bahwa anak-anak mereka akan memeluk gaya hidup modern dan terbuka. Pilihan terhadap gaya hidup terbuka akan memberikan ancaman terhadap eksistensi keseluruhan mereka sebagai komunitas yang terpisah. Impuls fundamentalis dapat tumbuh dengan baik ketika terjadi penurunan harkat sosio-kultural secara tidak terduga yang dikombinasikan dengan pengalaman atau ancaman penurunan mobilitas dan ketidakpastian ekonomi. Krisis ganda budaya-ekonomi jenis seperti ini akan memberikan lahan yang subur bagi pertumbuhan cepat fundamentalisme. Contoh yang paling baik adalah nasional-sosialisme Jerman dengan semangat luar biasa yang dipegangnya dengan latar belakang keruntuhan budaya, perpecahan dengan krisis tradisi dan ekonomi.

Kredibilitas tawaran yang diberikan dalam banyak kasus didukung oleh fakta bahwa organisasi-organisasi fundamental memberikan bantuan praktis di lingkungan kelompok yang diminati. Semua contoh ini menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin fundamentalis beserta organisasi mereka sering bersikap santai dalam waktu jangka panjang tanpa ada respons besar hingga saatnya datang sebuah krisis.

Seperti yang diamati oleh Gilles Keppel (1982), bukanlah sebuah kebetulan bahwa fundamentalisme telah mendapatkan pengaruh dan daya tarik di seluruh dunia sejak pertengahan tahun tujuh puluhan. Masa ini menentukan titik ketika krisis dalam model budaya pada zaman modern, khususnya dalam alternatif Marxisme, bertepatan dengan manifes stagnasi sosio-ekonomi dan pengalaman pertumbuhan ketidaksamaan sebagai akibat globalisasi.

C. Perkembangan Politik Identitas

1. *Politik Identitas sebagai Suatu Kebutuhan*

Proses modernisasi mengakibatkan sistem budaya, sosial, dan politik dalam masyarakat terbuka terhadap interpretasi, tata susun, gaya hidup, dan perjalanan pembangunan alternatif.

Dalam masyarakat Barat proses ini digerakkan oleh dinamika internal sendiri, dalam banyak masyarakat berkembang proses dirangsang oleh pengaruh luar, walaupun hampir tidak pernah tanpa unsur modernisasi yang berasal dari dinamika masyarakat.

Modernisasi membutuhkan kepastian tradisi yang perlu dipertanyakan melalui kritik dan pertimbangan alternatif; sesungguhnya kemampuan meresap alternatif menjadi sangat fundamental terhadap semua bagian pemikiran dan tindakan.

Tata aturan publik harus melalui sebuah perubahan fundamental agar dapat mencapai kapasitas untuk dapat mengatur komunikasi dan kebebasan sistem bersaing dalam orientasi sehingga memungkinkan integrasi sosial secara menyeluruh.

Tata aturan harus belajar untuk dapat mengatur produktivitas dengan perbedaan dan mengatur interaksi-interaksi secara permanen.

2. *Politik Identitas di Dunia*

Dengan berpegang pada prasyarat kebebasan dan hak menentukan diri sendiri, pembukaan dalam masyarakat pada saat yang sama dengan tidak sengaja menciptakan kejadian sejarah yang tidak pernah terjadi, yaitu risiko kehilangan orientasi dan erosi arti kepada individu dan kelompok.

Baik kepada individu maupun masyarakat kini tersedia kesempatan besar untuk pengembangan hak penentuan sendiri, tetapi tanpa jaminan keberhasilan dalam membentuk sebuah identitas individu dan kolektif secara memuaskan.

Dengan alasan ini tradisi dengan orientasinya, kemungkinan identifikasi dan keyakinan status senantiasa berada di bawah pertimbangan kondisi-kondisi modern, tidak pernah sekaligus keseluruhan eksistensi tradisi, tetapi secara esensial satu per satu, dan tidak lebih dahulu dari tantangan perkembangan sosial. Tradisi tidak lagi berlaku per sekte, tetapi hanya dalam proporsi kekuasaan untuk meyakinkan para lawanya pada setiap saat. Di bawah prasyarat ini, perkembangan dan upaya mempertahankan identitas individu dan kolektif menjadi tantangan yang tiada henti.

a. *Sebagai Sebuah Ideologi Politik dan Gerakan*

Fundamentalisme merupakan suatu upaya untuk membalikkan proses modernisasi keterbukaan dan ketidakpastian, menumbangkan modernitas secara menyeluruh atau hanya yakin pada keyakinan utamanya. Sikap mendasar fundamentalisme adalah senantiasa memaksakan pandangan dunianya, etikanya, gaya hidupnya, dan bentuk organisasi sosialnya kepada orang lain serta untuk menyisihkan orientasi-orientasi lainnya.

b. *Sebagai Produk Zaman Modern*

Fundamentalisme mencari upaya untuk mengatasi ketidakpastian dan keterbukaan dengan cara memilih satu alternatif di antara tradisi-tradisi yang sempit atau kebiasaan yang diterima tanpa kritik menjadi hal yang absolut. Orang-orang fundamentalis bermaksud untuk melanjutkan sistem berpikir dan tindakan yang tertutup berdasarkan hal absolut tersebut sistem yang secara

sintetis menyisihkan perbedaan, keraguan, dan alternatif untuk menggantikan keterbukaan modern.

Dengan demikian, mereka memperbaharui dukungan dan jaminan keamanan, keyakinan akan orientasi, identitas yang mantap dan kebenaran, dengan cara membuat keyakinan ini bersifat mengikat bagi setiap orang dengan cara yang sama dan meletakkannya di luar lingkup perubahan yang mungkin terjadi pada masa mendatang.

Terakar dalam tawaran ini untuk individu dan kelompok yang belum yakin adalah prasyarat dan motivasi psikososial yang memungkinkan dilakukannya instrumentalisasi politis perbedaan budaya agar dapat berhasil dalam skala besar.

c. *Sebagai Fenomena*

Fundamentalisme telah ada sejak dimulainya modernisasi budaya sebagai impuls penentangnya. Istilah itu muncul untuk pertama kali dalam kaitannya dengan rangkaian publikasi dengan judul *The Fundamentals* antara tahun 1910 dan 1915 di Amerika Serikat.

Rangkaian ini juga memegang judul terpandang *A Testimony to Truth*. Pada tahun 1919 kaum Kristen Protestan yang memublikasikan rangkaian ini mendirikan sebuah organisasi sedunia yang bernama *World's Christian Fundamentals Association*. Dengan demikian, istilah fundamentalisme menjadi semacam keyakinan Kristen dengan dapat menempatkan diri untuk keperluan umum dan akademis. Selanjutnya, istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada ideologi dan gerakan lainnya, awalnya dalam Katholikisme dan berikutnya di lingkungan budaya lain yang memiliki karakteristik sama.

Ada empat dasar yang memberikan karakter gerakan fundamentalis awal yang memberikan nama pada fenomena ini, yaitu:

- 1) penggunaan tidak tepat atas keseluruhan isi Alkitab;
- 2) pernyataan bahwa semua teologi, agama, dan ilmu pengetahuan adalah tidak berlaku, jika bertentangan dengan kata-kata dalam Alkitab;

BAB 7

KERANGKA DASAR

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Sebenarnya masyarakat Indonesia telah lama akrab dengan motto *Bhinneka Tunggal Ika*. Namun, sayangnya, moto tersebut selama ini hanya menempati kesadaran kognitif masyarakat pada umumnya dan menjadi jargon *lip service* penguasa politik, belum diimplementasikan secara nyata dan tepat dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.

Pendidikan agama seyogianya dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan moralitas universal yang andal dalam agama sekaligus mengembangkan teologi inklusif dan pluralis. Akan tetapi, selama ini pendidikan agama cenderung menampilkan wajahnya yang eksklusif dan dogmatis. Akibatnya, cita-cita leluhur untuk mencapai masyarakat majemuk yang harmonis, yang perbedaan dan keanekaragaman budaya mampu berfungsi sebagai sumber daya yang memperkaya pemekaran manusia dan peradaban, hingga kini masih menjadi impian.

Mencermati realitas pemikiran mengenai pentingnya pendidikan multikultur, terutama bagi generasi baru dan bangsa Indonesia yang majemuk bukan tanpa alasan. Hal itu disebabkan bentuknya yang relatif baru dan belum disosialisasikan banyak orang. Kalaupun ada, masih berupa gagasan-gagasan bentuk pendidikan multikulturalisme bagi masyarakat agama. Suatu gagasan biasanya

disertai arti dan definisi sehingga dianggap perlu segera melakukan pengkajian dan penelitian secara komprehensif mengenai pendidikan ini, untuk dapat dijadikan landasan dan kebijakan pengembangan pendidikan yang berwawasan pluralisme.

A. Konsep Pendidikan Multikultural

1. Konsep Multikulturalisme

Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.

Multikulturalisme mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, hak asasi manusia, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, tingkat dan mutu produktivitas, serta berbagai konsep lainnya yang lebih relevan (Fay, 1996).

Menurut Suparlan (2002: 2), upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud apabila:

- a. konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional ataupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya;
- b. kesamaan pemahaman di antara para ahli mengenai multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya;
- c. upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini.

Blum (Atmadja, 2003) menyatakan bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Multikulturalisme meliputi sebuah penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti

menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya.

Adapun Spradely (1997) menitikberatkan multikultural pada proses transaksi pengetahuan dan pengalaman yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk menginterpretasikan pandangan dunia yang berbeda untuk menuju ke arah kebaruan kultur.

Kata multikultural menjadi pengertian yang sangat luas (*multi-discursive*), bergantung pada konteks pendefinisian dan manfaat yang diharapkan dari pendefinisian tersebut. Dalam kebudayaan multikultural setiap individu memiliki kemampuan berinteraksi dan bertransaksi meskipun latar belakang kultur masing-masing berbeda. Hal ini disebabkan sifat manusia, antara lain akomodatif, asosiatif, adaptable, fleksibel, dan kemauan untuk saling berbagi.

Pandangan ini mengisyaratkan bahwa keberagaman kultur mengandung unsur jamak serta sarat dengan nilai-nilai kearifan. Dalam konteks membangun tatanan sosial yang kukuh, nilai-nilai kearifan itu dapat dijadikan sebagai sumbu pengikat dalam berinteraksi dan bersosialisasi antarindividu atau antarkelompok sosial.

Hanya dengan mempersempit perselisihan budaya yang tidak kondusif, siklus kehidupan sosial masyarakat yang majemuk akan terwujud dalam prinsip dasar yang dapat saling menghargai, menghormati, dan menjaga satu dengan yang lain.

Menurut Sitaresmi (2003), paradigma multikulturalisme pada anak dapat dilakukan melalui cara-cara berikut.

- a. Menyampaikan pesan tentang multikulturalisme dengan memberikan contoh kehidupan sehari-hari.
- b. Secara tidak langsung, yaitu dengan menyampaikan cerita yang berisi pesan tentang multikulturalisme, antara lain dari dongeng, legenda, dan fabel.

Berdasarkan pandangan dan konsep tersebut, multikulturalisme memiliki relevansi makna dan fungsi yang tepat. Oleh sebab itu, konsep tersebut menjadi penting dikembangkan dan diinternalisasikan

dalam proses transformasi nilai-nilai bagi masyarakat bangsa yang beragam.

Prinsip-prinsip dasar multikulturalisme yang mengakui dan menghargai keberagaman akan sangat membantu bagi terjadinya perubahan format perilaku sosial yang kondusif dan menjanjikan di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

2. *Pengertian Pendidikan Multikultural*

Menurut Andersen dan Cusher (1994: 320), pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan.

Definisi ini mengandung unsur yang lebih luas. Meskipun demikian, posisi kebudayaan masih sama, yaitu mencakup keragaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari sebagai objek studi. Dengan kata lain, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan, khususnya bagi rencana pengembangan kurikulum.

James Banks (1993: 3) mendefinisikan pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, ataupun negara. Ia mendefinisikan pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan, dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan agar siswa laki-laki dan perempuan, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah.

Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat Paulo Freire pakar pendidikan pembebasan (1989), bahwa pendidikan bukan "menara gading" yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Menurutnya, pendidikan harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.

Azra (2002) menjelaskan pendidikan multikultural sebagai pengganti dari pendidikan interkultural diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan mau mengerti atau adanya politik pengakuan terhadap kebudayaan kelompok manusia, seperti toleransi, perbedaan etno-kultural dan agama, diskriminasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal, serta subjek-subjek lain yang relevan.

Howard (1993) berpendapat bahwa pendidikan multikultural memberikan kompetensi multikultural. Pada masa awal kehidupan siswa, waktu banyak dilalui di daerah etnis dan kulturenya masing-masing. Kesalahan dalam mentransformasi nilai, aspirasi, etiket dari budaya tertentu, sering berdampak pada primordialisme kesukuan, agama, dan golongan yang berlebihan. Faktor ini penyebab timbulnya permusuhan antaretnis dan golongan. Melalui pendidikan multikultural sejak dini anak diharapkan mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan *usage* (cara individu bertingkah laku), *folkways* (kebiasaan yang ada di masyarakat), *mores* (tata kelakuan di masyarakat), dan *customs* (adat istiadat suatu komunitas).

Dengan pendidikan multikultural peserta didik mampu menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati serta toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status, gender, dan kemampuan akademis (Farida Hanum, 2005).

Hal senada juga ditegaskan oleh Musa Asya"rie (2004) bahwa pendidikan multikultural bermakna sebagai proses pendidikan cara hidup menghormati, tulus, toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural sehingga peserta didik kelak memiliki kekenyalan dan kelenturan mental bangsa dalam menyikapi konflik sosial di masyarakat.

Pendidikan multikultural (*multicultural education*) tidak persis sama dengan enkulturasi ganda (*multiple enculturation*). Sizemore (1978: 2) membedakan pendidikan multikultural dengan enkulturasi ganda. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Enkulturasi lebih menekankan pada integrasi struktural yang mengaburkan makna akulturasi dengan enkulturasi. Pendidikan multikultural merupakan sebuah proses pemerolehan

pengetahuan untuk dapat mengontrol orang lain demi sebuah kehidupan (*survival*).

- b. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti (*difference*) atau *politics of recognition*, politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.

Secara operasional, pendidikan multikultural pada dasarnya adalah program pendidikan yang menyediakan sumber belajar yang jamak bagi pembelajar (*multiple learning environments*) dan yang sesuai dengan kebutuhan akademis ataupun sosial anak didik.

Adapun definisi pendidikan multikultural yang diadopsi dari Suzuki (1978), Pramono (1999), didasarkan pada asumsi awal bahwa sekolah dapat memainkan peran besar dalam mengubah struktur sosial sebuah masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa sekolah satu-satunya lembaga sosial yang dapat mengubah struktur sosial sebuah masyarakat, tetapi sekolah dapat menjadi wahana atau alat bagi perubahan sosial dari masyarakat. Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dimaknai hal-hal sebagai berikut.

- a. Guru-guru dapat membantu siswanya mengonseptualisasi dan menumbuhkan aspirasi tentang struktur sosial alternatif serta memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk berubah. Definisi dan tujuan inilah yang akan dikembangkan menjadi program pendidikan multikultural di sekolah-sekolah yang memiliki latar belakang dan ke-bhinneka-an sosio-historis, budaya, ekonomi dan psikologi.
- b. Pendidikan multikulturalisme dalam konteks Indonesia penting untuk dikembangkan. Hal ini mengingat faktor ke-bhinneka-an bangsa Indonesia dan faktor-faktor lain yang menjadi pengalaman bangsa Indonesia.
- c. Terjadinya peristiwa disintegrasi sosial dan konflik selama ini, semakin perlu untuk diantisipasi secara tepat. Hal yang paling memungkinkan adalah melalui program pendidikan multikulturalisme.
- d. Kesungguhan dalam merumuskan pendidikan multikulturalisme dalam konteks Indonesia yang tepat semangat dan tepat tujuan.

3. *Tujuan Pendidikan Multikultural*

Tujuan utama pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan pelajaran dan pembelajaran ke arah memberikan peluang yang sama pada setiap anak. Jadi, tidak ada yang dikorbankan demi persatuan. Untuk itu, kelompok-kelompok harus damai, saling memahami, mengakhiri perbedaan, tetapi tetap menekankan pada tujuan umum untuk mencapai persatuan. Siswa ditanamkan pemikiran lateral, keanekaragaman, dan keunikan itu dihargai. Hal ini berarti harus ada perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai, khususnya civitas akademika sekolah. Ketika siswa berada di antara sesamanya yang berlatar belakang berbeda, mereka harus belajar satu sama lain, berinteraksi, dan berkomunikasi sehingga dapat menerima perbedaan di antara mereka sebagai sesuatu yang memperkaya mereka.

Perbedaan pada diri anak didik yang harus diakui dalam pendidikan multikultural, antara lain mencakup penduduk minoritas etnis dan ras, kelompok pemeluk agama, agama, jenis kelamin, kondisi ekonomi, daerah/asal-usul, ketidakmampuan fisik dan mental, kelompok umur, dan lain-lain (Baker, 1994: 11).

Tujuan pendidikan multikultural adalah untuk membantu siswa:

- a. memahami latar belakang diri dan kelompok dalam masyarakat;
- b. menghormati dan mengapresiasi ke-*bhinneka-an* budaya dan sosio-historis etnik;
- c. menyelesaikan sikap-sikap yang terlalu etnosentris dan penuh purbasangka;
- d. memahami faktor-faktor sosial, ekonomis, psikologis, dan historis yang menyebabkan terjadinya polarisasi etnik ketimpangan dan keterasingan etnik;
- e. meningkatkan kemampuan menganalisis secara kritis masalah-masalah rutin dan isu melalui proses demokratis melalui sebuah visi tentang masyarakat yang lebih baik, adil, dan bebas;
- f. mengembangkan jati diri yang bermakna bagi semua orang.

Melalui pendidikan multikultural ini anak didik diberi kesempatan dan pilihan untuk mendukung dan memerhatikan satu atau beberapa budaya, misalnya sistem nilai, gaya hidup, atau bahasa.

Pendidikan multikultural (*multicultural education*) merupakan respons terhadap perkembangan keragaman hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi, dan perhatian terhadap orang-orang non-Eropa (Hilliard, 1991-1992). Adapun secara luas, pendidikan multikultural mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya, seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, dan agama.

Dalam aktivitas pendidikan mana pun, peserta didik merupakan sasaran (objek) sekaligus sebagai subjek pendidikan. Oleh sebab itu, dalam memahami hakikat peserta didik, para pendidik perlu memahami ciri-ciri umum peserta didik. Secara umum peserta didik memiliki beberapa ciri, yaitu:

- a. dalam keadaan sedang berdaya. Maksudnya, peserta didik dalam keadaan berdaya untuk menggunakan kemampuan, kemauan, dan sebagainya;
- b. memiliki keinginan untuk berkembang ke arah dewasa;
- c. memiliki latar belakang yang berbeda-beda;
- d. melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individual.

4. Nilai-nilai dalam Pendidikan Multikultural

Menurut Farida Hanum (Setya Raharja, 2011: 115), nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural berupa demokratis, humanisme, dan pluralisme.

a. Nilai Demokratisasi

Nilai demokratisasi atau keadilan merupakan sebuah istilah yang menyeluruh dalam segala bentuk, baik keadilan budaya, politik,

maupun sosial. Keadilan merupakan bentuk bahwa setiap insan mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan.

b. Nilai Humanisme

Nilai humanisme atau kemanusiaan manusia pada dasarnya adalah pengakuan akan pluralitas, heterogenitas, dan keragaman manusia. Keragaman itu dapat berupa ideologi, agama, paradigma, suku bangsa, pola pikir, kebutuhan, tingkat ekonomi, dan sebagainya.

c. Nilai Pluralisme

Nilai pluralisme bangsa adalah pandangan yang mengakui adanya keragaman dalam suatu bangsa, seperti yang ada di Indonesia. Istilah plural mengandung arti berjenis-jenis, tetapi pluralisme bukan berarti sekadar pengakuan terhadap hal tersebut, melainkan memiliki implikasi-implikasi politis, sosial, dan ekonomi. Oleh sebab itu, pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Banyak negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, tetapi tidak mengakui adanya pluralisme dalam kehidupannya sehingga terjadi berbagai jenis segregasi. Pluralisme berkenaan dengan hak hidup kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas.

5. Fokus Pendidikan Multikultural

Menurut Tilaar (1999), fokus pendidikan multikultural tidak lagi diarahkan hanya pada kelompok rasial, agama, dan kultural domain atau *mainstream*. Pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individual yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya *mainstream* yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat *mainstream*.

Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*) atau *politics of recognition* (politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas).

Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap "*indifference*" dan "*non-recognition*" tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang.

Paradigma seperti ini mendorong munculnya kajian-kajian tentang "*ethnic studies*" untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang subjek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (*empowerment*) bagi kelompok-kelompok minoritas dan *disadvantaged*.

Tilaar (1999) menegaskan bahwa pengertian tentang multikultural mencakup pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural harus mencakup subjek-subjek, seperti toleransi, tema-tema tentang perbedaan etno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, hak asasi manusia, demokrasi dan pluralitas, multikulturalisme, kemanusiaan universal, dan subjek-subjek lain yang relevan.

Dalam konteks teoretis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, ada beberapa pendekatan, yaitu:

- a. pendidikan tentang perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme;
- b. pendidikan tentang perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan;
- c. pendidikan bagi pluralisme kebudayaan;
- d. pendidikan dwibudaya;
- e. pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia.

Selanjutnya, menurut H.A.R. Tilaar (1999), bangsa yang tidak memiliki strategi untuk mengelola kebudayaan yang mendapatkan

tantangan yang demikian dahsyatnya dikhawatirkan akan mudah terbawa arus hingga akhirnya kehilangan jati diri lokal dan nasionalnya. Pendidikan multikultural hendaknya dijadikan strategi dalam mengelola kebudayaan dengan menawarkan strategi transformasi budaya yang ampuh, yaitu melalui mekanisme pendidikan yang menghargai perbedaan budaya (*different of culture*).

Hal senada juga diungkapkan Sutjipto dan Kamaril Wardani (2010), bahwa globalisasi sebagai tantangan global perlu diimbangi dengan penguatan budaya lokal (*local culture*). Meskipun demikian, fanatisme berlebihan pada budaya lokal berisiko menimbulkan disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu, fanatisme dan primordialisme selayaknya dikikis habis. Di sinilah urgensi pendidikan multikultural untuk dihindarkan dalam dunia pendidikan saat ini karena pendidikan merupakan instrumen paling ampuh untuk memberikan penyadaran (*conscious*) kepada masyarakat agar tidak timbul konflik etnis, budaya, dan agama.

6. *Perspektif Tujuan Pendidikan Multikultural*

Meminjam sistem klasifikasi Robinson (Nasikun, 2005), ada tiga perspektif multikulturalisme dalam sistem pendidikan, yaitu perspektif *cultural assimilation*, perspektif *cultural pluralism*, dan perspektif *cultural synthesis*.

a. *Perspektif Cultural Assimilation*

Cultural assimilation merupakan model transisi dalam sistem pendidikan yang menunjukkan proses asimilasi anak atau subjek didik dari berbagai kebudayaan atau masyarakat subnasional ke dalam suatu "*core society*".

b. *Perspektif Cultural Pluralism*

Cultural pluralism merupakan suatu sistem pendidikan yang menekankan pada pentingnya hak bagi semua kebudayaan dan masyarakat subnasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kultural masing-masing.

c. *Perspektif "Cultural Synthesis"*

Cultural synthesis merupakan sintesis dari perspektif asimilasionis dan pluralis yang menekankan pentingnya proses terjadinya eklektisisme dan sintesis dalam diri anak atau subjek didik dan masyarakat serta terjadinya perubahan dalam berbagai kebudayaan dan masyarakat subnasional.

B. Pendidikan Multikultural di Indonesia

1. *Latar Belakang Lahirnya Pendidikan Multikultural*

Pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang "interkulturalisme" sesuai dengan Perang Dunia (PD) kedua. Kemunculan gagasan dan kesadaran "interkulturalisme" ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas (keberagaman) di negara-negara Barat sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa (H.A.R. Tilaar, 1999).

Dalam konteks Indonesia, perbincangan tentang konsep pendidikan multikultural memperoleh momentum pascaruntuhnya rezim otoriter militeristik Orde Baru karena hempasan badai reformasi. Era reformasi tidak hanya membawa berkah bagi bangsa kita, tetapi juga memberikan peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme. Untuk itu, kita perlu menerapkan paradigma pendidikan multikultural untuk menangkal semangat primordialisme (Yaqin, 2005: 56). Paradigma pendidikan multikultural dalam konteks ini memberi pelajaran untuk memiliki apresiasi respek terhadap budaya dan agama-agama orang lain.

Gerakan reformasi Mei 1998 mentransformasikan otoritarianisme Orde Baru menuju transisi demokrasi sebaliknya telah menyemaikan berkembangnya kesadaran baru tentang pentingnya otonomi masyarakat sipil. Eskstrand (Nasikun, 2005) menyebutkan hal ini sebagai perspektif multikulturalisme radikal (*radical multicularism*) sebagaimana yang kini telah diakomodasi oleh Undang-Undang Sisdiknas.

Dalam konteks perkembangan sistem politik Indonesia saat ini, pilihan perspektif pendidikan yang demikian memiliki peluang dan pendidikan multikultural sangat diperlukan sebagai landasan pengembangan sistem politik yang kuat. Pendidikan multikultural sangat menekankan pentingnya akomodasi hak setiap kebudayaan dan masyarakat subnasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kebudayaan dan masyarakat nasional. Dalam sejarahnya, pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep atau pemikiran yang tidak muncul dalam ruangan yang kosong, tetapi ada interest politik, sosial, ekonomi, dan intelektual yang mendorong kemunculannya (Jamaluddin, 2005: 67).

Berdasarkan hal tersebut, penerapan multikulturalisme menuntut kesadaran dari tiap-tiap budaya lokal untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamaian. Paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu *concern* dari Pasal 4 UU No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

2. *Konsep Pendidikan Multikultural dalam Sisdiknas*

Pendidikan merupakan kebutuhan paling esensial bagi setiap manusia, negara, ataupun pemerintah pada era reformasi ini. Pendidikan harus selalu ditumbuhkembangkan secara sistematis oleh para pengambil kebijakan yang berwenang di negara ini.

Transformasi dalam dunia pendidikan selalu diupayakan agar pendidikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana telah diamanatkan oleh pendiri republik yang dituangkan dalam UUD 1945 (BSNP, 2005: 17). Dengan demikian, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari perubahan sosial dan kehidupan manusia dalam berbagai kaitannya dengan masalah kebudayaan. Oleh sebab itu, pendidikan dalam multikulturalisme merupakan realitas sosial yang akan dihadapi oleh dunia pendidikan pada masa-masa yang akan datang.

Peran pendidikan dalam multikulturalisme hanya dapat dimengerti dalam kaitannya dengan falsafah hidup, kenyataan sosial, yang akan meliputi disiplin-disiplin ilmu yang lain, seperti ilmu politik, filsafat, khususnya falsafah posmodernisme, antropologi, dan sosiologi.

Dalam hal ini dimaksudkan agar dalam perjalanan sejarah pendidikan multikultural tidak akan kehilangan arah atau berlawanan dengan nilai-nilai dasar multikulturalisme.

Karena hegemoni bukan hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang pelayanan terhadap masyarakat (Dawam, Ainur Rafiq, 2003: 18-26). Dengan demikian, orientasi yang seharusnya dibangun dan diperhatikan antara lain meliputi hal-hal berikut.

a. Orientasi Kemanusiaan

Kemanusiaan atau humanisme merupakan sebuah nilai kodrati yang menjadi landasan sekaligus tujuan pendidikan. Kemanusiaan bersifat universal, global, di atas semua suku, aliran, ras, golongan, dan agama.

b. Orientasi Kebersamaan

Kebersamaan atau kooperativisme merupakan sebuah nilai yang sangat mulia dalam masyarakat yang plural dan heterogen. Kebersamaan yang hakiki juga akan membawa pada kedamaian yang tidak ada batasannya.

Kebersamaan yang dibangun di sini adalah kebersamaan yang terlepas dari unsur kolusif ataupun koruptif. Intinya kebersamaan yang dibangun adalah kebersamaan yang masing-masing pihak tidak merasa dirugikan dirinya sendiri, orang lain, lingkungan, serta negara.

c. Orientasi Kesejahteraan

Kesejahteraan atau welvarisme merupakan suatu kondisi sosial yang menjadi harapan semua orang. Kesejahteraan selama ini hanya dijadikan sebagai slogan kosong. Kesejahteraan sering diucapkan, tetapi tidak pernah dijadikan orientasi

oleh siapa pun. Konsistensi terhadap sebuah orientasi harus dibuktikan dengan perilaku menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat.

d. Orientasi Profesional

Profesional merupakan sebuah nilai yang dipandang dari aspek apa pun adalah sangat tepat. Tepat landasan, tepat proses, tepat pelaku, tepat ruang, tepat waktu, tepat anggaran, tepat kualitatif, tepat kuantitatif, dan tepat tujuan.

e. Orientasi Mengakui Pluralitas dan Heterogenitas

Pluralitas dan heterogenitas merupakan kenyataan yang tidak mungkin ditindas secara fasis dengan memunculkan sikap fanatisme terhadap kebenaran yang diyakini oleh banyak orang.

f. Orientasi Anti Hegemoni dan Anti Dominasi

Hegemoni dan dominasi hegemoni adalah dua istilah yang sangat populer bagi kaum tertindas. Akan tetapi, kedua istilah tersebut tidak pernah digunakan, bahkan dihindari oleh para pengikut paham liberalis, kapitalis, globalis, dan neoliberalis.

Dengan demikian, multikulturalisme dan pendidikan bukan hanya masalah teknis pendidikan, melainkan juga memerlukan konsep pemikiran dan pengembangan yang meminta partisipasi antardisiplin (Ali, 2002: 19).

Pendidikan yang berpijak pada budaya “pribumi” bersemi di tengah dominannya model pendidikan Belanda yang berorientasi Barat dan diskriminatif. Fakta-fakta itu menegaskan hegemoni negara dalam kebijakan dan praktik pendidikan menjadi konteks jitu yang mengasah *counter dis course* bagi visi pendidikan penguasa.

Pada alam reformasi hegemoni negara relatif cair dan kebebasan berpendapat praktis lebih dijamin. Berbagai masalah pendidikan kita pada alam reformasi tidak berkurang, mungkin lebih kompleks karena

prinsip kesetaraan kepentingan. Akan tetapi, ruang kontemplasi untuk memikirkan berbagai persoalan itu terlibas dalam kebisingan “pembaruan”. Akibatnya, pemetaan persoalan pendidikan bertolak dari hal-hal kasatmata (Muhyi, 2004: 20).

Multikulturalisme adalah keniscayaan yang tidak dapat ditolak di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara bangsa di dunia yang meniscayakan multi-etnik dan agama tumbuh dalam masyarakat yang pluralis. Oleh karena itu, pendidikan yang mengacu pada trans-etnik dan agama harus diusung sedemikian rupa agar tercipta relasi yang dinamis dan harmonis.

Ketetapan UU Sisdiknas 2003 sebagai usaha “politik” ke arah cita-cita bersama yang mulia menuai kontroversi dan kritik. Gelombang reaksi pro dan kontra begitu memanas dari masyarakat, khususnya bagi para pelaku pendidikan dan pemuka agama yang berseteru ingin menyampaikan sekaligus mempertahankan aspirasinya (Kartini, 2004: 21).

3. *Pendidikan Multikultural dalam Dimensi Pendidikan Nasional*

Menurut Tilaar (2004) dan Benni (2006) pendidikan multikultural memiliki dimensi sebagai berikut.

a. *Right to Culture dan Identitas Budaya Lokal*

Multikulturalisme didorong oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi, akibat globalisasi pengakuan tersebut diarahkan juga pada hak-hak lain, yaitu hak akan kebudayaan (*right to culture*). Lahirnya identitas kesukuan sebagai perkembangan budaya mikro di Indonesia memerlukan masa transisi, yaitu seakan-akan menurunnya rasa kebangsaan dan persatuan Indonesia. Hal ini dapat dimengerti karena yang disebut budaya Indonesia sebagai budaya *mainstream* belum jelas bagi kita. Identitas budaya makro, yaitu budaya Indonesia yang sedang menjadi harus terus-menerus dibangun atau merupakan proses yang tanpa ujung.

BAB 8

STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Pemerintah telah menetapkan tujuan pembangunan pendidikan nasional jangka menengah, di antaranya meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif, dan demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, agama, kelompok etnis, kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual; menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara; memperluas akses pendidikan nonformal bagi penduduk laki-laki ataupun perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah dalam dan antarjenjang, serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan.

Pertimbangan-pertimbangan itulah yang perlu dikaji dan direnungkan kembali oleh subjek pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan mengembangkan model pendidikan multikultural. Dengan pembelajaran multikultural para lulusan akan dapat memiliki sikap kemandirian dalam menyadari dan menyelesaikan segala masalah kehidupannya melalui berbagai macam cara dan strategi pendidikan serta mengimplementasikannya yang memiliki visi dan misi yang selalu menegaskan dan menghargai pluralisme, demokrasi, dan humanisme.

A. Kerangka Konseptual Pendidikan Multikultural

Menurut Parekh (1997), multikulturalisme meliputi tiga hal, yaitu:

- a. berkenaan dengan budaya;
- b. merujuk pada keragaman yang ada;
- c. berkenaan dengan tindakan spesifik pada respons terhadap keragaman tersebut.

Akhiran "*isme*" menandakan suatu doktrin normatif yang diharapkan bekerja pada setiap orang dalam konteks masyarakat dengan beragam budaya. Proses dan cara multikulturalisme sebagai doktrin normatif menjadi ada dan implementasi gagasan-gagasan multikultural yang telah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan politis, dalam hal ini kebijakan pendidikan.

1. *Inkorporasi Pendidikan Multikultural ke dalam Program Pendidikan*

Inkorporasi pendidikan multikultural ke dalam program pendidikan anak memiliki harapan dan cita-cita (Pramono, 1999: 6), yaitu sebagai berikut.

- a. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai pluralisme budaya. Artinya, pluralisme budaya itu tidak hanya ditoleransi, tetapi juga dirangkul dan keragaman pengalaman manusia itu diharapkan memberikan kearifan. Pluralisme budaya itu seperti "*...having just as much value as biodiversity, it brings us into contact with the full range of human experience and wisdom (The World Commission on Culture and Development, 1998)*".
- b. Pendidikan multikultural merupakan sebuah alternatif dari membiarkan anak memperoleh sendiri pengalaman pluralisme budaya- sporadis dan fragmentaris. Cara seperti ini hanya akan menghasilkan *distorsi* dan *inadekuasi*.
- c. Pendidikan multikultural secara eksplisit mengakui dan menyambut keragaman dari warisan etnik yang ditemukan

dalam diri setiap orang yang disebut “orang Indonesia” sehingga menolak pandangan bahwa sekolah harus berupaya mencairkan perbedaan kultural atau sebaiknya hanya menoleransi pluralisme budaya.

- d. Pendidikan multikultural tidak memaksa atau menolak anak karena identitas suku, agama, ras, dan golongan. Keinginan keluarga perlu diketahui dan dihargai. Sebagian keluarga mungkin tidak dapat mengidentifikasi dengan pasti warisan etnik mereka dan keluarga lain mungkin tidak tertarik untuk melakukan hal itu. Masih ada keluarga yang memiliki warisan campuran sehingga mengidentifikasi semacam ini menjadi kurang bermakna. Yang lain mengetahui warisan mereka, tetapi tidak mau anak-anak mereka untuk membangun rasa identitas etnik yang kuat. Untuk keluarga-keluarga ini, Indonesia adalah satu-satunya identitas “etnik” yang dicari bagi anak-anak mereka. Pendidikan multikultural yang direncanakan secara cermat akan cocok bagi semua anak, baik yang mencari maupun tidak mencari rasa identitas etnik mereka.
- e. Pendidikan multikultural mengakui kebutuhan dan manfaat anak untuk berbagi bersama (*sharing*) diversitas warisan etnik mereka.
- f. Pendidikan multikultural mengakui pentingnya semua anak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi secara positif dan personal dengan anak-anak dari berbagai latar belakang sosioekonomi dan warisan budaya.
- g. Pendidikan multikultural memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk membantu berkembangnya *sense of self*. Ini terutama bagi anak-anak yang secara ekonomi tidak beruntung, apalagi berasal dari kelompok etnik yang relatif terisolasi atau yang memiliki sejarah penderitaan panjang akibat diskriminasi dan prasangka. Dengan belajar tentang dan bangga terhadap keunikan warisan budayanya, anak tersebut akan terbantu dalam menjawab pertanyaan “Siapakah saya?”. Pertanyaan yang sama juga akan dijawab oleh anak-anak yang melalui *sharing* dengan anak-anak dengan latar etnik lain. Apakah anak-anak itu mengembangkan identitas etnik yang kuat ataukah tidak, yang pasti mereka semua pada saat itu mempelajari

kekayaan multikultural dari identitas mereka sebagai orang Indonesia.

2. *Menerjemahkan Konsep Pluralisme Budaya ke dalam Praktik Pendidikan Multikultural*

Untuk mengembangkan sebuah model pembelajaran multikultural, diperlukan sebuah cara dalam menerjemahkan sebuah pendekatan (*approach*) menjadi sebuah atau lebih metode (*methods*), dan selanjutnya dikembangkan beberapa strategi atau teknik (*strategies*) yang konsisten dengan metode dan pendekatan yang telah diambil (Anthony, 1975).

Pada umumnya ke-*bhinneka*-an budaya mengacu pada sebuah situasi atau keadaan, bukan sebuah tujuan. Salah satu definisi ke-*bhinneka*-an budaya yang diadopsi dari *the National Coalition of Cultural Pluralism* adalah sebagai berikut:

"Cultural pluralism refers to a state of equal co-existence in a mutually supportive relationship within the boundaries or framework of one nation of people of diverse cultures, with significantly different patterns of belief, behavior, color and in many cases with different languages" (Suzuki, 1978: 45).

Untuk dapat disebut sebagai pluralisme budaya, harus terjadi ke-*ika*-an dalam ke-*bhinneka*-an. Setiap orang harus sadar akan jati dirinya, mengamankan jati diri tersebut, dan menghormati budaya lainnya sama seperti menghormati budayanya.

Pluralisme budaya memvisikan sebuah masyarakat multietnik yang saling menghormati dan mengapresiasi berbagai budaya, dan memiliki hak yang sama dalam kerangka pelestarian dan pengembangan tradisi budayanya masing-masing (Fantini, 1970).

Dalam wilayah politik dan kekuasaan kosa kata minoritas dan mayoritas terus teraktualisasi dalam berbagai dimensi kepentingan yang terselubung di dalamnya melalui embusan isu SARA (Lake, 2002: 103).

Menjadi penting artinya bagi bangsa Indonesia untuk menanamkan dan menjabarkan sekaligus mengajarkan ide tentang

pluralisme dalam relasi kehidupan sosial politik yang komprehensif. Tindakan yang paling efektif dan memiliki makna jangka panjang harus dilakukan melalui pendidikan.

Dalam kajian ini, konsep pluralisme budaya yang akan digunakan sebagai landasan konseptual dalam pengembangan model pendidikan multikultural diadopsi dari konsep Suzuki (1979), yaitu:

"....In my view, the development of an ideal society compatible with cultural pluralism would require the elimination of most the centralized bureaucracies, large coo rations, and over-congested urban centers and their replacement by a decentralized system of self-governing communities" (hlm. 46).

Berlandaskan pada konsep pluralisme budaya demikian, program pembelajaran multikultural yang akan dikembangkan merupakan sebuah program pendidikan yang menyediakan lingkungan belajar ganda kepada siswa (*multiple learning environments*), yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dasar akademis dan sosial siswa. Dengan demikian, model pembelajaran multikultural yang dikembangkan dan akan diarahkan pada pencapaian kompetensi-kompetensi sebagai berikut.

- a. Mengembangkan kompetensi akademis standar dan dasar (*standard and basic academic skills*) tentang nilai-nilai persatuan kesatuan, demokrasi, keadilan, kebebasan, persamaan derajat atau saling menghargai dalam keragaman budaya.
- b. Mengembangkan kompetensi sosial agar dapat menumbuhkan pemahaman (*a better understanding*) tentang latar belakang budaya sendiri dan budaya lain dalam masyarakat.
- c. Mengembangkan kompetensi akademis untuk menganalisis dan membuat keputusan yang cerdas (*intelligent decisions*) tentang isu-isu dan masalah keseharian (*real-life problems*) melalui sebuah proses demokratis atau inkuiri dialogis (*dialogical inquiry*).
- d. Membantu mengonseptualisasi dan mengaspirasikan sebuah masyarakat yang lebih baik, demokratis, dan memiliki persamaan derajat.

B. Reorientasi Pendidikan Berbasis Multikultural

1. *Revitalisasi Kurikulum*

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, kedudukan kurikulum menjadi sangat strategis dan penting. Pada dasarnya pembahasan pendidikan multikultural difokuskan pada hal-hal berikut.

- a. Pendidikan multikultural sebagai studi tentang etnisitas, yaitu penelaahan terhadap berbagai kelompok etnis/budaya, keunikan masing-masing etnik serta kontribusinya terhadap kebudayaan nasional.
- b. Pendidikan multikultural mempelajari dampak dari ketidakadilan. Dalam hal ini menggunakan pendekatan historis dan analisis hubungan sosiologis antarkelompok. Adapun penekannya pada kerusakan yang ditimbulkan praktik-praktik stereotipe, bias, dan diskriminasi terhadap potensi dalam masyarakat.
- c. Pendidikan multikultural sebagai proses pembelajaran. Implikasi dari pendidikan multikultural yang ketiga ini mencakup hasil serta proses instruksionalnya. Termasuk di dalamnya pemahaman para pendidik terhadap komponen utama dalam kurikulum, yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi.
- d. Pendidikan multikultural memerlukan kurikulum yang bersifat akomodatif dan komprehensif. Artinya, selain dapat memenuhi kebutuhan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap, juga memenuhi terwujudkan kerukunan dalam multikultural bangsa. Dengan harapan agar terwujud proses pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif walaupun dari berbagai ragam budaya.

Upaya revitalisasi kurikulum dalam mengakomodasi multikultural hendaknya mengidentifikasi hal-hal berikut.

- a. Faktor sosial budaya yang kemungkinan dapat menjadikan perbedaan individual peserta didik sebagai faktor-faktor yang konstruktif.

- b. Mengidentifikasi nilai-nilai yang sepatutnya diajarkan secara eksplisit ataupun implisit. Selain itu, penyusunan kurikulum juga harus mampu mengakomodasi terhadap perbedaan kultural individu peserta didik. Dengan harapan agar peserta didik dengan latar budaya yang berbeda dapat memperkaya kultural yang dimilikinya dari proses interaksi dengan peserta didik lainnya.

Pada akhirnya ragam kultur akan memberikan peluang bagi keutuhan dalam membentuk budaya bangsa. Dalam konteks ini membina ke-*bhinneka*-an budaya berarti memahami dan menghargai perbedaan yang ada di warga masyarakat bangsa ini. Jika memandang ke-*bhinneka*-an budaya sebagai kualitas dasar budaya kita, ke-*bhinneka*-an budaya itu harus menjadi bagian integral proses pendidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.

2. *Penerapan Empat Pilar Proses Pembelajaran*

Penerapan empat pilar proses pembelajaran ini pada setiap jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sangat diperlukan bagi terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional dan kaitannya dengan pendidikan multikultural. Sebagaimana dirancang oleh UNESCO melalui "*the International Commission on Education for the Twenty-first Century*" yang dipimpin oleh Jacques Delors, menyimpulkan bahwa untuk memasuki abad ke-21, pendidikan perlu berawal dari empat pilar proses pembelajaran, yaitu (1) *learning to know*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be*, dan (4) *learning to live together*.

a. *Penerapan "Learning to Know"*

Pada hakikatnya *learning to know* sejalan dengan penerapan paradigma ilmu pengetahuan pada proses pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan sejak pendidikan dasar. Melalui penerapan paradigma ini peserta didik akan memahami dan menghayati suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya.

Melalui proses pendidikan semacam ini dimulai sejak SD sampai perguruan tinggi diharapkan akan melahirkan generasi yang memiliki kepercayaan bahwa manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi diberi kemampuan untuk mengelola dan mendayagunakan alam bagi kemajuan taraf hidup manusia.

b. *Penerapan "Learning to Do"*

Penerapan pilar *learning to do* merupakan upaya agar peserta didik menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna, suatu proses pembelajaran yang dikenal dengan *active learning*. Melalui pendekatan belajar semacam ini, seorang peserta didik tidak harus selalu mencatat ceramah guru, tetapi ia diminta untuk membaca sendiri bahan yang akan dibahas di kelas, lalu membahasnya di kelas dengan guru dan kawan-kawannya.

Bentuk lain yang termasuk belajar aktif dapat berupa penugasan untuk membuat ringkasan buku atau artikel yang ditugaskan kepada peserta didik untuk membacanya. Selain itu, masih banyak bentuk belajar aktif lainnya yang memungkinkan peserta didik berkesempatan aktif, baik secara intelektual, motorik, maupun emosional.

Model belajar aktif dapat juga, dan seyogianya, diterapkan di semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan, dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Karena model belajar seperti ini akan memungkinkan tercapainya tujuan untuk mengembangkan manusia seutuhnya.

c. *Penerapan "Learning to Be"*

Pelaksanaan *learning to be* adalah prinsip pendidikan yang dirancang bagi terjadinya proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik mandiri. Rasa kemandirian akan tumbuh dari sikap percaya diri dan sikap percaya diri akan lahir dari pemahaman dan pengenalan dirinya secara tepat.

Berdasarkan hal tersebut, proses pembelajaran pertama harus memungkinkan peserta didik mengenal dirinya dengan penuh kebahagiaan. Hal ini sukar diperoleh dalam proses pembelajaran tradisional yang menekankan pada hafalan.

Kebahagiaan akan diperoleh melalui belajar aktif dan belajar tuntas. Pendekatan melalui penerapan paradigma ilmu pengetahuan, seperti pendekatan menemukan dan pendekatan menyelidik akan memungkinkan peserta didik menemukan kebahagiaan dalam belajar.

Pendekatan belajar aktif yang pada hakikatnya sama dengan pendekatan pertama juga memungkinkan kepada peserta didik untuk menemukan kebahagiaan dalam belajar yang pada akhirnya dapat menemukan dirinya.

Menemukan dan mengenal dirinya merupakan pangkal dari proses anak untuk tidak bergantung pada orang lain. Hal ini merupakan bentuk belajar yang akan menunjang terbentuknya pribadi yang mandiri sebagaimana dicita-citakan.

d. Penerapan "*Learning to Live Together*"

Penerapan pilar *learning to live together* di dunia internasional dipandang bertambah penting karena pada era globalisasi yang sarat dengan muatan teknologi dan perdagangan bebas, dimensi kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh setiap agama sering terlupakan karena tekanannya pada pertambahan nilai secara kebendaan. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antara manusia secara intensif dan terus-menerus sangatlah penting.

Pertentangan yang dasarnya perbedaan ras, agama, suku, keyakinan politik, dan kepentingan ekonomi yang masih sering terjadi perlu dihindarkan. Oleh karena itu, pendidikan nilai kemanusiaan, moral, dan agama yang melandasi hubungan antarmanusia perlu diintensifkan.

3. Integrasi Empat Pilar dengan Pendidikan yang Berbasis Multikultural

Keempat pilar tersebut secara potensial dapat diintegrasikan dengan pendidikan yang berbasis multikultural. Dengan demikian, budaya damai akan dapat terwujud berdasarkan multukultural bangsa Indonesia.

Dalam hal ini keempat pilar proses pembelajaran diperuntukkan bagi terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional, berbagai strategi perlu dikembangkan, antara lain sebagai berikut.

a. *Pengembangan Kurikulum*

Perlunya dikembangkan sistem kurikulum yang memungkinkan dapat berlangsungnya proses pembelajaran yang secara epistemologis, psikologis, dan sosial/moral relevan. Salah satu konsekuensi dari penerapan ini adalah pembaharuan kurikulum dengan mengutamakan materi yang esensial dan sistem evaluasi yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional.

b. *Peningkatan Kualitas Profesional Tenaga Kependidikan*

Peningkatan kualitas profesional tenaga kependidikan melalui penyempurnaan sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan guru, serta pembinaan guru untuk meningkatkan kewibawaan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

c. *Pengembangan Sistem Pengelolaan Pendidikan*

Perlu pengembangan sistem pengelolaan pendidikan dengan menegakkan sekolah/lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai-nilai yang sesuai dengan tuntutan masyarakat maju yang berdasarkan Pancasila.

d. *Mengembangkan Sistem Pendidikan Tinggi*

Perlu mengembangkan sistem pendidikan tinggi, terutama universitas/institut yang mampu melaksanakan doktrin Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga perguruan tinggi dapat menjadi agen pembangunan masyarakat daerah pada khususnya dan negara bangsa pada umumnya.

e. *Menyamakan Persepsi Masyarakat*

Perlu menyamakan persepsi masyarakat, terutama orang tua, tokoh masyarakat, dan pemimpin formal tentang perlunya

memberikan dukungan bagi terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

C. Tema Pendidikan Multikultural di Indonesia

Yang dijadikan prinsip dasar, apabila bangsa ini ingin menjadi kuat pada era demokrasi, diperlukan sikap saling menerima dan menghargai dari setiap orang yang beraneka ragam sehingga dapat saling membantu, bekerja sama membangun negara lebih baik. Kita telah memiliki dasar filosofis negara, Pancasila yang diimplementasikan dalam UUD 1945. Namun, dasar itu akan kuat jika sikap menghargai orang lain dikembangkan.

Terjemahan dari visi pendidikan multikultural, sebagaimana menjadi banyak tawaran dan gagasan para ilmuwan selama ini, dalam konteks Indonesia memiliki keserasian filsafati dari pesan dan nilai-nilai dasar Pancasila. Pada beberapa tema substansi dan semangat pokok, terdapat kesamaan unsur-unsur usaha. Hal ini dapat dikaji dalam dimensi-dimensi yang sangat mendasar, seperti ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan/kerakyatan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Tema-tema besar tersebut secara implisit menjadi pesan bagi pencapaian visi pendidikan multikultural dan sepaham dengan ajaran Pancasila. Sejalan dengan pemikiran Purwasito (2003), terkait dengan bentuk sosialisasi dan membudayakan *sharing of culture antaretnis*, akan lebih tepat jika materi yang diajarkan berlandaskan dasar-dasar falsafah Pancasila sehingga dalam sosialisasi tersebut tidak terjadi superioritas budaya tertentu dan dianggap inferioritas pada budaya lain.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan mendekatkan berbagai gagasan dan keyakinan yang tumbuh dan berkembang dalam etnisitas, membuka cita-cita, harapan-harapan hidup yang dimiliki oleh setiap individu dari setiap daerah.

1. Tema Ketuhanan

Parsudi Suparlan (2001) mengemukakan bahwa agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran yang tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan di

akhirat (setelah mati), yaitu sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beradab dan manusiawi, yang berbeda dari cara-cara hidup makhluk lainnya.

Agama sebagai keyakinan dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan dan menjadi pendorong atau penggerak serta pengontrol dari tindakan-tindakan anggota masyarakat untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agamanya. Madjid (2001) mengatakan bahwa yang relevan dalam kehidupan masyarakat adalah cara suatu agama dipahami dan dihayati dalam kehidupan nyata, dengan berbagai dampaknya yang mungkin tidak seluruhnya positif bagi kehidupan manusia.

Ada dua dimensi keberagamaan yang memiliki keterkaitan dalam kehidupan umat pemeluk agama (Madjid, 2001), yaitu:

- a. agama oleh pemeluknya dijadikan sebagai pandangan hidup yang menjelaskan keberadaan manusia di dunia, menjelaskan arah dan tujuan hidup manusia;
- b. agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur kehidupan manusia antara sesama manusia dan dengan makhluk Tuhan lainnya.

Dengan demikian, agama juga berkaitan erat dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat, seperti kekerabatan, kepemimpinan politik, ekonomi, dan sebagainya sehingga agama bersifat operasional dalam kehidupan sosial manusia. Ada keteraturan dan kedisiplinan yang seharusnya ditaati oleh manusia dalam melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa.

Budaya disiplin mengandung semangat perhitungan tidak hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi yang lebih ditekankan manfaatnya untuk kemudian hari. Sikap disiplin (Madjid, 1997) mengharuskan adanya keinsafan bahwa hidup seorang individu tidak terlepas dari hidup orang banyak. Unsur terpenting dalam membangun sikap disiplin adalah adanya kesediaan untuk tidak mementingkan dan mendahulukan kesenangan diri sendiri dan menyadari dirinya adalah bagian dari keseluruhan masyarakat.

Oleh karena itu, tema ketuhanan dimaksudkan untuk membentuk sikap sadar terhadap nilai-nilai, norma-norma religiusitas siswa, meyakini dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya dalam berkehidupan pada masyarakat yang beragam sehingga terjalin keharmonisan hidup dalam keragaman. Tema ketuhanan mencakup aspek-aspek berikut.

- a. Ketakwaan merupakan suatu sikap dan perilaku siswa yang mencerminkan ketaatan, ketundukan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Indikatornya, antara lain:
 - 1) Keimanan, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan keyakinan dan kepercayaan individu/siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Ketaatan, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan ketundukan dan kepatuhan dalam menjalani perintah dan menghindari larangan agama.
- b. Toleransi, yaitu suatu sikap menenggang rasa (menghargai, membolehkan) orang lain untuk beragama, berkepercayaan, berpendirian, dan berpendapat berbeda dengan diri individu. Indikatornya, antara lain:
 - 1) tenggang rasa, yaitu menghormati pilihan dan cara berekspresi orang lain dalam menjalankan ibadah yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - 2) kesadaran, yaitu sikap sadar diri individu dalam memahami, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya serta sikap sadar dalam mengakui adanya keragaman keyakinan yang diyakini orang lain.

2. *Tema Kemanusiaan*

Dalam sistem nilai budaya bangsa Indonesia nilai tolong-menolong mengandung empat konsep (Muhiet, 2001), yaitu sebagai berikut.

- a. Manusia di dunia tidak hidup sendirian, tetapi dikelilingi oleh masyarakatnya, komunitasnya, dan alam sekitarnya.

- b. Secara hakiki manusia akan bergantung pada sesamanya. Oleh karena itu, manusia harus berusaha memelihara hubungan baik dengan sesamanya atas dasar sama rata sama rasa. Selain itu, mereka harus bersifat konform, guyub, berbuat sama, dan bersama dengan sesamanya dalam komunitas berasas pada jiwa sama tinggi dan sama rendah.

Tema kemanusiaan dapat membentuk sikap peduli dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sesama manusia.

Tema kemanusiaan mencakup aspek humanis dan kesederajatan.

- a. Humanis adalah sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Indikatornya:
 - 1) mencintai sesama manusia;
 - 2) gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- b. Kesederajatan adalah sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Indikatornya, antara lain:
 - 1) persamaan derajat dilihat dari agama, suku bangsa, ras, gender, dan golongan;
 - 2) persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak;
 - 3) persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, sebagai individu, dan anggota masyarakat.

3. *Tema Persatuan dan Kesatuan*

Semangat kebangsaan (Purwasito, 2003) diterjemahkan sebagai nasionalisme, yaitu cinta tanah air atau patriotisme. Semangat kebangsaan adalah keinginan secara sukarela menerima orang lain dalam kehidupan bersama atau pengakuan yang tumbuh dari kesadaran seseorang untuk bersedia hidup berbagi dan bekerja sama menjalin persaudaran dalam format bangsa Indonesia.

BAB 9

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PRAKSIS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Fenomena pendidikan di Indonesia menghadapi arus perputaran globalisasi. Gelombang demokrasi menuntut pengakuan perbedaan dalam tubuh bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku dan agama. Dengan demikian, pencarian bentuk pendidikan alternatif mutlak diperlukan, yaitu bentuk pendidikan yang berusaha menjaga kebudayaan suatu masyarakat dan memindahkannya kepada generasi berikutnya, menumbuhkan tata nilai, memupuk persahabatan antara siswa yang beraneka ragam suku, ras, dan agama, serta mengembangkan sikap saling memahami. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural adalah jawaban atas beberapa problematika kemajemukan itu.

Pendidikan multikultural adalah konsep atau ide sebagai rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, ataupun negara.

A. Paradigma Pendidikan Multikultural

1. Kemajemukan sebagai Ciri Khas Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis. Kemajemukan telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kemajemukan ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif horizontal dan vertikal. Dalam perspektif horizontal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, dan budaya. Adapun dalam perspektif vertikal, kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, dan tingkat sosial budaya.

Fenomena kemajemukan ini bagaikan pisau bermata dua, satu sisi memberikan dampak positif, yaitu memiliki kekayaan khazanah budaya yang beragam, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif karena kadang-kadang keragaman ini dapat memicu konflik antarkelompok masyarakat yang dapat menimbulkan instabilitas, baik secara keamanan, sosial, politik, maupun ekonomi.

Dalam menghadapi pluralisme budaya, diperlukan paradigma baru yang lebih toleran dan elegan untuk mencegah dan memecahkan masalah benturan budaya, yaitu paradigma pendidikan multikultural. Hal ini penting untuk mengarahkan anak didik dalam menyikapi realitas masyarakat yang beragam sehingga memiliki sikap apresiatif terhadap keragaman perbedaan. Maraknya kerusuhan dan konflik yang berlatar belakang suku, adat, ras, dan agama menunjukkan bahwa pendidikan telah menciptakan kesadaran akan pentingnya multikulturalisme.

2. Bangunan Paradigma Pendidikan Multikultural

Bangunan paradigma pendidikan multikultural yang ditawarkan Zamroni (2011) adalah sebagai berikut.

- a. Pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat.
- b. Pendidikan multikultural bukan sekadar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran.
- c. Pendidikan multikultural mentransformasi kesadaran yang memberikan arah transformasi praktik pendidikan.

- d. Pengalaman menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang menciptakan ketimpangan semakin membesar.
- e. Pendidikan multikultural bertujuan untuk berbuat sesuatu, yaitu membangun jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, dan kultur sekolah untuk membangun visi sekolah yang menjunjung kesetaraan.

B. Urgensi Pendidikan Multikultural di Indonesia

1. Masa Depan Memerlukan Kreativitas

Menurut Gibson (Djohar, 2003: 85), masa depan bangsa memiliki kriteria khusus yang ditandai oleh hiperkompetisi, suksesi revolusi teknologi serta dislokasi dan konflik sosial, menghasilkan keadaan yang nonlinier dan sangat tidak dapat diperkirakan dari keadaan masa lampau dan masa kini.

Masa depan hanya dapat dihadapi dengan kreativitas meskipun posisi keadaan sekarang memiliki peran penting untuk memicu kreativitas. Perubahan keadaan yang nonlinier ini tidak akan dapat diantisipasi dengan cara berpikir linier.

Pemikiran linier dan rasional yang kini dikembangkan tidak lagi fungsional untuk mengakomodasi perubahan keadaan yang akan terjadi. Keadaan ini seharusnya dapat mendorong untuk memiliki desain pendidikan masa depan yang memungkinkan peserta didik dan pelaku praksis pendidikan dapat mengaktualisasikan dirinya.

2. Munculnya Konflik sebagai Konsekuensi Dinamika Kohesivitas Sosial

Bangsa dengan beragam kultur memiliki resistensi yang tinggi terhadap munculnya konflik sebagai konsekuensi dinamika kohesivitas sosial masyarakat. Akar munculnya konflik dalam masyarakat multikultur disebabkan oleh:

- a. adanya perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi (*aces to economic resources and to means of production*);

- b. perluasan batas-batas sosial budaya (*social and cultural borderline expansion*);
- c. benturan kepentingan politik, ideologi, dan agama (*conflict of political, ideology, and religious interest*).

Paparan tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan multikultural menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendesak untuk diimplementasikan dalam praksis pendidikan di Indonesia. Hal itu disebabkan pendidikan multikultural dapat berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Melalui pembelajaran yang berbasis multikultur, siswa diharapkan tidak tercerabut dari akar budayanya. Selain itu, pendidikan multikultural sangat relevan dipraktikkan dalam demokrasi seperti saat ini.

3. *Spektrum Kultur Masyarakat Indonesia Merupakan Tantangan*

Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang sangat beragam merupakan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk mengolah ragam perbedaan tersebut dapat dijadikan aset, bukan sumber perpecahan. Pada era globalisasi ini pendidikan multikultural memiliki tugas ganda, yaitu menyatukan bangsa yang terdiri atas berbagai macam budaya dan harus menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar yang masuk ke negeri ini.

Pendidikan multikultural juga dapat dimanfaatkan untuk membina siswa agar tidak tercerabut dari akar budayanya. Hal ini disebabkan pertemuan antarbudaya pada era globalisasi ini dapat menjadi ancaman serius bagi siswa. Dalam kaitan ini siswa perlu diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan.

C. **Praktik Pendidikan Multikultural di Indonesia**

Sampai saat ini pendidikan multikultural masih sebatas wacana. Praktik pendidikan multikultural di Indonesia tampaknya tidak dapat dilaksanakan seratus persen ideal seperti di Amerika Serikat

walaupun ditinjau dari keragaman budaya banyak kemiripan. Hal itu disebabkan oleh perjalanan panjang sejarah penyelenggaraan pendidikan yang banyak dilatarbelakangi oleh primordialisme. Misalnya, pendirian lembaga pendidikan berdasarkan latar belakang agama, daerah, perseorangan, ataupun kelompok. Oleh karena itu, praktik pendidikan multikultural di Indonesia dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar multikultural.

1. Bentuk Pendidikan Multikultural

Apa pun dan bagaimanapun bentuk dan model pendidikan multikultural seharusnya tidak dapat lepas dari tujuan umum pendidikan multikultural, yaitu:

- a. mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses menciptakan sistem dan menyediakan pelayanan pendidikan yang setara;
- b. menghubungkan kurikulum dengan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, budaya sekolah, dan konteks lingkungan sekolah untuk membangun visi “lingkungan sekolah yang setara”.

Prinsip fleksibilitas pendidikan multikultural disarankan oleh Gay (Zamroni, 2011: 150). Ia mengatakan bahwa sangat keliru jika melaksanakan pendidikan multikultural harus dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah atau monolitik. Ia mengusulkan agar pendidikan multikultural diperlakukan sebagai pendekatan untuk memajukan pendidikan secara utuh dan menyeluruh.

Pendidikan multikultural juga dapat diberlakukan sebagai alat bantu untuk menjadikan warga masyarakat lebih toleran, bersifat inklusif, memiliki jiwa kesetaraan dalam hidup bermasyarakat, dan senantiasa berpendirian. Masyarakat secara keseluruhan akan lebih baik ketika warga masyarakat memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki bagi masyarakat sebagai keutuhan.

Gay merekomendasikan agar pembelajaran perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari kultur masyarakat

dapat berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warganya.

Dalam pandangan Zamroni (2011), pendidikan multikultural diusulkan untuk dapat dijadikan instrumen rekayasa sosial melalui pendidikan formal. Artinya, institusi sekolah harus berperan dalam menanamkan kesadaran hidup dalam masyarakat multikultural serta mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi untuk mewujudkan kebutuhan serta kemampuan bekerja sama dengan segala perbedaan yang ada.

Sekolah harus dipandang sebagai suatu masyarakat, masyarakat kecil. Artinya, yang ada di masyarakat harus ada pula di sekolah. Perspektif sekolah sebagai masyarakat kecil memiliki implikasi bahwa siswa dipandang sebagai individu yang memiliki karakteristik yang terwujud dalam bakat dan minat serta aspirasi yang menjadi hak siswa.

Pada level sekolah, dengan adanya berbagai perbedaan yang dimiliki tiap-tiap individu, sekolah harus memerhatikan:

- a. setiap siswa memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda-beda, termasuk kebutuhan personal dan sosial;
- b. kebutuhan vokasi dan karier;
- c. kebutuhan psikologi dan perkembangan moral spiritual.

Pada level masyarakat, yang kebutuhannya perlu dipenuhi mencakup:

- a. kebutuhan akademis;
- b. kebutuhan psikologis;
- c. kebutuhan kebersamaan;
- d. kebutuhan rasa aman.

Pada prinsipnya pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sekolah harus dapat dijadikan tempat yang aman, memiliki suasana kekerabatan, dan terdapat semangat saling mendukung.

Berkaitan dengan itu, proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan individu secara utuh yang mencakup intelektual,

sosial, dan moral spiritual. Tekanan dan dorongan siswa untuk bekerja keras tidak hanya bersifat ekstrinsik, tetapi juga harus ditekankan pada penggunaan *intrinsik motivation*.

2. *Perspektif Hasil Pembelajaran, Pendidikan Multikultural*

Berdasarkan perspektif hasil pembelajaran, pendidikan multikultural memiliki tiga sasaran yang dikembangkan pada diri setiap siswa, yaitu sebagai berikut.

- a. Pengembangan identitas kultural, yaitu kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi dirinya dengan etnis tertentu. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan kelompok etnis serta menimbulkan kebanggaan dan percaya diri sebagai warga kelompok etnis tertentu.
- b. Hubungan interpersonal, yaitu kompetensi untuk melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain, dengan senantiasa mendasarkan pada persamaan dan kesetaraan serta menjauhi sifat syakwasangka dan stereotip.
- c. Memberdayakan diri sendiri, yaitu kemampuan untuk mengembangkan secara terus-menerus apa yang dimiliki berkaitan dengan kehidupan multikultural.

3. *Kompetensi Kultural*

Secara detail, kompetensi kultural mencakup hal-hal berikut.

- a. Kompetensi individu untuk menerima, menghormati, dan membangun kerja sama dengan siapa pun yang memiliki perbedaan dari dirinya.
- b. Kompetensi kultural merupakan hasil dari kesadaran atas pengetahuan dan “bias kultural” yang dimilikinya atau sebagai faktor yang memengaruhi perbedaan kultur.
- c. Proses pengembangan kompetensi kultural memerlukan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang memungkinkan seseorang memahami dan berinteraksi

secara efisien dengan orang yang memiliki perbedaan kultur.

Berkaitan dengan kompetensi kultural dan cara kompetensi tersebut dibentuk, Papadopoulos dan Lee (2003) mengajukan model pengembangan kompetensi kultural sebagai berikut.

- a. Kompetensi kultural dibentuk oleh berbagai faktor, yaitu penguasaan pengetahuan, *critical thinking*, daya kritis, kemampuan mengembangkan sesuatu, dan kemampuan praktis. Faktor-faktor tersebut dinamis terus bergerak membentuk kompetensi kultural.
- b. Pendidikan multikultural sangat relevan dengan pendidikan demokrasi di masyarakat plural seperti Indonesia, yang menekankan pada pemahaman akan multietnis, multiras, dan multikultur yang memerlukan konstruksi baru atas keadilan, kesetaraan dan masyarakat yang demokratis, direspons untuk menjaga keutuhan bangsa yang kaya akan multikultur.
- c. Pendidikan multikultural merupakan wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia, serta pengurangan atau penghapusan jenis prasangka atau *prejudice* untuk kehidupan masyarakat yang adil dan maju. Pendidikan multikultural juga dapat dijadikan instrumen strategis untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya.
- d. Dalam menghadapi pluralisme budaya diperlukan paradigma baru yang lebih toleran dan elegan untuk mencegah dan memecahkan masalah benturan budaya, yaitu perlunya dilaksanakan pendidikan multikultural.

D. Pendidikan Multikultural Berbasis Karakter Keindonesiaan

Pendidikan diharapkan mampu mentransformasikan peserta didik dari belum dewasa menjadi dewasa. Ciri manusia dewasa adalah manusia yang memiliki karakter. Oleh karena itu, setiap orang dewasa memiliki karakter sebagaimana dirinya sendiri. Adapun pendidikan mendorong seseorang menjadi diri sendiri.

BAB 10

PENERAPAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Pendidikan multikultur relatif baru dikenal sebagai pendekatan yang dianggap perlu bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikultur yang dikembangkan di Indonesia sejalan dengan pengembangan demokrasi yang dilaksanakan sebagai *counter* terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati-hati, akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan nasional.

Model pendidikan di Indonesia ataupun di negara-negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang digunakan untuk mencapainya. Penambahan informasi tentang keragaman budaya merupakan model pendidikan multikultur yang mencakup revisi atau materi pembelajaran dan termasuk revisi buku-buku teks. Walaupun belum diterima, usaha ini mulai membuka mata sebagian masyarakat akan pentingnya perspektif baru tentang perang agar tragedi kemanusiaan tidak terulang kembali.

Di Indonesia masih diperlukan usaha yang panjang dalam merevisi buku-buku teks agar mengakomodasi kontribusi dan

partisipasi yang lebih inklusif bagi warga dari berbagai latar belakang dalam pembentukan Indonesia. Indonesia juga memerlukan materi pembelajaran yang dapat mengatasi konflik berkepanjangan di berbagai wilayah.

A. Pentingnya Penerapan Pendidikan Multikultural pada Tingkat Satuan Pendidikan

Pendidikan multikultur di Indonesia perlu menggunakan kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Gorski (1980), pendidikan multikultur dapat mencakup tiga jenis transformasi, yaitu transformasi diri, transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, serta transformasi masyarakat.

1. *Transformasi Level Diri (Transformation of Self)*

Kata “konsep” mengacu pada pengertian “rancangan”. Sebuah rancangan biasanya memiliki berbagai variasi bergantung pada tujuan yang ingin dicapai dengan rancangan tersebut. Demikian pula dengan konsep transformasi diri yang diuraikan dalam buku ini tentu bukanlah suatu konsep yang baku, melainkan terlahir dari pengalaman yang diharapkan dapat bermanfaat. Ada tiga langkah besar yang dapat ditempuh dalam melakukan transformasi diri, yaitu mengubah sikap mental, mengubah pola hidup, dan fokus pada tujuan.

a. *Dengan Mengubah Sikap Mental, Cara Berpikir Akan Berubah*

Kita diajak untuk merevisi dan jika dianggap perlu merombak cara berpikir yang mungkin selama ini tanpa kita sadari terdistorsi atau “terinfeksi” oleh suatu kejadian dalam hidup kita. Kemungkinan lain adalah tertular oleh pola pikir yang keliru dari lingkungan tempat kita berada.

Mengubah sikap mental dapat diawali dengan bertanya:

- 1) Apa arti hidup bagi saya?
- 2) Apa yang saya cari dalam hidup ini?
- 3) Apa arti keluarga bagi saya?

- 4) Apa arti seorang sahabat bagi saya?
- 5) Apakah hidup saya berarti bagi keluarga saya?
- 6) Apakah hidup saya berarti bagi sahabat saya?
- 7) Apakah hidup saya memiliki makna untuk hidup orang lain?
- 8) Apakah saya peduli pada penderitaan orang lain?
- 9) Apakah saya pernah berupaya meringankan beban orang lain?

b. Dengan Mengubah Mindset (Cara Berpikir), Pola Hidup atau Kebiasaan Akan Berubah

Berubahnya cara berpikir akan mengubah pola hidup. Kebiasaan, sikap, tutur kata, penampilan, *body language*, lingkungan pergaulan, perasaan, keputusan yang diambil, kepedulian, dan akhirnya dapat fokus pada tujuan hidup

Dengan berubahnya sikap mental, cara berpikir, dan pola hidup, akan lebih mudah fokus pada tujuan/cita-cita hidup yang ingin dicapai. Kata "fokus" adalah mutlak menjadi bagian dari keberhasilan.

Jika fokus memiliki kekuatan dahsyat. Jika kita menghadapi sebuah kaca pembesar pada sinar matahari, harus diarahkan hingga fokus. Fokus tersebut akan menghadirkan titik api yang mampu membakar. Jika tidak fokus, akan bias. Cahaya yang bias hanya akan menghasilkan bayangan, bukan sesuatu yang konkret.

c. Jika Semuanya Telah Berubah, Hidup Pun Akan Berubah

Jika kita telah mengubah sikap mental dan cara berpikir yang menghasilkan terjadinya perubahan pola hidup dan kebiasaan serta fokus pada tujuan hidup, langkah-langkah ini akan mengantarkan ke jenjang transformasi diri yang sejati.

Transformasi pada level diri dapat digambarkan dengan sikap positif terhadap perbedaan dan keberagaman yang belum terjadi. Transformasi tersebut merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pendidikan multikultural.

2. *Transformasi Level Sekolah (Transformation of School and Schooling)*

Transformasi pada level sekolah digambarkan melalui lima dimensi pendidikan multikultural, yaitu sebagai berikut.

a. *Integrasi Materi (Content Integration)*

Integrasi materi merupakan upaya guru memberikan atau menggunakan contoh dan materi dari berbagai budaya dan kelompok untuk mengajarkan konsep kunci, prinsip, teori, dan lain-lain ketika mengajarkan satu topik atau mata pelajaran tertentu dengan menyisipkan akan adanya kesadaran perbedaan budaya. Contoh: ketika mengajarkan topik tumbuhan berbiji belah, guru menyinggung bahwa kopi adalah salah satu contoh dikotil, kemudian dikaitkan dengan masyarakat Lampung, Aceh, dan Jawa yang memanfaatkan kopi dan tradisi sebagai minuman tradisi masing-masing.

b. *Proses Pembentukan Pengetahuan (Knowledge Construction Process)*

Proses pembentukan pengetahuan merupakan upaya membantu siswa untuk memahami, mencari tahu, dan menentukan cara suatu pengetahuan atau teori pada dasarnya secara nyata tercipta karena adanya pengaruh budaya, kalangan, dan kelompok tertentu dengan status sosial yang terjadi pada saat itu. Contoh: Galileo menghasilkan teori helioentris yang mengemukakan asumsi geosentris yang terjadi ketika pengaruh agama saat itu sangat dominan. Galileo dihukum mati karena teorinya, tetapi akhir-akhir ini teori tersebut digunakan oleh masyarakat dunia.

c. *Reduksi Prasangka (Prejudice Reduction)*

Reduksi prasangka merupakan upaya guru dalam membantu siswa mengembangkan sifat positif terhadap perbedaan dari sisi suku, budaya, ras, gender, status sosial, dan lain-lain. Contoh: jika guru mendorong sikap atau prasangka yang menganggap bahwa orang Papua yang berkulit hitam adalah terbelakang, bodoh, dan lain-lain dalam proses interaksi di sekolah, hal tersebut harus

dihindari. Guru seharusnya berkewajiban meluruskan asumsi dan prasangka tersebut. Salah satu cara mengurangi prasangka ini adalah melibatkan siswa melakukan aktivitas bersama dengan orang-orang dari berbagai status sosial, gender, ras, dan lain-lain.

d. *Pendidikan atau Perlakuan Pedagogik Tanpa Pandang Bulu (Equity Pedagogy)*

Pendidikan atau perlakuan pedagogik tanpa pandang bulu adalah upaya guru memperlakukan secara sama dalam proses pembelajaran di kelas. Kenyataan ini akan terlihat dari metode yang digunakan, cara bertanya, penunjukan siswa, dan pengelompokan. Contoh: guru senantiasa menunjukkan seorang siswa sebagai ketua kelompok karena siswa tersebut berasal dari kalangan status sosial tertentu lebih tinggi daripada yang lain.

e. *Pemberdayaan Budaya Sekolah dan Struktur Sosial (Empowering School Culture and Sosial Structure)*

Pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial merupakan proses menstrukturisasi dan reorganisasi sekolah sehingga siswa dari beragam ras, suku, dan kelas sosial mengalami atau merasakan pemberdayaan ataupun persamaan budaya. Semangat multi-kulturalisme akan tercermin dalam segala aktivitas sekolah sehingga menuntut adanya perubahan baik dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, kebijakan sekolah, struktur organisasi, iklim sekolah, dan lain-lain.

3. *Transformasi Level Masyarakat (Transformation of Society)*

Masyarakat adalah suatu konsep sosial. Terdapat perbedaan yang nyata antara konsep masyarakat dan konsep kolektif. Memertukarkan keduanya mengandung kerancuan pemikiran. Konsep kolektif menggambarkan kumpulan manusia orang per orang secara fisik yang biasanya didasarkan atas karakteristik uniformitas. Sebaliknya, konsep masyarakat menggambarkan berkumpulnya manusia atas dasar sukarela yang tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga berupa keterikatan dan keterkaitan batiniah. Dalam

konsep masyarakat terkandung makna kesatuan antara ke-bhinnekaan (*diversity*) dan kekhasan (*uniqueness*). Ke-bhinnekaan dengan demikian menjadi sifat tuntutan masyarakat agar komunitas yang dinamis selalu terwujud. Konsep masyarakat mengenal kepentingan bersama yang tanpa mengorbankan kepentingan individu.

Oleh karena itu, "*what is common to all*" merupakan pertanyaan mendasar yang perlu dikomunikasikan atau didialogkan antaranggota untuk menemukan *common demonitator* dalam menjalin keterkaitan dan saling kebergantungan dengan tujuan yang sama.

Masyarakat mengalami proses evolusi. Proses evolusi ini pada dasarnya adalah proses rekonstruksi secara berkesinambungan, yaitu yang lama secara perlahan digantikan yang baru. Proses evolusi merupakan proses meningkatnya kompleksitas suatu sistem. Meningkatnya kompleksitas ini diimbangi pula oleh semakin meningkatnya stabilitas sistem tersebut. Daya inovasi masyarakat merupakan kunci terjadinya proses perubahan itu. Hanya melalui inovasi yang terjadi secara terus-menerus masyarakat memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang sering diciptakannya. Dalam dua abad terakhir ini, proses konstruksi-rekonstruksi sistem sosial terjadi semakin cepat sebagai akibat revolusi teknologi.

Konstruksi masyarakat apa yang dapat menghasilkan suasana seperti itu pada zaman globalisasi? Berdasarkan berbagai literatur pada zaman globalisasi terdapat empat ciri yang bersifat esensial, yaitu:

- 1) *economic drive* merupakan pemacu perilaku masyarakat;
- 2) *monetary incentives* hampir sebagai satu-satunya tolok ukur umum;
- 3) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai *instrument* utama keunggulan suatu bangsa;
- 4) keadilan atau ketidakadilan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Dengan demikian, terwujudnya masyarakat baru yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan yang dicita-citakan sangat

BAB 11

MODEL PEMBELAJARAN MULTIKULTURAL

Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan berkomunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

Pendidikan multikultural memiliki dua peran utama, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar pada era globalisasi dan menyatukan bangsa yang terdiri atas berbagai macam budaya. Apabila kedua peran itu dapat dicapai, disintegrasi bangsa dan munculnya konflik dapat dihindarkan.

Pendidikan multikultural bertujuan mengembangkan manusia Indonesia yang cerdas. Manusia cerdas tidak hanya cerdas dan berkemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan menyelesaikan masalah, tetapi juga bermoral, bersikap demokratis, dan empati terhadap orang lain. Manusia cerdas menghargai diri sendiri dan orang lain dari berbagai latar belakang berbeda.

Meskipun pendidikan kebangsaan dan ideologi telah banyak diberikan, pendidikan multikultural masih belum diberikan dengan proporsi yang benar. Model pembelajaran yang berkaitan dengan

kebangsaan yang saat ini diterapkan masih kurang memadai sebagai sarana pendidikan untuk menghargai setiap suku bangsa. Pada kenyataannya masih sering terjadi konflik yang menunjukkan pemahaman tentang toleransi sangat kurang.

A. Konsep Pembelajaran Multikultural

1. *Pengertian Pembelajaran Multikultural*

Pembelajaran multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas (Sleeter and Grant, 1988).

Pembelajaran multikultural (*multicultural education*) merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Strategi ini sangat bermanfaat, sekurang-kurangnya bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat membentuk pemahaman bersama atas konsep kebudayaan, perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi dalam arti yang luas (Liliweri, 2005).

Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas multikultural dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya (Banks, 1993).

Dengan demikian, pembelajaran multikultural adalah proses pendidikan yang dapat membimbing, membentuk, dan mengondisikan siswa agar memiliki mental atau karakteristik terbiasa hidup di tengah-tengah perbedaan yang sangat kompleks, baik perbedaan ideologi, perbedaan sosial, perbedaan ekonomi, maupun perbedaan agama. Dengan pembelajaran multikultural para lulusan akan memiliki sikap kemandirian dalam menyadari dan menyelesaikan segala masalah kehidupannya.

Syafiq A. Mughni (1998) menjelaskan bahwa inti pembelajaran pendidikan multikultural, yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya dialog secara aktif dan partisipatoris. Artinya, selama proses pembelajaran harus dibiasakan berdialog secara intensif

dan partisipatoris sehingga siswa mampu mengembangkan pengetahuannya secara bebas dan independen.

- b. Adanya toleransi antarsiswa, antara siswa dan guru, serta antarguru. Toleransi ini bertujuan membudayakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik perbedaan pendapat maupun ideologi yang dilakukan oleh guru ataupun siswa.

2. Tujuan Pembelajaran Multikultural

Berdasarkan tujuan pendidikan multikultural, terdapat tiga macam tujuan, yaitu tujuan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan pembelajaran (Lawrence J. Saha, 1997: 349).

- a. Aspek sikap (*attitudinal goals*), yaitu untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik.
- b. Aspek pengetahuan (*cognitive goals*), yaitu untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain, dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural, serta pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural.
- c. Aspek pembelajaran (*instructional goals*), yaitu untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran; memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antarbudaya; mengembangkan keterampilan interpersonal; memberikan teknik-teknik evaluasi; membantu klarifikasi nilai; menjelaskan dinamika kultural.

Kegiatan belajar-mengajar bukan ditujukan agar peserta didik menguasai sebanyak mungkin materi ilmu atau nilai, melainkan cara setiap peserta didik mengalami sendiri proses berilmu serta hidup di ruang kelas dan lingkungan sekolah. Pendidikan multikultural membantu siswa mengerti, menerima, dan menghargai orang dari

suku, budaya, dan nilai berbeda. Oleh sebab itu, anak didik perlu diajak melihat nilai budaya lain sehingga mengerti secara dalam dan dapat menghargainya. Modelnya bukan dengan menyembunyikan budaya lain atau menyeragamkan sebagai budaya nasional sehingga budaya lokal hilang.

3. *Dasar-dasar Pembelajaran Multikultural*

a. *Unsur Kebudayaan*

Pembelajaran tidak terlepas dari unsur kebudayaan karena;

- 1) kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks;
- 2) kebudayaan merupakan prestasi manusia yang materiel;
- 3) kebudayaan dapat berbentuk fisik;
- 4) kebudayaan dapat berbentuk perilaku;
- 5) kebudayaan merupakan realitas yang objektif;
- 6) kebudayaan tidak terwujud dalam kehidupan manusia yang terasing.

Berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang beragam kompleks dan terintegrasi, proses pembelajaran harus menggunakan multidisipliner, seperti filsafat, sosiologi, antropologi, biologi, psikologi, komunikasi.

b. *Keanekaragaman Budaya yang Ada di Masyarakat*

Keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat harus dijadikan dasar pengayaan dalam pembelajaran sehingga guru harus menciptakan "belajar untuk hidup bersama dalam damai dan harmoni" sesuai dengan salah satu pilar belajar dan UNESCO, yaitu *learning to live together*.

c. *Peran Guru dalam Menerapkan Nilai-nilai sebagai Inti Kebudayaan*

Peran guru dalam menerapkan nilai-nilai sebagai inti kebudayaan adalah:

- 1) menjadi model;
- 2) menciptakan masyarakat bermoral;
- 3) mempraktikkan disiplin moral;
- 4) menciptakan situasi demokrasi;
- 5) mewujudkan nilai-nilai melalui kurikulum;
- 6) menciptakan budaya kerja sama;
- 7) menumbuhkan kesadaran karya;
- 8) mengembangkan refleksi moral;
- 9) mengajarkan revolusi konflik.

B. Kurikulum Pembelajaran Multikultural

1. Perspektif dan Tahapan Kurikulum Multikultural

Berdasarkan definisi dan tujuan pendidikan multikultural, kurikulum pendidikan multikultural seharusnya berisi materi yang dapat menghadirkan lebih dari satu perspektif tentang fenomena kultural. Untuk menghadirkan keragaman perspektif dalam kurikulum ini, menurut James A. Bank (Zoran Minderovic, 2004: 2), dapat dilakukan dengan empat tahap, yaitu:

- a. tahap kontribusi (*contribution level*),
- b. tahap penambahan (*additive level*),
- c. tahap perubahan (*transformative level*),
- d. tahap aksi sosial (*social action level*).

Jika pada tahap kontribusi, kurikulum memfokuskan pada kebudayaan minoritas tertentu, pada tahap penambahan, kurikulum memperkenalkan konsep dan tema-tema baru. Misalnya, tema-tema yang berkaitan dengan multikulturalisme tanpa mengubah struktur kurikulum yang esensial.

Selanjutnya, apabila pada tahap perubahan, kurikulum memfasilitasi siswa untuk melihat berbagai isu dan peristiwa dari perspektif budaya minoritas, pada tahap aksi sosial, kurikulum

mengajak siswa untuk memecahkan problem sosial yang disebabkan oleh persepsi budaya dalam satu dimensi.

Mark K. Smith (2002: 3) memosisikan kurikulum pada empat pendekatan, yaitu kurikulum sebagai silabus (*curriculum as a body of knowledge to be transmitted*), kurikulum sebagai produk (*curriculum as product*), kurikulum sebagai proses (*curriculum as process*), dan kurikulum sebagai praksis (*curriculum as praxis*).

Pada bagian ini, fokus akan diarahkan pada dua pendekatan, yaitu kurikulum sebagai silabus dan kurikulum sebagai proses.

2. *Kurikulum sebagai Silabus*

Kurikulum sebagai silabus dapat dipahami dalam pengertian “sejumlah pernyataan atau daftar pokok bahasan, bahan ajar, dan sejumlah mata pelajaran yang akan dijadikan sebagai bahan dalam proses pembelajaran” (Smith, 2002: 3).

Berdasarkan hal tersebut, kurikulum dimaknai sebagai kumpulan pengetahuan yang berbentuk mata pelajaran. Dengan demikian, pendidikan yang menjadikan kurikulum sebagai silabus merupakan proses penyampaian sejumlah mata pelajaran kepada siswa dengan metode tertentu.

Untuk memberikan pendidikan multikultural, sekolah atau guru perlu menelaah secara kritis tentang materi dan bahan ajar yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran agar tidak terjadi berbagai macam bias. Dalam kaitan ini, Sadker (Donna M. Gollnick & Philip C. Chinn, 1983: 299-300) mencatat adanya enam macam bias dalam buku teks yang digunakan dalam pembelajaran. Keenam macam bias tersebut, yaitu:

- a. bias yang tidak terlihat (*invisibility*),
- b. pemberian label (*stereotyping*),
- c. selektivitas dan ketidakseimbangan (*selectivity and imbalance*),
- d. tidak mengacu realitas (*unreality*),
- e. pembagian dan isolasi (*fragmentation and isolation*),
- f. bahasa (*language*).

Pada umumnya, buku teks yang digunakan guru dalam proses pembelajaran menekankan pembahasannya pada budaya mayoritas, sedangkan budaya minoritas sering diabaikan. Inilah yang disebut dengan bias tidak terlihat (*invisibility*).

Bias lain yang terdapat dalam buku-buku teks selama ini adalah adanya pemberian label kepada kelompok lain, baik positif maupun negatif. Bias ini disebut *stereotyping*.

Selain itu, buku-buku teks yang dijadikan pegangan guru biasanya menggunakan perspektif budaya mayoritas dan mengabaikan perspektif budaya minoritas. Inilah yang disebut bias *selectivity and imbalance*. Misalnya, buku teks fiqh yang digunakan di sekolah NU, perspektif yang dipilih adalah perspektif yang sejalan dengan paham organisasi, sedangkan perspektif lain diabaikan.

Bias lain yang terdapat dalam buku teks adalah *unreality*. Maksudnya, buku teks yang dijadikan pegangan guru tidak mengacu pada data yang riil. Misalnya, buku teks Sejarah Indonesia pada masa Orde Baru banyak yang menginformasikan peristiwa dengan pelaku yang tidak sebenarnya.

Untuk mengurangi kecenderungan bias tersebut, kurikulum berbasis multikultural perlu memasukkan materi dan bahan ajar yang berorientasi pada penghargaan kepada orang lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, James Lynch (1986: 86-7) merekomendasikan agar sekolah atau guru menyampaikan pokok-pokok bahasan multikultural dengan berorientasi pada dua tujuan, yaitu:

- a. penghargaan kepada orang lain (*respect for others*);
- b. penghargaan kepada diri sendiri (*respect for self*).

Kedua bentuk penghargaan tersebut mencakup tiga ranah pembelajaran (*domain of learning*), yaitu pengetahuan (*cognitive*), keterampilan (*psychomotor*), sikap (*affective*).

Rekomendasi Lynch tersebut mempertimbangkan hubungan yang kompleks antara dimensi intelektual dan emosional dalam perilaku siswa.

3. *Kurikulum sebagai Proses*

Yang dimaksud dengan kurikulum sebagai proses (*curriculum as process*) adalah interaksi antara guru, siswa, dan pengetahuan di kelas (Smith, 2002: 5). Atas dasar ini, semua yang terjadi dalam proses pembelajaran dan semua yang dilakukan guru-siswa di kelas adalah kurikulum.

Menurut Lawrence Stenhouse (Smith, 2002: 7), kurikulum dengan model ini menuntut tiga langkah, yaitu perencanaan (*planning*), telaah empiris (*empirical study*), dan penilaian (*justification*).

- a. Tahap perencanaan harus memuat prinsip seleksi isi, prinsip pengembangan strategi pembelajaran, prinsip pengambilan keputusan tentang urutan materi, dan prinsip mendiagnosis kasus-kasus yang terjadi.
- b. Tahap telaah empiris harus memuat prinsip penilaian terhadap kemajuan siswa, prinsip penilaian terhadap kemajuan guru, petunjuk praktis pelaksanaan kurikulum dalam berbagai konteks dan situasi, serta informasi tentang perubahan efek yang terjadi karena konteks yang berbeda.
- c. Tahap penilaian harus memuat formulasi tujuan kurikulum yang dapat diuji secara kritis.

C. *Manajemen dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Multikultural*

Berdasarkan aspek metodik, strategi dan manajemen pembelajaran merupakan aspek penting dalam pendidikan multikultural. Harry K. Wong (Linda Starr, 2004: 2) mendefinisikan manajemen pembelajaran sebagai praktik dan prosedur yang memungkinkan guru mengajar dan siswa belajar.

1. *Manajemen Pembelajaran Multikultural*

Ricardo L. Garcia (1982: 146) membatasi pada tiga faktor dalam manajemen pembelajaran, antara lain lingkungan fisik (*physical environment*), lingkungan sosial (*human environment*), dan gaya pengajaran guru (*teaching style*).

- a. Lingkungan fisik yang aman dan nyaman; guru dapat mempertimbangkan aspek pencahayaan, warna, pengaturan meja dan kursi, tanaman, dan musik. Guru yang memiliki pemahaman terhadap latar belakang budaya siswanya akan menciptakan lingkungan fisik yang kondusif untuk belajar.
- b. Lingkungan sosial yang aman dan nyaman dapat diciptakan oleh guru melalui bahasa yang dipilih, hubungan simpatik antarsiswa, dan perlakuan adil terhadap siswa yang budayanya beragam (Linda Starr, 2004: 4).
- c. Gaya pengajaran guru yang menggembirakan. Menurut Garcia (1982: 146), gaya pengajaran guru merupakan gaya kepemimpinan atau teknik pengawalan yang digunakan guru dalam proses pembelajaran (*the kind of leadership or governance techniques a teacher uses*).

Dalam proses pembelajaran, gaya kepemimpinan guru sangat berpengaruh bagi ada-tidaknya peluang siswa untuk berbagi pendapat dan membuat keputusan. Gaya kepemimpinan guru berkisar pada otoriter, demokratis, dan bebas (*laizzes faire*).

Gaya kepemimpinan otoriter tidak memberikan peluang kepada siswa untuk saling berbagi pendapat. Materi yang diajarkan guru kepada siswa ditentukan oleh sang guru. Sebaliknya, gaya kepemimpinan guru yang demokratis memberikan peluang kepada siswa untuk menentukan materi yang perlu dipelajari siswa.

Adapun guru yang menggunakan gaya kepemimpinan bebas (*laizzes faire*) menyerahkan sepenuhnya kepada siswa untuk menentukan materi pembelajaran di kelas.

2. Strategi Pembelajaran Multikultural

Kelas yang beragam latar belakang budaya siswanya lebih sesuai dengan gaya kepemimpinan guru yang demokratis (Donna Styles, 2004: 3). Melalui pendekatan demokratis, guru dapat menggunakan beragam strategi pembelajaran, seperti dialog, simulasi, bermain peran, observasi, dan penanganan kasus (Abdullah Aly, 2003: 70-1).

- a. Melalui dialog, guru dapat mendiskusikan sumbangan aneka budaya dan orang dari suku lain dalam hidup bersama sebagai bangsa. Selain itu, guru juga dapat mendiskusikan bahwa semua orang dari budaya apa pun menggunakan hasil kerja orang lain dari budaya lain.
- b. Melalui simulasi dan bermain peran, siswa difasilitasi untuk memerankan diri sebagai orang-orang yang memiliki agama, budaya, dan etnik tertentu dalam pergaulan sehari-hari. Pada momen-momen tertentu, diadakan proyek dan kepanitiaan bersama, dengan melibatkan aneka ragam siswa dari berbagai agama, etnik, budaya, dan bahasa.
- c. Melalui observasi dan penanganan kasus, siswa dan guru difasilitasi untuk tinggal beberapa hari dalam masyarakat multikultural. Mereka diminta untuk mengamati proses sosial yang terjadi di antara individu dan kelompok yang ada, sekaligus melakukan mediasi jika ada konflik di antara mereka.

Dengan strategi pembelajaran tersebut siswa diasumsikan akan memiliki wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang adanya keragaman dalam kehidupan sosial. Bahkan, mereka akan memiliki pengalaman nyata untuk melibatkan diri dalam mempraktikkan nilai-nilai dari pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku yang toleran, simpatik, dan empatik pun akan tumbuh pada diri mereka.

Dengan demikian, proses pembelajaran yang difasilitasi guru tidak hanya berorientasi pada ranah kognitif, tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotorik.

Pendekatan demokratis dalam proses pembelajaran dengan beragam strategi pembelajaran tersebut menempatkan guru dan siswa memiliki status yang setara (*equal status*) karena mereka merupakan anggota komunitas kelas yang setara. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang absolut. Menurut Garcia (1982: 160), aturan dalam kelas harus dibagi untuk melindungi hak-hak guru dan siswa.

a. *Hak-hak Guru*

Hak-hak guru dalam proses pembelajaran, yaitu:

- 1) menilai para siswa sebagai manusia dan hak mereka sebagai manusia;
- 2) mengetahui waktu ketika menerapkan gaya pengajaran yang berbeda – otoriter, demokratis, dan bebas – untuk meningkatkan hak-hak siswa;
- 3) mengetahui waktu dan cara menerapkan ketidakpatuhan sipil;
- 4) memahami kompleksitas aturan bagi mayoritas dan melindungi hak-hak minoritas.

b. *Hak-hak Siswa*

Siswa memiliki hak-hak sebagai berikut.

- 1) Siswa berhak mengetahui hak sipil dan kewajibannya.
- 2) Siswa berhak mengetahui cara menggunakan hak dan kewajibannya.

3. *Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Multikultural*

Pendekatan demokratis dalam pembelajaran ini menuntut guru memiliki kompetensi multikultural. Farid Elashmawi dan Philip P. Harris (1994: 6-7) menawarkan enam kompetensi multikultural guru, yaitu:

- a. memiliki nilai dan hubungan sosial yang luas;
- b. terbuka dan fleksibel dalam mengelola keragaman siswa;
- c. siap menerima perbedaan disiplin ilmu, latar belakang, ras, dan gender;
- d. memfasilitasi pendatang baru dan siswa yang minoritas;
- e. mau berkolaborasi dan koalisi dengan pihak mana pun;
- f. berorientasi pada program dan masa depan.

Selain itu, James A. Bank (1989: 104-5) menambahkan kompetensi multikultural lain yang harus dimiliki oleh guru, yaitu:

- a. sensitif terhadap perilaku etnik para siswa;
- b. sensitif terhadap kemungkinan adanya kontroversi tentang materi ajar;
- c. menggunakan teknik pembelajaran kelompok untuk mempromosikan integrasi etnik dalam pembelajaran.

D. Proses Pengelolaan Pembelajaran Multikultural

Pendidikan multikultural merupakan proses transformasi yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai maksud dan tujuannya.

1. *Menentukan Tujuan yang Akan Dikembangkan pada Siswa dalam Proses Pendidikan Multikultural*

Menurut Zamroni (2011), tujuan yang akan dikembangkan pada siswa dalam proses pendidikan multikultural, yaitu sebagai berikut.

- a. Siswa memiliki kemampuan berpikir kritis atas materi yang telah dipelajari.
- b. Siswa memiliki kesadaran atas sifat sakwasangka atas pihak lain yang dimiliki, mengkaji penyebab dan asal sifat itu muncul, serta terus mengkaji cara menghilangkannya.
- c. Siswa memahami bahwa setiap ilmu pengetahuan bagaikan sebuah pisau bermata dua: dapat dipergunakan untuk menindas atau meningkatkan keadilan sosial.
- d. Siswa memahami cara mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan.
- e. Siswa merasa terdorong untuk terus belajar guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya.
- f. Siswa memiliki cita-cita yang akan dicapai sejalan dengan yang dipelajari.

BAB 12

MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS MULTIKULTURAL

Bangsa Indonesia menganut prinsip falsafah yang majemuk, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Prinsip ini mengandung makna dan nilai yang sangat dalam serta luas bagi pengembangan kerukunan dan keutuhan hidup. Kalimat *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai pemersatu atas keragaman budaya, bahasa, suku, etnis, dan agama. Perumusan gagasan *Bhinneka Tunggal Ika* oleh *founding fathers* kita dahulu diupayakan agar perjalanan bangsa ini ke depan dapat menuai keharmonisan atas keberbedaan yang ada di tubuh bangsa ini.

Prinsip ke-*bhinneka*-an ini didasari oleh pemikiran mengenai keragaman bahasa, tradisi dan budaya, serta agama Tanah Air dari Sabang sampai Merauke. Kultur ini pula yang mewarnai sikap bangsa yang toleran dan sadar akan pluralitas sejak dahulu. Penduduk Indonesia mudah diterima di berbagai bangsa dan kalangan di dunia.

Pengembangan pendidikan multikultural dalam KTSP moto *Bhinneka Tunggal Ika* yang tercantum dalam lambang negara Indonesia sangat tepat dalam menggambarkan realita yang ada. Pendidikan yang diharapkan mampu menghasilkan *output* yang bisa menjawab tantangan zaman tidak mudah diwujudkan.

Pendidikan menjadi standar dan tolok ukur seberapa jauh sebuah negara mampu bersaing di dunia internasional. Semakin

baik mutu pendidikan yang dimiliki suatu negara, negara tersebut semakin siap bersaing di kancah global. Sebaliknya, semakin rendah mutu pendidikan suatu bangsa, negara tersebut semakin terpuruk dan tersingkirkan dalam perhelatan dunia global.

A. Pentingnya Model-model Pendidikan Multikultural

1. Alasan Pendidikan Berfalsafah *Bhinneka Tunggal Ika*

Ada tiga alasan pendidikan berfalsafah *Bhinneka Tunggal Ika* penting dipikirkan di negara yang sangat majemuk, yang akhir-akhir ini pakar pendidikan menyebutnya multikultural. Upaya untuk membangun pemahaman ke-*bhinneka*-an dalam ke-*ika*-an dibutuhkan percermatan yang utuh.

a. *Sendi Equality*

Secara kebahasaan *equality* berasal dari kata *equal* yang berarti sama. Terma *equality* juga dapat dipahami sebagai persamaan. Adapun yang dimaksud *equality* dalam pendidikan adalah kesejajaran atau perlakuan merata yang diterima setiap peserta didik dalam memperoleh pendidikan tanpa memandang status ekonomi dan strata sosial.

Dalam UUD 1945 Pasal 31 diungkapkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Pasal ini merupakan implementasi dari penghargaan para perancang negeri ini dalam pembangunan bidang pendidikan yang selaras dengan kondisi masyarakat yang plural, baik secara stratifikasi sosial, agama, maupun suku.

b. *Sendi Pluralitas*

Kondisi masyarakat nusantara yang terdiri atas keragaman (pluralitas) agama, suku, dan budaya mendorong perlunya ditanamkan pemahaman yang inklusif dalam memahami perbedaan. Dengan ditanamkannya pemahaman pluralisme diharapkan setiap anak bangsa paham bahwa perbedaan ada bukan untuk saling menghantam antara satu agama dan agama lainnya, bukan sebagai ajang penjajahan suku mayoritas terhadap minoritas, bukan untuk

merendahkan suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain. Dengan adanya perbedaan itu harus dipahami sebagai sarana saling menghargai dan saling melengkapi (*mutual respect*).

Pluralitas adalah napas dari ke-*bhinneka*-an. Kehidupan yang *bhinneka* tidak dapat tercermin tanpa adanya pemahaman keberagaman. Dalam konteks Indonesia yang selama ini tersulut api eskalasi pertentangan etnis dan agama, tepat jika mulai menggelorakan semangat pendidikan multikultural. Karena lembaga pendidikan (informal, formal, dan nonformal) dinilai sangat efektif dalam melakukan transformasi nilai.

Dalam praksis pendidikan, kurikulum hendaknya diarahkan untuk membina pemahaman yang inklusif terhadap perbedaan. Dengan demikian, dari pemahaman siswa pada keragaman dalam lingkungan masyarakat dapat mendorong keselarasan dan tumbuh relasi sosial yang dinamis.

c. Menegakkan Toleransi

Sebuah aktualisasi dari pluralitas yang dalam istilah lokalnya dikenal dengan *tepa selira*. Apabila pemahaman tentang keberagaman (pluralitas) telah terpatni pada setiap individu, bersemalah sikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat sehingga masyarakat akan hidup harmonis dalam ke-*bhinneka*-an dan membangun bangsa dengan ke-*ika*-an.

Pemerintah telah memberikan prioritas yang tinggi pada perkembangan sektor pendidikan didasarkan pada asumsi bahwa pendidikan merupakan pilar utama membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Untuk mengurangi ketimpangan antara kualitas *output* pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan dan ketimpangan kualitas pendidikan antara desa dan kota, serta antara penduduk kaya dan miskin.

Di samping itu, muncul dua masalah yang berkaitan dengan persoalan tersebut, yaitu pendidikan cenderung menjadi sarana stratifikasi sosial dan pendidikan sistem persekolahan hanya mentransfer kepada peserta didik dengan *the dead knowledge*. Sebuah pengetahuan yang terlalu bersifat *text-bookish* sehingga bagaikan telah tercabut dari akar sumbernya ataupun aplikasinya (Johar, 2003).

Untuk itu, upaya pembaharuan pendidikan, khususnya kurikulum dan tenaga pengajarnya harus ditingkatkan kualitasnya agar proses pencerdasan generasi anak bangsa ini ke depan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya masing-masing tanpa mengalami gangguan diskriminatif.

Sebagai bangsa heterogen atau majemuk, multikulturalisme menjadi sangat penting dikembangkan maka program-program multikultural senantiasa diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman dan partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat agar tumbuh simpati terhadap perjuangan multikultural tersebut.

2. *Bentuk-bentuk Kreativitas*

Bentuk-bentuk kreativitas diperlukan untuk mengintensifkan perjumpaan dan dialog. Kebijakan multikultural biasanya mengusik kemapanan kelompok mayoritas yang telah menikmati *privilege* sebagai kelompok dominan. Penyebabnya adalah multikulturalisme berimplikasi terhadap masalah representasi politik, budaya, lapangan kerja, dan pendidikan. Reaksi pertama akan mendiskualifikasinya sebagai gagasan yang mau mempertahankan hegemoni, kepentingan, dan para pendukung mereka.

Pemahaman bahwa kelompok-kelompok budaya dan minoritas yang kuat akan mampu memberdayakan *civil society* tidak masuk dalam perspektif para penentang multikulturalisme.

Model pendidikan di Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang digunakan untuk mencapainya.

Sejumlah kritikus melihat bahwa revisi kurikulum sekolah yang dilakukan dalam proses pendidikan multikultural di Inggris dan beberapa tempat di Australia dan Kanada terbatas pada keragaman budaya yang ada sehingga terbatas pada dimensi kognitif. Penambahan informasi tentang keragaman budaya merupakan model pendidikan multikultural yang mencakup revisi atau materi pembelajaran, termasuk revisi buku-buku teks.

Terlepas dari kritik atas penerapannya di beberapa tempat, revisi pembelajaran seperti yang terjadi di Amerika Serikat merupakan strategi yang dianggap paling penting dalam reformasi

pendidikan dan kurikulum. Penulisan kembali sejarah Amerika dari perspektif yang lebih beragam merupakan agenda pendidikan yang diperjuangkan intelektual, aktivis, dan praktisi pendidikan.

Di Jepang, aktivis kemanusiaan melakukan advokasi serius untuk merevisi buku sejarah, terutama yang menyangkut peran Jepang pada Perang Dunia II di Asia. Walaupun belum diterima, usaha ini sudah mulai membuka mata sebagai masyarakat akan pentingnya perspektif baru tentang perang agar tragedi kemanusiaan tidak terulang kembali.

Sementara di Indonesia masih diperlukan usaha yang panjang dalam merevisi buku-buku teks agar mengakomodasi kontribusi dalam partisipasi yang lebih inklusif bagi warga dari berbagai latar belakang suku, agama, budaya, dan etnis. Di Indonesia juga diperlukan materi pembelajaran yang bisa mengatasi “dendam sejarah” di berbagai wilayah.

Model lainnya, pendidikan multikultural tidak hanya merevisi materi pembelajaran, tetapi juga melakukan reformasi dalam sistem pembelajaran. *Affirmative action* dalam seleksi siswa sampai rekrutmen tenaga pengajar di Amerika adalah salah satu strategi untuk membuat perbaikan struktural terhadap kelompok minoritas.

Contoh yang lain adalah model “sekolah pembauran” Iskandar Muda di Medan yang memfasilitasi interaksi siswa dari berbagai latar belakang budaya dan menyusun program anak asuh lintas kelompok.

Di Amerika Serikat, bersamaan dengan masuknya wacana tentang multikulturalisme, dilakukan berbagai lokakarya di sekolah-sekolah ataupun di masyarakat luas untuk meningkatkan kepekaan sosial (*sense of crisis*), toleransi, dan mengurangi prasangka antarkelompok.

3. *Langkah-langkah yang Perlu Dilakukan*

Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut.

- a. Multikulturalisme perlu menjadi bagian kurikulum pendidikan. Dimensi multikultural harus tercermin dalam pelajaran kewarganegaraan, geografi, sastra, sejarah, politik, dan ekonomi.

Pendidikan agama dan moral perlu memperkenalkan realita pluralitas, tanpa mereduksi ke dalam relativisme. Akan lebih baik jika pemeluk agama yang bersangkutan yang memberikan penjelasan.

- b. Dalam ruang publik, dimensi multikultural perlu mendapatkan dorongan selain dalam bentuk politik, juga dalam ekspresi seni, teater, musik, dan film.
- c. Perlu dikembangkan program yang memungkinkan dijaminnya representasi minoritas dalam politik, pendidikan, dan lapangan kerja.
- d. Pemerintah perlu mendorong pengelola media massa, seperti radio, televisi, koran, majalah, dan internet agar memerhatikan dan memiliki kepedulian multikultural.

B. Konsep Pengembangan Kurikulum Multikultural

1. *Konsep dan Tujuan Kurikulum Multikultural*

Secara generik, kurikulum multikultur merupakan sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya.

Salah satu tujuan penting dari konsep kurikulum multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan berkomunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

2. *Prinsip-prinsip Kurikulum Multikultural*

Menurut Banks (1993), dalam implementasinya paradigma kurikulum multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini.

- a. Kurikulum multikultural harus menawarkan konten (isi materi) yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.
- b. Kurikulum multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.
- c. Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda.
- d. Kurikulum multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya, dan agama
- e. Kurikulum yang multikultur mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaannya.

Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan kurikulum multikultural dalam struktur sekolah, antara lain:

- a. tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis, dan jenis kelamin;
- b. harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, di antaranya mencakup pakaian, musik, dan makanan kesukaan;
- c. harus memberikan kebebasan kepada anak dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkuat sikap anak agar merasa perlu terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.

C. Langkah Pengembangan Kurikulum Multikultural

Untuk mengembangkan kurikulum pada jenjang persekolahan yang siswanya beragam suku bangsa, dibutuhkan kesadaran akan *ke-bhinneka-an* yang dimiliki siswa. Langkah yang dilakukan sebagai berikut.

1. *Memilih Kriteria Bahan yang Signifikan*

Memilih kriteria bahan yang signifikan, relevan (cocok) dengan keberadaan mereka yang berbeda suku bangsa.

Agar tujuan dari kurikulum diarahkan untuk saling menguatkan “keberbedaan” mereka dengan cara memperkenalkan corak khas masing-masing suku tersebut kepada semua siswa, misalnya tentang jenis bahasa, adat, budayanya, seni, dan sebagainya.

2. *Pengintergrasian ke dalam Semua Mata Pelajaran*

Secara teknis, kurikulum multikultural dapat diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran yang dapat dimasuki nilai-nilai pengenalan multikultur tersebut.

Untuk mendukung hal tersebut, Hilda Taba (1962: 267-307) memberikan beberapa kriteria agar kurikulum yang diajarkan di sekolah tepat sasaran. Kriteria-kriteria tersebut, yaitu sebagai berikut.

- a. Kurikulum menyajikan bahan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Kebutuhan ini dapat ditafsirkan bahwa perbedaan suku tersebut menjadi bahan yang perlu dipikirkan. Adapun minat siswa, artinya memberikan kesenangan bahwa apa yang dipelajari berhubungan dengan kondisi yang ada di sekitar dirinya.
- b. Kurikulum dikesmas dengan mempertimbangkan prinsip keseimbangan antara keluasan dan kedalaman bahan.
- c. Dalam pembuatan kurikulum, meskipun dipusatkan pada bidang-bidang tertentu, tetap harus membuka kemungkinan untuk memahami bidang-bidang yang lain.
- d. Kurikulum mempertimbangkan relevansi dengan kenyataan sosial dan kultural agar siswa lebih mampu memahami dunia tempat ia hidup serta perubahan yang terus-menerus terjadi.

Pokok pikiran Hilda tersebut sangat menghargai cara multikultur dapat dikembangkan melalui pembelajaran di sekolah. Kurikulum harus didesain sesuai dengan kebutuhan masyarakat

BAB 13

MODEL PENGEMBANGAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DALAM PERSPEKTIF MULTIKULTURAL

A. Konsep Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural

1. *Pengertian Pendidikan Agama Islam*

Pendidikan adalah suatu proses pengubahan tingkah laku seseorang ataupun kelompok orang dalam usaha, mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Adapun menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam upaya mewujudkan suasana kegiatan belajar dan pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya dalam memperoleh nilai-nilai spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang sangat diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan Agama Islam (PAI), yaitu proses bimbingan dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi Muslim yang baik (A. Mustafa, 1999: 11). Hal itu disebabkan PAI merupakan alat yang dapat difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan

hidup manusia (sebagai makhluk pribadi dan sosial) pada titik optimal kemampuannya untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Pendidik sebagai sarana dalam membentuk kepribadian manusia seutuhnya sangat bergantung pada pemegang kebijakan dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan yang telah berjalan di berbagai daerah, mulai dari sistem yang sederhana sampai menuju sistem pendidikan Islam yang modern (Armai Arief, 2005: 4). Sejarah perkembangan pendidikan Islam, baik yang bersifat operasional maupun teknis, metode, sarana, dan kelembagaan, serta dasar dan tujuannya harus sesuai dengan sumber ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah (A. Mustafa, 1999: 11).

Menurut Zakiah Drajat (1995), pendidikan Islam merupakan pendidikan yang lebih banyak diarahkan pada perbaikan sikap mental yang terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain, baik bersifat teoretis maupun praktis.

Adapun ilmu pendidikan Islam yang bercorak historis adalah ilmu Islam yang memfokuskan kajiannya pada data-data empiris yang dapat dilacak dalam sejarah, baik berupa karya tulis, peninggalan berupa lembaga pendidikan, maupun pendidikan dengan berbagai aspeknya.

Berdasarkan berbagai pengertian pendidikan Islam, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses bimbingan dari pendidik yang mengarahkan anak didiknya pada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan dan terbentuknya pribadi Muslim yang baik.

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Dalam konteks tujuan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum, Departemen Pendidikan Nasional (1998) merumuskan sebagai berikut.

Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi Muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, berdisiplin, bertoleran (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.

Menurut Arifin (1997), ada tiga aspek nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam yang hendak direalisasikan melalui metode, yaitu:

- a. membentuk peserta didik menjadi hamba Allah yang mengabdikan kepada-Nya;
- b. bernilai edukatif yang mengacu pada petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis;
- c. berkaitan dengan motivasi dan kedisiplinan sesuai dengan ajaran Al-Quran yang disebut pahala dan siksaan.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat dikemukakan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah usaha sadar, yaitu kegiatan membimbing, pengajaran dan/atau latihan yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam secara berencana dan sadar dengan tujuan agar peserta didik bisa menumbuhkembangkan akidahnya melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi Muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. yang pada akhirnya mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia.

Agar hal tersebut tercapai, guru Pendidikan Agama Islam harus mampu mengembangkan kemampuannya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Di sinilah pentingnya mempelajari metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

3. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*

Pendidikan agama multikultural adalah model pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai moral, seperti kasih sayang, cinta seseorang, tolong-menolong, toleransi, menghargai keberagaman,

dan sikap-sikap lain yang menjunjung kemanusiaan (Presma, 2004: 285).

Pengembangan pendidikan agama berwawasan multikultural dapat diterapkan pada beberapa aspek, yaitu orientasi muatan (kurikulum), orientasi siswa, dan orientasi unit pendidikan (persekolahan). Pendidikan agama memanfaatkan muatan-muatan khas multikultural sebagai pemer kaya bahan ajar, konsep-konsep tentang harmoni kehidupan sebagai bersama antarumat beragama, saling toleransi, ko-eksistensi, pro-eksistensi, kerja sama, dan saling menghargai.

Untuk merancang strategi hubungan multikultural dalam pendidikan (termasuk pendidikan agama). Menurut Presma (2004: 285), setidaknya dapat digolongkan pada dua pengalaman, yaitu pengalaman pribadi dan pengalaman pengajaran yang dilakukan oleh guru (pendidik).

- a. Pengalaman pribadi dapat dikondisikan dengan menciptakan suasana, seperti seluruh peserta didik memiliki status dan tugas yang sama, seluruh peserta didik bergaul, berhubungan, berkembang, dan berkelanjutan bersama seluruh peserta didik berhubungan dengan fasilitas, guru, dan norma kelas yang sama.
- b. Pengalaman pengajaran adalah guru harus sadar akan keragaman siswa, bahan kurikulum dan pengajaran seharusnya merefleksikan keragaman, serta bahan kurikulum dituliskan dalam bahasa daerah atau etnik yang berbeda.

Pendidikan Islam yang berwawasan multikultural adalah suatu pendidikan yang membuka visi dan cakrawala yang lebih luas. Mampu melintas batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama sehingga mampu melihat “kemanusiaan” sebagai keluarga yang memiliki perbedaan ataupun kesamaan cita-cita.

4. *Nilai-nilai Pendidikan Islam Berbasis Multikultural*

a. *Nilai Andragogi*

Sekolah atau pendidikan diharapkan mampu mengubah keterpurukan manusia dari berbagai sudut yang mengakibatkan di ambang kehancuran. Knowles (1970) menggambarkan siswa sebagai dewasa diasumsikan memiliki kemampuan aktif untuk merencanakan arah, memiliki bahan, menyimpulkan ataupun mengambil manfaat, memikirkan cara terbaik untuk belajar, serta mampu mengambil manfaat dari pendidikan.

Fungsi guru adalah sebagai fasilitator bukan menggurui. Oleh karena itu, relasi antarguru dan siswa bersifat *multicommunication* dan seterusnya (Ali Maksum, 2011: 270). Pendidikan menjadi sarana bagi ajang kreativitas, minat, dan bakat peserta didik, visi pendidikan yang demokratis, liberatif, kemudian menjadi kebutuhan yang pokok ketika masih memiliki satu cita-cita tentang pentingnya membangun kehidupan yang humanis.

b. *Nilai Perdamaian*

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* memiliki misi menyebarkan kedamaian kepada semua umat manusia. Islam melarang jihad terhadap orang-orang non-Muslim yang menyatakan ingin hidup rukun dan damai bagi umat Islam. Sikap hidup damai bersama penganut agama lain telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. yang tidak melancarkan jihad terhadap orang minoritas, yaitu Yahudi karena mereka telah menyatakan diri untuk terikat dalam kontrak kenegaraan (Ali Maksum, 2011: 272).

c. *Nilai Inklusivisme*

Klaim-klaim sepihak sering muncul berkaitan dengan kebenaran suatu paham atau agama yang dipeluk oleh seseorang atau masyarakat, bahwa hanya agama yang dianutnya atau agama tertentu yang benar. Sementara agama lain tidak dianggap benar. Para pemerhati studi agama menyebut sikap eksklusif ini *truth claim* (Abdullah, 1994: 4). Adapun dalam realitasnya terdapat beragam agama dan keyakinan yang berkembang di masyarakat. Pluralitas

agama, keyakinan dan pedoman hidup manusia adalah fakta sosial yang tidak dapat dimungkiri.

d. *Nilai Kearifan*

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mencari sendiri berbagai hal yang dapat disebut prinsip sekunder (Machasin, 2012: 187). Dalam Islam, kearifan dapat dipelajari melalui ajaran sufi. Sufi berarti kebijakan atau kesucian, yaitu suatu cara membersihkan hati dari kelakuan buruk. Sufi mengajari manusia untuk membersihkan nafsu, hati, dan jiwa melalui pendekatan esoteris melihat Allah tidak untuk ditakuti, tetapi untuk dicintai.

e. *Nilai Toleransi*

Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *tolerance* yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan (David G. Gularnic, 2005: 13).

Pendidikan agama Islam perlu segera menampilkan ajaran-ajaran Islam yang toleran melalui kurikulum pendidikannya dengan tujuan menitikberatkan pada pemahaman dan upaya untuk bisa hidup dalam konteks berbeda agama dan budaya, baik secara individual maupun secara kelompok dan tidak terjebak pada primordialisme dan eksklusif kelompok agama dan budaya yang sempit.

f. *Nilai Humanisme*

Gerakan humanisme dan skolasitisme telah memunculkan ortodoksi kebahasaan. Selain itu, hukum keagamaan melahirkan *teradi* tertentu dalam pendidikan Islam, yaitu pendidikan Islam yang bisa dijadikan saluran transmisi dan inkulturasi keilmuan dan keabsahan hukum-hukum dalam kerangka ortodoksi. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan (Islam) dinilai sebagai "sistem sosial" senantiasa merefleksikan filosofi komunitas pendukungnya (Mahmud Arif, 2008: 107). Dengan demikian, pendidikan dan pembelajaran yang bersifat aktif-positif serta berdasarkan minat dan kebutuhan siswa sangat penting untuk memperoleh kemajuan, baik dalam

bidang intelektual emosi (EQ), afeksi, maupun keterampilan yang berguna untuk hidup praktis.

g. Nilai Kebebasan

Setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Allah. Derajat manusia tidak dibedakan berdasarkan suku, ras, ataupun agama. Allah memiliki ukuran tersendiri dalam memberikan penilaian terhadap kemuliaan seseorang (Muhammad Ali Lintubesang, 2011: 97).

Pendidikan adalah media kultural untuk membentuk manusia. Hubungan antara pendidikan dan manusia tidak dapat dipisahkan. Menurut Driyakarta (1998), pendidikan adalah “humanisasi”, yaitu sebagai media dan proses pembimbingan manusia muda menjadi dewasa, menjadi lebih manusiawi (humanior).

Jalan yang ditempuh menggunakan missifikasi jalur kultural. Tidak ada model “kapitalisasi pendidikan” atau “politisasi pendidikan” karena pendidikan secara murni berupaya membentuk insan akademis yang berwawasan dan berkepribadian manusia.

B. Karakteristik dan Asumsi Pendidikan Agama Islam Multikultural

1. Esensi Pendidikan Agama Islam Multikultural

Pendidikan agama Islam multikultural adalah proses transformasi dan internalisasi nilai-nilai dasar dan ideal ajaran Islam yang berusaha mengaksentuasikan aspek-aspek perbedaan dan disparitas kemanusiaan dalam konteksnya yang luas sebagai *Sunnat Allah* yang harus diterima dengan penuh arif dan lapang dada di tengah kenyataan kemanusiaan yang plural multikultural dalam segala dimensinya untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang berkeadilan.

Definisi yang lebih operasional, menurut Edi Susanto (2011: 30), dapat dinyatakan bahwa pendidikan agama Islam multikultural pluralistik:

- a. merupakan usaha komprehensif dalam mencegah terjadinya konflik antaragama;

- b. mencegah terjadinya radikalisme agama;
- c. pada saat yang sama memupuk terwujudnya sikap yang apresiatif positif terhadap pluralitas dalam dimensi dan perspektif apa pun;
- d. karena pendidikan agama Islam berwawasan multikultural pluralistik memiliki visi dan misi untuk mewujudkan agama pada sisi yang lebih santun, dialogis, apresiatif terhadap pluralitas dan peduli terhadap persoalan hidup yang komunal transformatif.

2. *Karakteristik Pendidikan Agama Islam Multikultural*

Zakiyuddin Baidhawy (Edi Susanto, 2011: 31) memerinci karakteristik pendidikan agama Islam berwawasan multikultural, yaitu:

- a. belajar hidup dalam perbedaan,
- b. membangun saling percaya,
- c. memelihara saling pengertian (*mutual understanding*),
- d. menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*), konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan.

3. *Asumsi Pendidikan Agama Islam Multikultural Pluralistik*

Menurut Edi Susanto (2011: 31), asumsi Pendidikan Agama Islam multikultural pluralistik, yaitu:

- a. inovasi dan reformasi pendidikan,
- b. identifikasi dan pengakuan akan pluralitas,
- c. perjumpaan lintas batas,
- d. interdependensi dan kerja sama,
- e. pembelajaran efektif dan proses interaksi.

C. Revitalisasi PAI dalam Pendidikan Multikultural

1. Pendidikan Agama yang Diberikan di Sekolah

Secara umum, pendidikan agama yang diberikan di sekolah tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya, konflik sosial sering diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah daerah yang rawan konflik. Hal ini membuat konflik memiliki akar dalam keyakinan keagamaan yang fundamental sehingga konflik sosial dan kekerasan semakin sulit di atasi karena dipahami sebagai bagian dari panggilan agamanya (Musa Asy'arie, 2007).

Sebenarnya akar timbulnya berbagai konflik sosial yang membuahkan anarki yang berkepanjangan sering tidak berhubungan dengan agama. Akan tetapi, dalam kenyataannya agama selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai konflik sosial tersebut.

Potensi konflik dan disintegrasi tersebut disebabkan agama dalam manifestasinya bersifat ambivalen terhadap persatuan dan kesatuan. Artinya, meskipun agama memiliki kekuatan pemersatu, agama memiliki kekuatan pemecah belah.

2. Alasan Agama Memiliki Ambivalensi

Menurut Din Syamsuddin (1989), alasan agama memiliki *ambivalensi*, yaitu sebagai berikut.

- a. Agama memiliki kecenderungan absolutistik, yaitu kecenderungan untuk memutlakkan keyakinan keagamaannya sebagai kebenaran tunggal. Akibatnya muncul rejeksionis, yaitu penolakan terhadap kebenaran agama lain yang dianggap berbeda dari dan berlawanan dengan yang lain.
- b. Akar konflik keagamaan seperti ini, menurut Arthur D'Adamo (Budhy Munawar Rachman, 1995: xxiv-xxvii) karena para pemeluk agama mengambil sikap untuk memandang agama dari sudut pandang agamanya sehingga yang lebih mencuat ke permukaan bukan esensi kebenaran yang hendak ditawarkan

oleh agama, melainkan semangat untuk menegaskan yang lain.

- c. *Truth claim* itulah maka setiap agama menyatakan ajarannya merupakan totalitas sistem makna yang berlaku bagi seluruh kehidupan, baik individual maupun sosial sehingga secara kodrati cenderung menegaskan klaim kebenaran teologis yang dimilikinya.

3. *Pandangan Inklusif dalam Kehidupan Pluralisme*

a. *Perlunya Pandangan Inklusif dalam Kehidupan Pluralisme*

Ketika hadir secara historis, agama berhadapan dengan pluralisme keagamaan sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat maka akan berimplikasi pada perilaku sosial. Dalam konteks ini pandangan inklusif sangat diperlukan untuk menerima kenyataan hidup pluralisme (Nurcholish Madjid, 1997: 71), sebagai syarat mutlak bagi para penganut agama apa pun.

- 1) Kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan agama masih diajarkan dengan cara menafikan hak hidup agama yang lainnya, seakan-akan hanya agamanya yang benar dan memiliki hak hidup, sedangkan agama yang lain salah, tersesat, dan terancam hak hidupnya, baik di kalangan mayoritas maupun yang minoritas.
- 2) Semangat pendidikan keagamaan yang sempit ini berlawanan secara fundamental dengan semangat pendidikan multikultural, dan akan memperlemah persatuan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam harus direvitalisasi dan direaktualisasi secara kreatif dan berwawasan multikultural sehingga tidak kehilangan jiwa dan semangatnya.
- 3) Pada dasarnya masyarakat multikultural tidak hanya ciri khas masyarakat Indonesia. Dalam pengalaman paling dini historisitas keberagaman Islam era kenabian Muhammad, masyarakat yang pluralistik secara religius telah terbentuk, bahkan telah menjadi kesadaran umum pada saat itu. Kondisi demikian merupakan suatu kewajaran karena secara kronologis agama Islam muncul setelah beberapa agama yang telah ada sebelumnya.

Bukti empiris sejarah peradaban Islam pada masa lalu menunjukkan Islam tampil secara inklusif dan sangat menghargai non-Muslim (Nurcholish Madjid, 1992: 102).

b. Sikap Inklusif

Sikap inklusif ada karena Al-Quran mengajarkan paham *religius plurality*. Bagi orang Islam, dianut suatu keyakinan bahwa sampai hari ini pun di dunia ini akan terdapat keragaman agama. Meskipun ada klaim bahwa kebenaran agama ada pada Islam (Q.S. Āli 'Imrān: 13). Akan tetapi, dalam Al-Quran disebutkan pula adanya hak orang lain untuk beragama dan agama tidak bisa dipaksakan kepada orang lain (Q.S. Al-Baqarah: 256).

Sikap inilah yang menjadi prinsip pada masa kejayaan Islam sekaligus mendasari kebijakan politik kebebasan beragama.

Inklusivisme Islam tersebut juga memberikan formulasi bahwa Islam adalah agama terbuka. Islam menolak eksklusivisme, absolutisme, dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pluralisme. Hal inilah yang perlu ditanamkan pada peserta didik dalam pendidikan agama Islam agar dapat melahirkan sikap inklusif sekaligus toleransi positif di kalangan umat beragama, sejalan dengan semangat Al-Quran agar fenomena lahiriah tidak menghalangi usaha untuk menuju titik temu (kalimat sawā') antara semuanya (Q.S. Āli 'Imrān: 64).

Kalaupun rumusan linguistik dan verbal keyakinan keagamaan itu berbeda-beda, dapat dipastikan bahwa eksternalisasi keimanan itu dalam dimensi kemanusiaan tentu sama.

Ajaran tauhid dalam Islam mengandung pengertian adanya suatu orde yang satu sekaligus menyeluruh. Dengan kata lain, terdapat hukum abadi yang universal.

Menurut Marcel A. Boisard (1982: 184), hukum yang abadi dan berlaku secara universal berawal dari suatu keyakinan bahwa manusia adalah satu dan tercipta karena kehendak yang satu, yaitu Tuhan pencipta alam. Kesadaran demikian hanya dapat tumbuh pada manusia yang menyadari prinsip-prinsip moral yang dapat mempersatukan perasaan yang merupakan dasar kebajikan universal.

Implikasi dari keyakinan bahwa seluruh manusia berasal dari sumber yang satu, yaitu Tuhan, berarti manusia seluruhnya adalah makhluk Tuhan.

Dengan demikian, seluruh manusia adalah bersaudara karena sama-sama makhluk Tuhan. Adanya persamaan keyakinan sama-sama makhluk Tuhan dan rasa persaudaraan tersebut menurut Harun Nasution (1995: 269), dapat menjadi landasan toleransi. Adanya keyakinan itu mengasumsikan bahwa ciptaan-Nya juga pada hakikatnya adalah suatu kesatuan. Pandangan ini membawa pada kesimpulan bahwa seluruh jagat raya (*universe*) termasuk di dalamnya seluruh umat manusia apa pun bangsa dan bahasanya adalah makhluk Tuhan juga meskipun agama dan keyakinannya berbeda.

c. *Sikap Realistis dalam Kehidupan Masyarakat*

Seorang agamawan harus memiliki sikap yang "lebih" realistis ketika berhadapan dengan realitas empiris kehidupan masyarakat beragama yang pluralistik, terutama dalam memosisikan agama.

Seperti dikemukakan oleh Hans Kung (S.T. Sunardi, 1994: 66-67), kedudukan agama harus dilihat dari dua arah, yaitu dari luar dan dari dalam.

- 1) Dari luar, diakui adanya bermacam-macam agama yang benar. Inilah dimensi relatif suatu agama. Agama-agama ini memiliki satu tujuan, yaitu keselamatan (dengan konsep berbeda-beda) dengan jalan berbeda-beda. Melalui perbedaan ini, agama-agama dapat memperkaya satu sama lain.
- 2) Dari dalam, diakui adanya satu agama yang benar, inilah dimensi mutlak suatu agama. Pendirian ini tidak harus menolak kebenaran agama-agama lain, walaupun benar pada tingkat-tingkat tertentu, sejauh tidak bertentangan dengan pesan agama yang dianut.

Melalui pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai etik fundamental yang dimiliki oleh peserta didik dapat menjadi benang merah yang dapat menghubungkan pengikut agama satu dan lainnya,

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, K. 2000. *Orang Baduy di Banten Selatan: Manusia Air Pemelihara Sungai*. Jurnal Antropologi Indonesia. Th. XXIV, No. 61, Jan-Apr 2000.
- Ainul Yaqin. 2005. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Alexander, M. et.all. 2010. *Infusion Nursing: An Evidence. Based. Approach*. Saunders. Elsevier. Inc.
- Anyang, Thambun Y.C. 1998. *Kebudayaan dan Perubahan Daya Taman Kalimantan dalam Arus Modernisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Ascher, Robert. 1971. *Analogy in Archaeological Interpretation*, dalam James Deetz (ed.). *Mans Imprint from The Past*. Boston: Little Brown.
- Asy'arie, Musa. 2004. *Pendidikan Multikutlural dan Konflik 1-2*. www.kompas.co.id. (Akses 11 Mei 2013)
- Azra, Azyumardi. 2001. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Kalimah.
- Baker G.C. 1994. *Planning and Organizing for Multicultural Instruction*. (2nd). California: Addison-Elsey Publishing Company.
- Banks, James A. 1989. *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Boston-London: Allyn and Bacon Press.
- _____. 1993. *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Allyn and Bacon.

-
- _____. *Teaching Strategies for Ethnic Studies*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Barker, Chris. 1999. *Cultural Studies, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanuddin. 1988. *Streotipe Enik Asimilasi, Integrasi Sosial, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Castles, Lance. 1967. *The Ethnic Profile of Jakarta, Indonesia Vol. I*. Ithaca: Cornell University.
- Chernev, Alex and Gregory S. Carpenter. 2001. *The Role of Market Efficiency Intuitions in Consumer Choice: A Case of Compensatory Inferences,* *Journal of Fashion Marketing and Management*.
- Coomans, Mikhail. 1987. *Manusia Daya Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: Gramedia.
- Dahrendorf, Ralf. 1958. *Toward a Theory of Sosial Conflict*. *Journal of Conflict Resolution* 2 (Juni).
- Danasasmita, Saleh dan Anis Djatisunda. 1986. *Kehidupan Masyarakat Kanekes*. Bandung: Sundanologi.
- Danim, Sudarwan. 2010. *Pedagogi, Andragogi dan Heutagogi*. Bandung: Alfabeta.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2005. *Pendidikan Multikultur*. Jakarta: Karya Agung.
- Djalal, Hasyim. 2007. *Jati Diri Bangsa dalam Ancaman Globalisasi, Pokok-pokok Pikiran Guru Besar Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Djohar. 2003. *Pendidikan Strategik, Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: LESFI.
- Duverger, Maurice. 2002. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ekadjati, Edi S. 1995. *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Freire, Paulo. 2000. *Pendidikan Pembebasan*. Jakarta: LP3S.

- Fukuyama, Francis. 2006. *Guncangan Besar-Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Galtung, Johan. 2005. *Mencari Solusi yang Ampuh bagi Konflik; Beberapa Tema yang Hilang, dalam Konflik Kekerasan Internal*. Dewi Fortuna Anwar dkk. (editor).
- Garna, Judhistira. 1988. *Perubahan Sosial Budaya Baduy dalam Nurhadi Rangkuti (Peny.). Orang Baduy dari Inti Jagat*. Bentara Budaya. Yogyakarta: Etnodata Prosindo.
- Garna, Y. 1993. *Masyarakat Baduy di Banten, dalam Masyarakat Terasing di Indonesia*. Koentjaraningrat dan Simorangkir (Ed.). Seri Etnografi Indonesia No. 4. Jakarta: Departemen Sosial dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial dengan Gramedia Pustaka Utama.
- Gollnick, M. Donna and C. Philip Chinn. 1998. *Multicultural Education in a Pluralistic Society*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gorski, Paul. 1984. *Six Critical Paradigm Shift for Multicultural Education and The Question We Should Be Asking*, dalam www.exchange.org/multicultural. (Diakses 15 Mei 2013).
- Greif, Stuart W. 1991. *WNI Problematik Orang Indonesia Asal Cina*. Penerjemah Dahana A. Jakarta: Grafiti.
- Guinness, Patrick. 1992. *The attitudes and Values of Betawi Fringe Dwellers in Djakarta*. Berita Antropologi 8 (September).
- H.A.R. Tilaar. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2004. *Kekuatan dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Hanum, Farida dan Setya Raharja.. 2006. *Pengembangan Model dan Modul Pendidikan Multikultural di SD (Sebagai Suplemen Mata Pelajaran IPS)*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Lemlit UNY.

- Hanum, Farida. 2005. *Fenomena Pendidikan Multikural pada Mahasiswa Aktimis UNY*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Lemlit UNY.
- Hasbullah. 2005. *Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta. Raja Grasindo Persada
- Hassan, Fuad. 2004. *Pendidikan adalah Pembudayaan*. Tonny D. Widiastono (editor). *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
- Haviland, William A. 1998. *Antropologi 2*. Terj. Jakarta: Airlangga.
- Hernandez, Hilda. 1989. *Multicultural Education: a Teacher Guide to Linking Context, Process, and Content*. New Jersey & Ohio: Prentic Hall.
- Hidayat, Z.M. 1984. *Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Hoevell, W.R. van. 1845. *Bijdrage Tot de Kennis der Badoeinen in het Zuiden der Residentie*. Bantam: TNI, VII.
- Husodo, Soswono Judo. 1985. *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
- Imron, D. Zamawi. 2005. *Kearifan dari Sastra Lisan Madura, Bunga Rampai Buku Berpikir Positif Suku-suku Bangsa*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Iskandar, J. 1991. *An Evaluation of the Shifting Cultivation Sitemes of the Baduy Society in West Java Using Sistem Modelling*. Thesis Abstract of AGS Students.
- Iskandar, Johan. 1992. *Ekologi Perladangan di Indonesia: Studi Kasus dari Daerah Baduy, Banten Selatan, Jawa Barat*. Jakarta: Djambatan.
- Jacobs, J. and J.J. Meijer. 1891. *De Badoejs*. s-Grahenhage: Martinus Nijhoff.
- Kleden, Ignas. 2004. *Masyarakat dan Negara Sebuah Persoalan*. Magelang: Indonesiatara.
- Klinken, Gerry van. 2005. *New Actors, New Identities: Post Suharto Ethnic Violence in Indonesia*, dalam Dewi Fortuna Anwar; Helene Bouvier; Glenn Smith; dan Roger Tol (Editors). 1985. *Violent Internal Conflict in Asia Pasific*. Jakarta: Yayasan Obor.

- Knoerr, Jacqueline. 2002. *Im Spannungsfeld von Traditionalität und Modernität: Die Orang Betawi und Betawi-ness in Jakarta*, Zeitschrift für Ethnologie.
- Knoerr, Jacqueline. 2007. *Kreolität und Postkoloniale Gesellschaft. Integration und Differenzierung in Jakarta*. Frankfurt & New York: Campus Verlag.
- Koentjaraningrat (ed.). 1993. *Masyarakat Baduy di Banten*, dalam *Masyarakat Terasing di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 2000. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2002. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Koorders, D. 1869. *Losse Aantekeningeng Tijdens het Bezoek Bij de Badois*. BKI, LVI.
- Kramer, C. 1979. *Etnoarchaeology: Implication of Ethnography for Archaeology*. New York: Columbia University Press.
- Langeveld, M.J. 1987. *Beknopte Teoretistische Pedagogiek*. Terjemahan I. P. Simajuntak. Jakarta: Nasco.
- Lawrence, E. Harrison and Samuel P. Huntington. 2000. *Culture Matters, How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books.
- Liliweri, Alo. 2001. *Gatra Gatra Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2003. *Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Mahfud, Choirul. 2008. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Makmur, A. 2001. *Pamarentahan Baduy di Desa Kanekes: Perspektif Kekerabatan*.
- Maksum, Ali, Luluk Yunan Ruhendi. 2004. *Paradigma Pendidikan Universal*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mulyana, Dedy dan Jalaludin Rakhmat (pnyt.). 2001. *Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mundardjito. 1981. *Etnoarkeologi: Peranannya dalam Pengembangan Arkeologi di Indonesia*. Majalah Arkeologi 1-2, IV.
- Murrell, P. 1991. *Cultural Politics in Teacher Education: What is Missing in the Preparation of Minority Teachers?* In M. Foster (ed.). *Reading on Equal Education*. Vol. 11: Qualitative Investigation into Schools and Schooling, 2005-225. New York: AMS.
- Nasikun. 2005. *Imperatif Pendidikan Multikultural di Masyarakat Majemuk*. Makalah. Disampaikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta Sabtu, 8 Januari 2005 di Ruang Seminar FE UMS.
- Ngainun, Naim dan Sauqi, Ahmad. 2008. *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Aruzz Nesia.
- Ning, Hasyim. 1991. *Masalah Rasionalisme yang Sebenarnya: dalam Nonpri di Mata Pribumi*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.
- Nugraheni, E. dan A. Winata. 2003. *Konservasi Lingkungan dan Plasma Nutfah Menurut Kearifan Tradisional Masyarakat Kasepuhan Gunung Halimun*. *Jurnal Studi Indonesia*. Volume 13, Nomor 2, September 2003.
- Parekh, Bhiku. 1996. *The Concept of Multicultural Education in Sohen Modgil, et.all. (ed.). Multicultural Education the Intermitable Debate*. London: The Falmer Press.
- Parsons, Talcott. 1949. *Essays in Sociological Theory Pure and Applied*. The Free Press. Glencoe.
- Pelly, Usman dan Asih Menanti. 1994. *Teori-Teori Sosial Budaya*. Jakarta: Dirjen Depdikbud.
- Permana, C.E. 2001. *Kesetaraan Gender dalam Adat Inti Jagat Baduy*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Permana, C.E. 2003. *Arca Domas Baduy: Sebuah Referensi Arkeologi dalam Penafsiran Ruang Masyarakat Megalitik*. *Indonesian Arheology on the Net*.
- Permana, C.E. 2003. *Religi dalam Tradisi Bercocok Tanam Sederhana*. *Indonesian Arheology on the Net*.
- Permana, R. Cecep Eka. 1996. *Tata Ruang Masyarakat Baduy*. (Tesis Antropologi). Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

- Pleyte, C.M. 1909. *Artja Domas, Het Zielenland der Badoeys*. Tijdschrift voor Indishe Taal, land en Volkenkunde. LI: Afl.
- Poerbakwatja, Soegarda. 2001. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.
- Poerwanto, Hari. 2005. *Orang Cina Khek dari Singkawang*. Depok: Komunitas Bambu.
- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raditya, Ardhie dan A. Sihabul Millah. 2009. *Tafsir Konflik*. Yogyakarta: Galang Press.
- Sadiman, Arief. dkk. 2009. *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Saidi, Ridwan. 1995. *Profil Orang Betawi: Asal Muasal, Kebudayaan, dan Adat Istiadatnya*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Saifuddin, Achmad Fediyani. 2005. *Antropologi Kontemporer, Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Prenada Media.
- Sairin, Syafri. 1992. *Telaah Pengelolaan Keserasian Sosial dari Literature Luar Negeri dan Hasil Penelitian Indonesia*. Jakarta: Kerja Sama Meneg KLH dan UGM.
- Santrock, J.W. 2002. *Life Span Development-Perkembangan Masa Hidup Jilid 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shahab, Yasmine (ed.). 1997. *Betawi dalam Perspektif Kontemporer: Perkembangan, Potensi, dan Tantangannya*. Jakarta: LKB.
- Siahaan, Herlem. 1989. *Pembauran di Kalimantan Barat Prospek dan Perspektif Sejarahnya*, dalam buku *Interaksi Antar Suku Bangsa dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Depdikbud.
- Sleeter, C.E. 1999. *Making Choice for Multicultural Education: Five Approaches to Race, Class and Gender*. New York: John Wiley & Sons.
- Soedjatmoko. 1996. *Etika Pembebasan*. Jakarta: LP3ES.

- Stavenhagen, Rudolfo. 1996. *Education for a Multicultural World, dalam Jasque Delors (et.all.). Learning: the Treasure Within.* Paris: UNESCO.
- Sudagung, Hendro Suroyo. 2001. *Mengurai Pertikaian Etnis, Migrasi Swakarsa Etnis Madura ke Kalimantan Barat.* Jakarta: ISAI.
- Sukadji, S. 2000. *Psikologi Pendidikan dan Psikologi Sekolah.* Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3). Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Suparlan, Parsudi. 1984. *Interaksi Antar Etnik di Beberapa Propinsi di Indonesia.* Jakarta: Dirjen Depdikbud.
- Surata, Agus, Tuhana Taufiq Andrianto. 2001. *Atasi Konflik Etnis.* Yogyakarta: Global Pustaka.
- Suryadinata, Leo dkk. 2004. *Penduduk Indonesia. Etnisitas dan Agama dalam Era Politik yang Berubah.* Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Suryadinata, Leo, Evi Nurvida Arifin. 2003. *Penduduk Indonesia.* Jakarta: LP3ES.
- Suseno, Franz Magnis. 1988. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.* Jakarta: Gramedia.
- Sutarno. 2007. *Pendidikan Multikultural.* Jakarta: Ditjen Dikti.
- Tricht, B. van. 1929. *Levende Antiquiteiten in West-Java.* Djawa IX.
- Warnaen, Suwarsih. 2002. *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis.* Yogyakarta: Matabangsa.
- Wijaya, Hussein (ed.). 1976. *Seni Budaya Betawi. Pralokarya Penggalan dan Pengembangannya.* Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Wiyata, A Latief. 2002. *Eksplorasi Unsur-unsur Primordial Madura sebagai Modal Budaya untuk Rekonsiliasi Pasca Konflik Etnik di Kalimantan Barat.* Makalah. Bengkulu: Forum Rektor.
- Zamroni. 2010. *The Implementation of Multicultural Education. A Reader.* Yogyakarta: Graduate Program The State University of Yogyakarta.

_____. 2010. *A Conception Frame-Work of Multicultural Teachers Education, A reader*. Yogyakarta: Graduate Program The State University of Yogyakarta.

_____. 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.

BIOGRAFI PENULIS

Drs. H. Yaya Suryana, M.Ag. lahir di Ciamis, 31 Mei 1957. Ia merupakan salah seorang dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SGD Bandung. Pendidikan dasar di SDN Banjar, Ciamis (lulus 1968), PGA 4 tahun di PUI Ciamis (lulus 1972), PGA 6 tahun di PUI Ciamis (lulus 1974), Fakultas Tarbiyah IAIN Darussalam Ciamis (1975-1977), Fakultas Tarbiyah YPPI Tasikmalaya (Sarjana Muda, lulus 1978), Sarjana di IAIN SGD Bandung (lulus 1984), Pascasarjana di UIN SGD Bandung (Program Magister, lulus 2010), dan Program Doktor PPS di UIN SGD Bandung (sedang proses).

Tugas mengajar pada Fakultas Tarbiyah (1985-sekarang) mengemban mata kuliah Akhlaq Tasawuf, Metodologi Riset, Metode Pengajaran Agama Islam, Antropologi Pendidikan, dan Penelitian Tindakan Kelas. Jabatan yang diemban adalah Sekretaris Jurusan Tadris Fakultas Tarbiyah IAIN SGD (1987-1993), Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah (1993-1996), Ketua Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah (1996-2000), Ketua LPM UIN SGD Bandung (2000-2008), Wakor Kopertis Wil. II Jabar Banten (2008-sekarang).

Karya tulis ilmiah di antaranya Penelitian Kerukunan Antara Etnik Sunda dan Cina di Kota Bandung (1992); Penelitian Perceraian Akibat Kawin Muda di Jawa Barat (1994); Penelitian Model Pergeseran Kebudayaan melalui Pesantren di Kota Bandung (2004); Penelitian Model Pesantren Kota untuk Menghilangkan Prostitusi di Kota Bandung (2010). Buku yang telah diterbitkan: *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Pustaka Azkia, Bandung, 2007); *Akidah Akhlak Madrasah Aliyah* (Grafindo, Bandung, 2010); *Prosedur Penelitian Tindakan Kelas* (Pustaka Mandiri, Bandung, 2010).

H. A. Rusdiana lahir di Puhun Ciamis pada tanggal 21 April 1961, merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara pasangan Bapak Sukarta (Alm.) dengan Ibu Junirah. Sejak kecil mengikuti orangtua di Dusun Puhun Desa Cinyasag Kec. Panawangan Kab. Ciamis. Tamat Sekolah Dasar di SD Cinyasag I, tahun 1975. Madrasah Tsanawiyah di Panawangan Ciamis lulus tahun 1979, Madrasah Aliyah Bandung, Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1987, S-2 Magister Manajemen (IMMI) Jakarta tahun 2002, dan S-3 Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung, tahun 2012.

Sesuai dengan moto hidupnya “belajar dan mengabdikan”, sebagai Dosen PNS pada UIN Bandung. Sampai saat ini, penulis telah menulis enam buku ajar, yaitu: *Pengantar Manajemen* (Tresna Bhakti, 2002), *Manajemen SDM* (Tresna Bhakti, 2007), *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Tresna Bhakti, 2008), *Pendidikan Kewarganegaraan* (Tresna Bhakti, 2009), *Sosiologi Pendidikan* (BatiC 2010), *Antropologi Pendidikan* (BatiC 2011), dan buku lepas *Manajemen SDM* cet. II (Arsad, 2013), *Manajemen Kewirausahaan* (Arsad, 2013), *Pendidikan Kewirausahaan* (Insan Komunika, 2013), *Membangun Desa Peradaban Berbasis Pendidikan* (Insan Komunika, 2013), *Konsep Inovasi Pendidikan* (Pustaka Tresna Bhakti, 2013). Sampai saat ini, penulis menunggu terbitnya 5 judul buku tentang *Manajemen* dan *Pendidikan* dari Penerbit Pustaka Setia Bandung.

Kegiatan penelitian terdiri atas enam judul penelitian, yaitu 3 judul penelitian individu dan 3 judul penelitian individu yang telah dilakukan sejak tahun 2007, dan 6 tulisan Jurnal Nasional, di antaranya 1 tulisan Jurnal Internasional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dengan membina dan mengembangkan Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Misbah Cipadung-Bandung yang mengembangkan pendidikan Diniyah, RA, MI, dan MTs sejak tahun 1984, serta garapan khusus melalui Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Tresna Bhakti, yang didirikannya sejak tahun 1994 sekaligus sebagai Ketua Yayasan, kegiatannya pembinaan dan pengembangan asrama mahasiswa pada setiap tahunnya tidak kurang dari 50 mahasiswa di Asrama Tresna Bhakti Cibiru Bandung. Membina dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tresna Bhakti sejak tahun 2007 di Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Ciamis.